



STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2018



STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2018

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jakarta, Juli 2019

STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2018

Penyusun & Penyunting:
Subbagian Data dan Informasi
Bagian Program dan Evaluasi
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Desain sampul & layout:
Tenang Carles Rinaldi Silitonga, S.Komp.

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Gedung Manggala Wanabakti
Blok I Lantai 7, Cq. Bagian Program dan Evaluasi
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp/Fax: (021) 5730289/ (021) 5734632
Email: datainformasi.planologi@gmail.com

ISBN 978-602-70660-4-5



Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 ini merupakan penerbitan lanjutan dari Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun sebelumnya yang disusun berdasarkan hasil kompilasi data dari Unit Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) sampai dengan 31 Desember 2018. Adapun acuan dalam penyusunan buku Statistik ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Data dan Informasi tentang pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan sekaligus menyempurnakan data dan informasi sebelumnya, yang disajikan dalam bentuk Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa dalam Buku Statistik ini masih banyak kekurangan, namun harapan kami semoga Buku Statistik ini dapat memberikan manfaat terutama bagi yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL



**Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP.19610202 198603 1 003**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
PENDAHULUAN	1
I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN	
TABEL I.1 REKAPITULASI LUAS PENUTUPAN LAHAN INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2018 (Ribu Ha)	7
TABEL I.2 ANGKA DEFORESTASI INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2017 - 2018 (Ha/Th).....	17
TABEL I.3 POTENSI TEGAKAN HUTAN DI INDONESIA.....	31
II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN	
TABEL II.1 PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN HUTAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018.....	33
TABEL II.2 PERKEMBANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PROSES REVIEW RTRWP.....	38
TABEL II.3 PROGRES PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN DALAM USULAN REVISI RTRWP	43
III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN	
TABEL III.1 LUAS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	49
TABEL III.2 PERKEMBANGAN PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN PARSIAL S/D DESEMBER 2018.....	50
TABEL III.3 PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN S/D DESEMBER 2018	51
TABEL III.4 PERKEMBANGAN PENGESAHAN BERITA ACARA TATA BATAS S/D DESEMBER 2018.....	52
TABEL III.5 PERKEMBANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN PER PROVINSI.....	53
TABEL III.6 PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HA DAN IUPHHK-HT S/D DESEMBER 2018.....	54
IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN	
TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI.....	55
TABEL IV.2 PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN).....	76
TABEL IV.3 PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK NON KEHUTANAN LAINNYA (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN).....	77
TABEL IV.4 PERKEMBANGAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN.....	78
V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)	
TABEL V.1 PERKEMBANGAN PENETAPAN WILAYAH KPH (KPHP DAN KPHL)	79
TABEL V.2 PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL.....	82
TABEL V.3 PENETAPAN WILAYAH KPH KONSERVASI	86
TABEL V.4 DAFTAR KPH BERLEMBAGA DAN UNIT-UNIT YANG DINAUNGI.....	89
TABEL V.5 PENETAPAN KPH FASILITASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2018.....	96

TABEL V.6	PENGESAHAN RPHJP KPH	101
VI. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN		
TABEL VI.1	IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (TAMBANG) S/D DESEMBER 2018.....	105
TABEL VI.2	IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (NON TAMBANG) S/D DESEMBER 2018	106
TABEL VI.3	IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK OPERASI PRODUKSI (TAMBANG) S/D DESEMBER 2018.....	107
TABEL VI.4	IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK NON TAMBANG S/D DESEMBER 2018.....	108
TABEL VI.5	PERKEMBANGAN LAHAN KOMPENSASI (S/D Tahap Berita Acara Serah Terima)	109
TABEL VI.6	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PKH).....	110
VII. AMDAL, UKL-UPL		
TABEL VII.1	DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKOMENDASI DAN IZIN LINGKUNGAN TAHUN 2013-2018.....	111
TABEL VII.2	DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN TAHUN 2013-2018	112
TABEL VII.3	PERKEMBANGAN PENERAPAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP	113
TABEL VII.4	PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT PERMASALAHAN DOKUMEN LINGKUNGAN	113
VIII. KLHS DAN EKOREGION		
TABEL VIII.1	JUMLAH SATUAN DAN LUAS EKOREGION PULAU	115
TABEL VIII.2	LUAS WILAYAH EKOREGION LAUT	118
TABEL VIII.3	KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	119
TABEL VIII.4	STATUS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) 2018	120
TABEL VIII.5	STATUS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (RTR KSP) 2018.....	121
TABEL VIII.6	STATUS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) 2017-2018.....	122
TABEL VIII.7	STATUS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) 2018.....	123
TABEL VIII.8	DATA DAN INFORMASI PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL DAN PROVINSI.....	124
TABEL VIII.9	DATA DAN INFORMASI PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA.....	126
TABEL VIII.10	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG AIR NASIONAL	129
TABEL VIII.11	KECENDERUNGAN PERUBAHAN KINERJA JASA LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PENGATUR AIR PERIODE 1996 SAMPAI DENGAN 2016.....	131
IX. DUKUNGAN MANAJEMEN		
TABEL IX.1	REKAPITULASI SEBARAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH.....	133

TABEL IX.2	SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH.....	135
TABEL IX.3	PERKEMBANGAN JUMLAH PNS BERDASARKAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH.....	138
TABEL IX.4	PERKEMBANGAN DIKLAT PENJENJANGAN PNS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.....	140
TABEL IX.5	REKAPITULASI PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.....	142
TABEL IX.6	REKAPITULASI PERKEMBANGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	150
TABEL IX.7	PERKEMBANGAN REALISASI KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	153

PENDAHULUAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

A. Landasan Pembangunan

Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ke depan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda perbaikan tata kelola kawasan hutan, pengelolaan sumber daya alam, mewujudkan kemandirian pangan, air, dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan perlu menetapkan langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi peran dan sasaran tersebut.

Program kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dilaksanakan sesuai yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu 1) Inventarisasi hutan; 2) Pengukuhan Kawasan Hutan; 3) Penatagunaan Kawasan Hutan; 4) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; 5) Penyusunan rencana kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu 1) Inventarisasi Lingkungan Hidup; 2) Penetapan Wilayah Ekoregion; 2) Penyusunan RPPLH; 3) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Instrumen KLHS, AMDAL, UKL-UPL, serta Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

B. Strategi

Peran dan fokus utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 ketiga yaitu *melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan*.

Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 adalah *memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan melalui, inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk

meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, *services* pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

C. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan

Monitoring sumber daya hutan secara periodik dengan interval 3 (tiga) tahunan telah dilaksanakan sejak tahun 2000 - 2009. Dengan perkembangan teknologi penginderaan jauh, maka sejak tahun 2011, monitoring sumber daya hutan telah dilakukan setiap tahun. Monitoring sumber daya hutan dilaksanakan melalui kegiatan penafsiran penutupan lahan seluruh Indonesia dengan menggunakan citra satelit resolusi sedang. Hasil penafsiran penutupan lahan selanjutnya digunakan untuk rekalkulasi penutupan lahan dan penghitungan laju deforestasi.

Dalam rangka inventarisasi hutan nasional, sejak tahun 1990 telah dilaksanakan pengukuran *Temporary Sample Plot (TSP)* dan *Permanent Sample Plot (PSP)* di kawasan hutan di bawah ketinggian 1.000 mdpl di seluruh Indonesia. Pengukuran TSP dilaksanakan untuk mengetahui potensi tegakan hutan, sedangkan PSP dilaksanakan untuk mengetahui riap tegakan dan monitoring perubahan tegakan hutan. Sampai dengan saat ini kegiatan PSP masih dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Dari hasil pengukuran TSP dan PSP telah dilakukan penghitungan taksiran potensi tegakan per hektar semua jenis di masing-masing provinsi dan secara nasional.

D. Perencanaan Kawasan Hutan

Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Kehutanan adalah produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana spasial dan numerik serta disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan dan jenis-jenis pengelolannya serta dalam jangka waktu pelaksanaan dan dalam penyusunannya telah memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan prioritas pembangunan.

Ruang Lingkup perencanaan terdiri dari:

- 1) Rencana Kawasan Hutan; dan
- 2) Rencana Pembangunan Kehutanan.

Rencana kawasan hutan berupa Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota, adalah perencanaan kehutanan yang memuat arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan jangka panjang untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dan dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan tata ruang wilayah.

Rencana Pembangunan Kehutanan adalah Rencana Kehutanan dalam jangka waktu dan skala geografis tertentu, yang merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional dan Wilayah dengan memperhatikan arahan spasial Rencana Kawasan Hutan dan dalam penyusunannya mengikuti siklus perencanaan pembangunan Nasional.

E. Pengukuhan Kawasan Hutan

Pengukuhan kawasan hutan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap suatu wilayah tertentu yang bukan kawasan hutan sehingga dapat diproses menjadi kawasan hutan. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi proyeksi batas, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan patok dan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas. Pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan pada seluruh proses pengukuhan kawasan hutan, yang berupa peta:

1. Penunjukkan kawasan hutan;
2. Rencana trayek batas;
3. Pemasangan patok batas sementara;
4. Penataan batas kawasan hutan;
5. Penetapan kawasan hutan.

Selanjutnya, penetapan kawasan hutan adalah penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan tetap dengan keputusan Menteri.

Kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan merupakan upaya memberikan kepastian hukum dengan adanya kejelasan atas fungsi letak batas, luas kawasan hutan dan status hukum (legal) atas kawasan hutan, untuk mendapatkan pengakuan/legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan dan atau berada di sekitar kawasan hutan. Dari luas kawasan hutan ±120 juta Ha, realisasi sampai dengan Desember 2018, penetapan kawasan hutan yang sudah dicapai adalah ±88,42 juta ha.

F. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain. Sebagai contoh perubahan fungsi dari kawasan hutan lindung menjadi hutan konservasi. Sedangkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan, diantaranya melalui mekanisme tukar menukar kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan dan perubahan peruntukan untuk wilayah provinsi.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan Kawasan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

G. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Pembentukan KPH adalah serangkaian proses perencanaan/penyusunan desain kawasan hutan ke dalam wilayah-wilayah pengelolaan hutan yang didasarkan atas fungsi pokok dan peruntukannya menjadi KPH. Dengan pembentukan KPH, maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH, dimana KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan Pembentukan KPH adalah untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari.

Pada dasarnya seluruh kawasan hutan yang terdiri dari 3 (tiga) fungsi pokok yaitu konservasi, lindung dan produksi terbagi habis dalam KPH-KPH. KPH tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih fungsi hutan yang penamaannya sesuai fungsi pokok yang dominan.

H. Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Penggunaan kawasan hutan dapat bersifat komersial maupun non komersial. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan. Sedangkan penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Penggunaan kawasan hutan hanya dapat diberikan di dalam *Kawasan Hutan Produksi* dan/atau *Kawasan Hutan Lindung*. Penggunaan kawasan hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan

mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

I. Amdal, UKL-UPL

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen lingkungan hidup dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun:

- a. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); dan
- c. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL tercantum di dalam Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.

UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota. Dalam menetapkan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL, gubernur atau bupati/walikota dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L). Hanya rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal dan UKL-UPL yang wajib memiliki izin lingkungan. Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL tidak wajib memiliki izin lingkungan.

Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

J. KLHS dan Ekoregion

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusun, Pelaksana, dan Penyelenggara KLHS adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pembuat Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

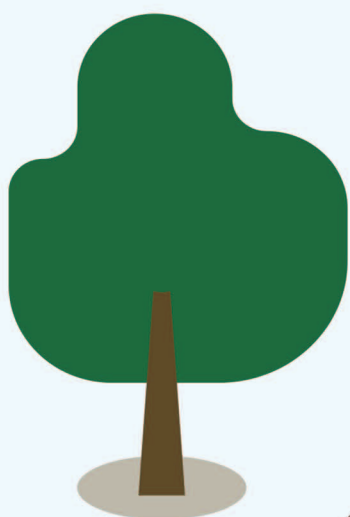
Hasil penilaian kelayakan KLHS berupa Rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Gubernur tentang Layak/Tidak Layak KRP dilaksanakan. Apabila hasil penilaian kelayakan KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ekoregion adalah geografis ekosistem, artinya pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan geografis. Penetapan ekoregion menghasilkan batas (*boundary*) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion. Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, UU Nomor 32/2009 memandatkan perlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan LH (RPPLH). Rencana perlindungan dan pengelolaan LH terdiri dari empat muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UU Nomor 32 Tahun 2009 memandatkan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan LH harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.



PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN



*Direktorat Inventarisasi
dan Pemantauan Sumber Daya Hutan*

TABEL I.1. REKAPITULASI LUAS PENUTUPAN LAHAN INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2018 (Ribu Ha)

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										TOTAL								
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	APL	JUMLAH	%									
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	ACEH																			
	A. Hutan	764,2	1.645,8	105,9	358,5	2.874,4	1,9	2.876,3	233,9		3.110,2	55,1								
	- Hutan Primer	550,2	1.186,1	51,3	128,4	1.916,1	0,0	1.916,1	33,1		1.949,2	34,5								
	- Hutan Sekunder	208,6	457,7	53,2	202,6	922,1	1,8	923,9	183,4		1.107,3	19,6								
	- Hutan Tanaman *	5,4	2,0	1,4	27,5	36,2	0,0	36,2	17,4		53,7	1,0								
	B. Non Hutan	79,3	148,6	39,5	192,6	459,9	13,5	473,4	2.063,7		2.537,1	44,9								
	Total	843,5	1.794,3	145,4	551,1	3.334,3	15,4	3.349,7	2.297,6		5.647,3	100,0								
2	SUMATERA UTARA																			
	A. Hutan	374,5	665,6	316,6	271,8	1.628,5	5,5	1.634,0	144,3		1.778,4	25,0								
	- Hutan Primer	292,5	250,9	34,3	2,8	580,4	0,9	581,3	3,1		584,4	8,2								
	- Hutan Sekunder	81,9	385,8	276,3	191,2	935,3	4,7	940,0	117,1		1.057,1	14,9								
	- Hutan Tanaman *	0,2	28,9	5,9	77,8	112,8	-	112,8	24,1		136,9	1,9								
	B. Non Hutan	52,5	541,3	325,2	432,6	1.351,6	70,1	1.421,7	3.901,9		5.323,6	75,0								
	Total	427,0	1.206,9	641,8	704,5	2.980,1	75,7	3.055,8	4.046,2		7.102,0	100,0								
3	SUMATERA BARAT																			
	A. Hutan	682,8	589,0	151,5	261,3	1.684,6	79,5	1.764,1	166,9		1.931,0	46,2								
	- Hutan Primer	378,8	172,7	4,9	6,0	562,5	4,2	566,7	13,3		580,0	13,9								
	- Hutan Sekunder	304,0	415,9	145,3	243,5	1.108,7	75,1	1.183,8	148,9		1.332,8	31,9								
	- Hutan Tanaman *	-	0,4	1,3	11,8	13,4	0,1	13,5	4,7		18,2	0,4								
	B. Non Hutan	87,0	202,7	81,7	99,3	470,7	108,1	578,8	1.674,1		2.252,9	53,8								
	Total	769,8	791,7	233,2	360,6	2.155,3	187,6	2.342,9	1.841,0		4.183,9	100,0								
4	RIAU																			
	A. Hutan	476,4	89,4	292,5	1.251,9	2.110,2	58,8	2.169,0	91,5		2.260,5	25,4								
	- Hutan Primer	133,5	22,4	22,6	22,7	201,2	1,6	202,8	1,0		203,8	2,3								
	- Hutan Sekunder	338,5	65,2	248,2	636,9	1.288,8	50,3	1.339,1	63,3		1.402,4	15,8								
	- Hutan Tanaman *	4,4	1,8	21,7	592,3	620,2	7,0	627,2	27,1		654,3	7,4								
	B. Non Hutan	154,3	144,5	724,8	1.087,6	2.111,3	1.126,6	3.237,9	3.384,4		6.622,3	74,6								
	Total	630,8	233,9	1.017,3	2.339,6	4.221,6	1.185,4	5.407,0	3.475,8		8.882,8	100,0								

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN												TOTAL		
		HUTAN TETAP						Jumlah	HPK	Jumlah	APL	Jumlah	%			
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	7							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
5	JAMBI															
	A. Hutan	551,9	130,6	128,3	396,6	1.207,4	0,1	1.207,4	66,8	1.274,2	26,4					
	- Hutan Primer	455,0	97,3	46,6	69,6	688,5	0,0	688,5	26,9	695,3	14,4					
	- Hutan Sekunder	96,9	33,2	77,4	96,8	304,3	0,0	304,3	30,1	334,4	6,9					
	- Hutan Tanaman *	-	0,1	4,3	230,2	234,6	0,1	234,7	9,8	244,5	5,1					
	B. Non Hutan	133,6	49,0	130,0	567,2	879,8	11,3	891,1	2.667,1	3.558,2	73,6					
	Total	685,5	179,6	258,3	963,8	2.087,1	11,4	2.096,5	2.733,8	4.832,3	100,0					
6	SUMATERA SELATAN															
	A. Hutan	399,3	254,9	73,6	330,5	1.058,2	0,1	1.058,3	82,7	1.141,0	13,2					
	- Hutan Primer	286,2	96,8	10,8	6,9	400,7	0,0	400,7	2,9	403,5	4,7					
	- Hutan Sekunder	109,2	155,7	49,9	56,7	371,6	0,0	371,6	51,6	423,2	4,9					
	- Hutan Tanaman *	3,9	2,3	12,9	266,9	285,9	0,0	286,0	28,3	314,3	3,6					
	B. Non Hutan	342,4	323,4	140,3	1.382,4	2.188,5	160,9	2.349,4	5.136,5	7.485,9	86,8					
	Total	741,7	578,3	213,9	1.712,8	3.246,7	161,0	3.407,7	5.219,2	8.626,9	100,0					
7	KEP. BANGKA BELITUNG															
	A. Hutan	10,3	70,4	0,0	96,7	177,4	0,0	177,4	40,7	218,1	13,1					
	- Hutan Primer	1,5	19,5	0,0	7,1	28,0	0,0	28,1	3,5	31,6	1,9					
	- Hutan Sekunder	8,8	51,0	0,0	89,6	149,3	0,0	149,3	37,2	186,5	11,2					
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	0,0					
	B. Non Hutan	24,2	95,9	-	345,4	465,6	0,7	466,2	975,4	1.441,6	86,9					
	Total	34,5	166,4	-	442,1	642,9	0,7	643,6	1.016,1	1.659,7	100,0					
8	BENGKULU															
	A. Hutan	399,8	170,4	62,8	14,5	647,5	0,1	647,6	29,7	677,2	33,8					
	- Hutan Primer	346,0	103,0	16,6	2,9	468,5	-	468,5	0,7	469,2	23,4					
	- Hutan Sekunder	53,6	67,4	46,2	11,6	178,8	0,0	178,8	24,2	203,0	10,1					
	- Hutan Tanaman *	0,2	-	-	-	0,2	0,1	0,2	4,8	5,0	0,2					
	B. Non Hutan	63,2	80,4	110,5	11,3	265,4	11,7	277,1	1.048,6	1.325,7	66,2					
	Total	463,0	250,8	173,3	25,9	912,9	11,8	924,6	1.078,3	2.002,9	100,0					
9	LAMPUNG															
	A. Hutan	251,6	50,1	2,3	13,0	317,0	0,0	317,0	16,2	333,1	9,7					
	- Hutan Primer	151,1	2,4	1,1	0,0	154,6	0,0	154,6	0,6	155,2	4,5					
	- Hutan Sekunder	100,5	47,7	1,2	0,1	149,5	0,0	149,5	12,4	161,9	4,7					
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	12,9	12,9	-	12,9	3,1	16,0	0,5					
	B. Non Hutan	210,5	267,5	31,0	178,7	687,8	-	687,8	2.414,5	3.102,2	90,3					
	Total	462,0	317,6	33,4	191,7	1.004,7	-	1.004,7	2.430,6	3.435,4	100,0					

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN											TOTAL								
		HUTAN TETAP						Jumlah	APL	Jumlah	%										
		HK	HL	HPT	HP	HPK	Jumlah														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
10	KEPULAUAN RIAU																				
	A. Hutan	1,5	49,5	66,2	49,5	166,8	44,0	210,8	58,3	269,1	32,9										
	- Hutan Primer	0,0	0,6	3,6	4,8	9,0	2,7	11,7	1,3	13,1	1,6										
	- Hutan Sekunder	1,5	48,9	62,6	44,7	157,7	41,3	199,0	55,7	254,7	31,2										
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	1,3	1,3	0,2										
	B. Non Hutan	3,2	47,8	52,6	29,3	133,0	38,1	171,0	376,9	547,9	67,1										
	Total	4,7	97,4	118,8	78,8	299,8	82,1	381,8	435,2	817,0	100,0										
	SUMATERA																				
	A. Hutan	3,912,3	3,715,6	1,199,7	3,044,3	11,871,9	190,0	12,061,9	930,9	12,992,8	27,5										
	- Hutan Primer	2,594,8	1,951,7	191,9	251,1	4,989,5	9,4	4,998,9	86,4	5,085,4	10,8										
	- Hutan Sekunder	1,303,5	1,728,4	960,4	1,573,8	5,566,2	173,2	5,739,4	723,9	6,463,3	13,7										
	- Hutan Tanaman *	14,0	35,4	47,4	1,219,3	1,316,2	7,3	1,323,5	120,6	1,444,1	3,1										
	B. Non Hutan	1,150,1	1,901,2	1,635,7	4,326,5	9,013,5	1,541,1	10,554,6	23,642,9	34,197,4	72,5										
	Total	5,062,4	5,616,8	2,835,4	7,370,8	20,885,4	1,731,0	22,616,4	24,573,8	47,190,2	100,0										
11	BANTEN																				
	A. Hutan	93,2	6,3	22,9	10,4	132,8	0,0	132,8	30,4	163,2	17,4										
	- Hutan Primer	8,2	0,0	0,1	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,9										
	- Hutan Sekunder	61,3	4,2	3,3	0,7	69,5	0,0	69,5	3,7	73,1	7,8										
	- Hutan Tanaman *	23,8	2,1	19,5	9,7	55,1	-	55,1	26,7	81,8	8,7										
	B. Non Hutan	19,8	6,1	26,5	16,6	68,9	-	68,9	707,0	775,9	82,6										
	Total	113,0	12,4	49,4	27,0	201,8	-	201,8	737,4	939,2	100,0										
12	DKI JAKARTA																				
	A. Hutan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5										
	- Hutan Primer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	- Hutan Sekunder	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5										
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0										
	B. Non Hutan	0,2	0,0	-	0,2	0,3	-	0,3	64,7	65,0	99,5										
	Total	0,3	0,0	-	0,2	0,5	-	0,5	64,9	65,3	100,0										

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN											TOTAL				
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	APL		Jumlah	%					
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah			10	11			12				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2																
13	JAWA BARAT																
	A. Hutan	107,0	185,0	99,0	105,5	496,5	0,0	496,5	143,3	639,8	17,3						
	- Hutan Primer	7,7	1,3	0,0	1,2	10,2	0,0	10,2	0,1	10,3	0,3						
	- Hutan Sekunder	67,8	52,6	10,8	17,9	149,1	0,0	149,1	10,1	159,2	4,3						
	- Hutan Tanaman *	31,5	131,2	88,1	86,4	337,2	-	337,2	133,1	470,3	12,7						
	B. Non Hutan	25,2	106,3	91,2	97,4	320,1	-	320,1	2.738,7	3.058,8	82,7						
	Total	132,2	291,3	190,2	203,0	816,6	-	816,6	2.882,0	3.698,6	100,0						
14	JAWA TENGAH																
	A. Hutan	10,5	65,5	140,8	249,2	466,0	0,0	466,0	553,0	1.019,0	29,5						
	- Hutan Primer	0,0	7,4	0,5	0,0	7,9	0,0	7,9	0,0	7,9	0,2						
	- Hutan Sekunder	5,0	29,9	35,3	5,5	75,8	0,0	75,8	16,0	91,8	2,7						
	- Hutan Tanaman *	5,4	28,2	105,0	243,6	382,3	-	382,3	537,0	919,3	26,6						
	B. Non Hutan	5,9	18,9	43,1	113,2	181,1	-	181,1	2.256,5	2.437,6	70,5						
	Total	16,4	84,4	183,9	362,4	647,1	-	647,1	2.809,4	3.456,6	100,0						
15	DIYOGYAKARTA																
	A. Hutan	0,6	1,0	0,0	9,8	11,5	0,0	11,5	22,6	34,0	10,7						
	- Hutan Primer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	- Hutan Sekunder	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1						
	- Hutan Tanaman *	0,5	1,0	-	9,8	11,3	-	11,3	22,5	33,9	10,6						
	B. Non Hutan	0,3	1,0	-	4,0	5,3	-	5,3	280,0	285,4	89,3						
	Total	0,9	2,1	-	13,9	16,8	-	16,8	302,6	319,4	100,0						
16	JAWA TIMUR																
	A. Hutan	180,3	264,3	0,0	620,9	1.065,6	0,0	1.065,6	290,8	1.356,3	28,0						
	- Hutan Primer	26,1	12,9	0,0	4,1	43,1	0,0	43,1	1,9	45,0	0,9						
	- Hutan Sekunder	145,3	166,1	0,0	58,8	370,2	0,0	370,2	36,8	407,0	8,4						
	- Hutan Tanaman *	8,9	85,4	-	558,0	652,2	-	652,2	252,1	904,3	18,7						
	B. Non Hutan	49,8	80,4	-	161,9	292,1	-	292,1	3.189,2	3.481,3	72,0						
	Total	230,1	344,7	-	782,8	1.357,6	-	1.357,6	3.480,0	4.837,7	100,0						
	JAWA																
	A. Hutan	391,7	522,2	262,7	985,9	2.172,6	-	2.172,6	1.040,2	3.212,7	24,1						
	- Hutan Primer	42,0	21,5	0,6	5,3	69,4	-	69,4	2,0	71,5	0,5						

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN											TOTAL		
		HUTAN TETAP					HUTAN LINDUNG					APL	Jumlah	Jumlah	%
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah	HPK	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	- Hutan Sekunder	279,6	252,8	49,5	83,0	664,9	-	664,9	66,7	731,7	5,5				
	- Hutan Tanaman *	70,1	247,9	212,6	907,6	1.438,2	-	1.438,2	971,4	2.409,6	18,1				
	B. Non Hutan	101,2	212,7	160,8	393,2	867,9	-	867,9	9.236,1	10.104,0	75,9				
	Total	492,9	734,9	423,5	1.389,1	3.040,5	-	3.040,5	10.276,3	13.316,8	100,0				
17	KALIMANTAN BARAT														
	A. Hutan	1.159,6	1.793,6	1.359,5	754,4	5.067,1	58,3	5.125,4	465,4	5.590,8	38,4				
	- Hutan Primer	974,1	942,4	293,9	28,4	2.238,8	1,3	2.240,1	5,1	2.245,2	15,4				
	- Hutan Sekunder	185,4	851,3	1.064,8	669,0	2.770,5	57,0	2.827,5	455,4	3.282,9	22,5				
	- Hutan Tanaman *	-	-	0,7	57,0	57,8	-	57,8	4,9	62,6	0,4				
	B. Non Hutan	270,5	517,3	772,9	1.372,9	2.933,7	139,6	3.073,3	5.908,7	8.982,0	61,6				
	Total	1.430,1	2.310,9	2.132,4	2.127,4	8.000,7	197,9	8.198,7	6.374,1	14.572,8	100,0				
18	KALIMANTAN SELATAN														
	A. Hutan	131,4	360,1	70,9	210,0	772,4	2,1	774,5	66,4	840,9	22,6				
	- Hutan Primer	18,1	40,5	1,7	0,4	60,6	0,0	60,6	2,3	62,9	1,7				
	- Hutan Sekunder	78,1	318,7	69,0	181,4	647,2	1,0	648,2	27,6	675,8	18,2				
	- Hutan Tanaman *	35,1	0,9	0,2	28,3	64,5	1,1	65,6	36,5	102,2	2,8				
	B. Non Hutan	81,9	166,4	55,7	552,2	856,2	149,3	1.005,5	1.867,5	2.873,0	77,4				
	Total	213,3	526,4	126,7	762,2	1.628,6	151,4	1.780,0	1.934,0	3.713,9	100,0				
19	KALIMANTAN TENGAH														
	A. Hutan	1.097,6	923,3	2.834,9	1.884,4	6.740,2	577,6	7.317,8	198,7	7.516,4	49,2				
	- Hutan Primer	343,4	437,6	352,9	26,0	1.159,8	3,0	1.162,9	0,4	1.163,3	7,6				
	- Hutan Sekunder	754,2	485,7	2.475,5	1.772,0	5.487,4	560,2	6.047,6	176,5	6.224,1	40,8				
	- Hutan Tanaman *	-	0,1	6,5	86,3	92,9	14,4	107,3	21,7	129,0	0,8				
	B. Non Hutan	510,7	422,7	482,6	1.997,4	3.413,5	1.965,9	5.379,4	2.370,3	7.749,7	50,8				
	Total	1.608,3	1.346,1	3.317,5	3.881,8	10.153,6	2.543,5	12.697,2	2.569,0	15.266,2	100,0				
20&21	KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA														
	A. Hutan	1.413,4	2.725,5	4.551,0	2.353,1	11.043,0	107,5	11.150,6	1.464,4	12.615,0	64,7				
	- Hutan Primer	1.202,9	2.158,9	2.212,4	363,3	5.937,5	5,2	5.942,7	263,9	6.206,6	31,8				
	- Hutan Sekunder	209,1	565,9	2.335,6	1.661,3	4.772,0	99,8	4.871,8	1.139,6	6.011,4	30,8				
	- Hutan Tanaman *	1,4	0,7	2,9	328,5	333,6	2,6	336,1	60,8	397,0	2,0				
	B. Non Hutan	291,2	122,7	494,2	1.670,4	2.578,5	104,0	2.682,5	4.207,3	6.889,8	35,3				
	Total	1.704,7	2.848,2	5.045,2	4.023,5	13.621,5	211,6	13.833,1	5.671,7	19.504,8	100,0				

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN												TOTAL	
		HUTAN TETAP						Jumlah	HPK	Jumlah	APL	Jumlah	%		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	7							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	KALIMANTAN														
	A. Hutan	3.801,9	5.802,5	8.816,2	5.202,0	23.622,7	745,5	24.368,2	2.194,9	26.563,1	50,1				
	- Hutan Primer	2.538,6	3.579,3	2.860,9	418,1	9.396,8	9,4	9.406,2	271,8	9.678,0	18,2				
	- Hutan Sekunder	1.226,9	2.221,6	5.945,0	4.283,7	13.677,1	718,0	14.395,1	1.799,2	16.194,3	30,5				
	- Hutan Tanaman *	36,5	1,7	10,3	500,2	548,7	18,1	566,9	123,9	690,8	1,3				
	B. Non Hutan	1.154,4	1.229,1	1.805,5	5.592,9	9.781,8	2.358,9	12.140,7	14.353,9	26.494,6	49,9				
	Total	4.956,3	7.031,6	10.621,7	10.794,8	33.404,5	3.104,5	36.508,9	16.548,8	53.057,7	100,0				
22	SULAWESI UTARA														
	A. Hutan	210,7	110,6	142,6	30,0	493,9	12,2	506,0	47,2	553,2	38,4				
	- Hutan Primer	128,9	63,2	35,3	10,4	237,8	0,0	237,8	7,4	245,2	17,0				
	- Hutan Sekunder	81,8	47,4	107,3	19,6	256,0	12,2	268,2	39,8	308,1	21,4				
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0				
	B. Non Hutan	34,5	51,2	66,3	34,4	186,4	2,5	188,9	697,4	886,3	61,6				
	Total	245,2	161,8	208,9	64,4	680,2	14,7	694,9	744,6	1.439,5	100,0				
23	GORONTALO														
	A. Hutan	186,5	180,1	194,6	63,9	625,0	33,3	658,3	52,0	710,3	59,3				
	- Hutan Primer	129,8	77,5	61,1	6,2	274,7	1,7	276,4	1,8	278,2	23,2				
	- Hutan Sekunder	56,6	102,5	131,6	56,0	346,8	31,3	378,1	49,6	427,7	35,7				
	- Hutan Tanaman *	-	-	1,9	1,6	3,5	0,3	3,8	0,6	4,4	0,4				
	B. Non Hutan	10,2	24,5	56,5	26,0	117,2	49,1	166,4	321,9	488,2	40,7				
	Total	196,7	204,6	251,1	89,9	742,2	82,4	824,7	373,8	1.198,5	100,0				
24	SULAWESI TENGAH														
	A. Hutan	560,2	1.161,3	1.171,5	291,9	3.184,8	159,8	3.344,7	480,5	3.825,1	63,4				
	- Hutan Primer	459,9	865,4	667,7	144,7	2.137,7	64,2	2.201,9	141,3	2.343,3	38,8				
	- Hutan Sekunder	100,3	295,9	503,7	147,1	1.047,0	95,6	1.142,6	338,5	1.481,1	24,5				
	- Hutan Tanaman *	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	0,7	0,8	0,0				
	B. Non Hutan	88,2	114,8	219,5	110,0	532,4	57,5	589,9	1.619,7	2.209,6	36,6				
	Total	648,4	1.276,1	1.391,0	401,8	3.717,2	217,3	3.934,6	2.100,1	6.034,7	100,0				
25	SULAWESI TENGGARA														
	A. Hutan	197,3	943,3	369,2	191,3	1.701,1	32,5	1.733,6	112,9	1.846,6	51,1				
	- Hutan Primer	11,6	788,2	277,9	81,9	1.159,5	13,4	1.172,9	16,0	1.188,9	32,9				

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN											TOTAL				
		HUTAN TETAP					KAWASAN HUTAN						APL	Jumlah	%		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah	HPK	Jumlah	HPK	Jumlah					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	185,7	155,1	91,3	108,0	540,1	19,0	559,1	96,6	655,7	18,2						
	- Hutan Sekunder					1,5	0,1	1,5	0,4	1,9	0,1						
	- Hutan Tanaman *					531,8	61,0	592,8	1.172,3	1.765,1	48,9						
	B. Non Hutan	85,6	138,2	97,7	210,3	2.326,4	93,6	2.326,4	1.285,2	3.611,6	100,0						
	Total	282,9	1.081,5	466,9	401,6	2.326,8	93,6	2.326,4	1.285,2	3.611,6	100,0						
26	SULAWESI BARAT																
	A. Hutan	202,8	305,7	230,9	43,0	782,4	4,6	787,0	28,6	815,6	48,5						
	- Hutan Primer	123,7	124,6	73,8	9,7	331,7	0,1	331,8	0,2	332,0	19,8						
	- Hutan Sekunder	79,1	181,1	157,1	33,3	450,7	4,5	455,2	28,4	483,6	28,8						
	- Hutan Tanaman *										0,0						
	B. Non Hutan	12,4	146,3	99,8	28,8	287,4	18,0	305,3	559,3	864,6	51,5						
	Total	215,2	452,0	330,7	71,9	1.069,8	22,6	1.092,4	587,9	1.680,2	100,0						
27	SULAWESI SELATAN																
	A. Hutan	182,4	815,1	286,6	39,1	1.323,3	11,2	1.334,5	75,3	1.409,8	31,3						
	- Hutan Primer	105,8	386,1	106,9	1,6	600,4	5,3	605,7	9,5	615,2	13,7						
	- Hutan Sekunder	76,0	427,5	173,7	35,9	713,1	5,9	719,0	63,2	782,2	17,4						
	- Hutan Tanaman *	0,6	1,5	6,0	1,7	9,8	-	9,8	2,7	12,4	0,3						
	B. Non Hutan	62,1	417,5	208,2	84,9	772,7	11,7	784,5	2.304,1	3.088,6	68,7						
	Total	244,5	1.232,7	494,8	124,0	2.096,0	23,0	2.119,0	2.379,4	4.498,4	100,0						
	SULAWESI																
	A. Hutan	1.539,8	3.516,2	2.395,4	659,1	8.110,5	253,7	8.364,2	796,5	9.160,7	49,6						
	- Hutan Primer	959,6	2.305,1	1.222,7	254,4	4.741,9	84,8	4.826,6	176,2	5.002,8	27,1						
	- Hutan Sekunder	579,5	1.209,6	1.164,7	399,9	3.353,7	168,6	3.522,3	616,1	4.138,4	22,4						
	- Hutan Tanaman *	0,6	1,5	8,0	4,8	14,9	0,4	15,3	4,3	19,5	0,1						
	B. Non Hutan	293,0	892,5	748,0	494,4	2.427,9	199,9	2.627,8	6.674,6	9.302,4	50,4						
	Total	1.832,8	4.408,7	3.143,4	1.153,5	10.538,4	453,6	10.992,0	7.471,1	18.463,1	100,0						
28	BALI																
	A. Hutan	12,3	69,8	0,4	0,2	82,7	0,0	82,7	12,0	94,6	16,7						
	- Hutan Primer	3,2	41,0	0,0	0,0	44,2	0,0	44,2	0,0	44,2	7,8						
	- Hutan Sekunder	8,9	28,5	0,4	0,0	37,8	0,0	37,8	11,9	49,7	8,8						
	- Hutan Tanaman *	0,2	0,3	0,0	0,1	0,7	-	0,7	0,0	0,7	0,1						
	B. Non Hutan	10,5	26,0	6,3	1,8	44,6	-	44,6	427,6	472,2	83,3						
	Total	22,9	95,8	6,7	1,9	127,3	-	127,3	439,6	566,9	100,0						

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN											TOTAL								
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	APL	Jumlah	%										
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
29	NUSA TENGGARA BARAT																				
	A. Hutan	70,9	362,6	203,0	73,5	710,0	0,0	710,0	73,2	783,2	39,6										
	- Hutan Primer	41,2	222,7	79,2	14,7	357,8	0,0	357,8	3,0	360,8	18,2										
	- Hutan Sekunder	29,7	139,2	123,4	58,3	350,7	0,0	350,7	69,1	419,8	21,2										
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,6	0,3	0,5	1,5	-	1,5	1,2	2,7	0,1										
	B. Non Hutan	97,0	67,9	83,7	77,2	325,8	-	325,8	871,1	1.196,9	60,4										
	Total	167,9	430,5	286,7	150,7	1.035,8	-	1.035,8	944,3	1.980,2	100,0										
30	NUSA TENGGARA TIMUR																				
	A. Hutan	162,6	422,3	113,5	186,7	885,1	13,5	898,5	1.058,6	1.957,2	41,4										
	- Hutan Primer	104,6	137,8	19,4	63,6	325,3	1,6	326,9	147,2	474,0	10,0										
	- Hutan Sekunder	57,2	284,2	94,1	122,4	557,8	11,9	569,7	909,8	1.479,5	31,3										
	- Hutan Tanaman *	0,9	0,3	0,0	0,8	1,9	-	1,9	1,6	3,6	0,1										
	B. Non Hutan	102,3	262,3	56,2	101,5	522,4	65,0	587,4	2.178,0	2.765,4	58,6										
	Total	264,9	684,6	169,7	288,2	1.407,4	78,5	1.485,9	3.236,6	4.722,5	100,0										
	BALI NUSA TENGGARA																				
	A. Hutan	245,9	854,7	316,8	260,4	1.677,7	13,5	1.691,2	1.143,8	2.835,0	39,0										
	- Hutan Primer	148,9	401,6	98,5	78,2	727,3	1,6	728,9	150,2	879,1	12,1										
	- Hutan Sekunder	95,8	451,8	217,9	180,7	946,3	11,9	958,2	990,9	1.949,0	26,8										
	- Hutan Tanaman *	1,1	1,2	0,4	1,4	4,1	-	4,1	2,8	6,9	0,1										
	B. Non Hutan	209,8	356,2	146,3	180,5	892,8	65,0	957,8	3.476,7	4.434,6	61,0										
	Total	455,7	1.210,8	463,1	440,9	2.570,5	78,5	2.649,0	4.620,5	7.269,6	100,0										
31	MALUKU UTARA																				
	A. Hutan	203,8	494,4	549,9	362,2	1.610,3	291,9	1.902,3	107,1	2.009,3	64,2										
	- Hutan Primer	62,8	147,6	100,6	15,5	326,6	15,0	341,6	15,8	357,4	11,4										
	- Hutan Sekunder	141,0	346,6	445,1	316,3	1.249,0	275,3	1.524,2	91,2	1.615,4	51,6										
	- Hutan Tanaman *	-	0,2	4,2	30,4	34,8	1,7	36,5	0,0	36,5	1,2										
	B. Non Hutan	14,7	89,6	116,9	119,6	340,8	272,1	612,9	508,4	1.121,3	35,8										
	Total	218,5	584,1	666,9	481,7	1.951,1	564,1	2.515,2	615,4	3.130,6	100,0										
32	MALUKU																				
	A. Hutan	371,8	509,3	754,8	420,1	2.066,0	802,1	2.868,1	149,7	3.007,8	65,1										
	- Hutan Primer	73,7	40,0	29,5	70,1	213,3	159,1	372,4	13,0	385,4	8,3										

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN												TOTAL	
		HUTAN TETAP						Jumlah	HPK	Jumlah	APL		Jumlah	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	10				12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	- Hutan Sekunder	298,1	469,3	725,3	349,9	1.842,7	642,9	2.485,7	136,7	2.622,4	56,7				
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0				
	B. Non Hutan	48,5	117,9	139,5	223,6	529,5	522,8	1.052,3	562,0	1.614,3	34,9				
	Total	420,3	627,3	894,3	643,7	2.585,5	1.324,9	3.910,4	711,7	4.622,1	100,0				
	MALUKU														
	A. Hutan	575,7	1.003,8	1.304,7	782,2	3.666,3	1.094,0	4.760,4	256,8	5.017,1	64,7				
	- Hutan Primer	136,5	187,6	130,1	85,6	539,9	174,1	714,0	28,8	742,8	9,6				
	- Hutan Sekunder	439,1	815,9	1.170,5	666,2	3.091,7	918,2	4.009,9	227,9	4.237,8	54,7				
	- Hutan Tanaman *	-	0,2	4,2	30,4	34,8	1,7	36,5	0,0	36,5	0,5				
	B. Non Hutan	63,2	207,5	256,4	343,2	870,3	794,9	1.665,3	1.070,4	2.735,6	35,3				
	Total	638,8	1.211,3	1.561,1	1.125,4	4.536,7	1.888,9	6.425,6	1.327,1	7.752,8	100,0				
33	PAPUA														
	A. Hutan	5.212,7	6.991,1	5.221,6	3.934,7	21.360,1	2.638,2	23.998,3	995,3	24.993,6	80,4				
	- Hutan Primer	4.532,9	6.195,9	4.168,6	2.487,7	17.385,1	1.509,0	18.894,1	551,4	19.445,5	62,6				
	- Hutan Sekunder	679,8	795,2	1.053,0	1.446,5	3.974,4	1.128,2	5.102,7	443,8	5.546,5	17,8				
	- Hutan Tanaman *	-	0,1	0,0	0,5	0,6	1,0	1,5	0,1	1,6	0,0				
	B. Non Hutan	1.523,6	824,2	739,6	804,6	3.892,0	1.478,2	5.370,2	713,1	6.083,3	19,6				
	Total	6.736,3	7.815,3	5.961,2	4.739,3	25.252,1	4.116,4	29.368,5	1.708,4	31.076,9	100,0				
34	PAPUA BARAT														
	A. Hutan	1.635,6	1.465,2	1.703,7	2.064,5	6.869,0	1.336,3	8.205,4	545,7	8.751,1	90,9				
	- Hutan Primer	1.513,1	1.187,2	1.203,8	1.005,6	4.909,7	672,6	5.582,3	176,4	5.758,6	59,8				
	- Hutan Sekunder	122,5	278,1	499,9	1.058,9	1.959,4	663,7	2.623,1	369,4	2.992,5	31,1				
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0				
	B. Non Hutan	76,3	166,4	74,8	123,6	441,1	138,3	579,4	294,4	873,7	9,1				
	Total	1.711,9	1.631,6	1.778,5	2.188,2	7.310,1	1.474,7	8.784,8	840,1	9.624,9	100,0				
	PAPUA														
	A. Hutan	6.848,4	8.456,3	6.925,3	5.999,2	28.229,1	3.974,5	32.203,7	1.541,1	33.744,8	82,9				
	- Hutan Primer	6.046,0	7.383,0	5.372,4	3.493,4	22.294,8	2.181,6	24.476,4	727,8	25.204,1	61,9				
	- Hutan Sekunder	802,4	1.073,2	1.552,8	2.505,3	5.933,8	1.792,0	7.725,8	813,2	8.539,0	21,0				
	- Hutan Tanaman *	-	0,1	0,0	0,5	0,6	1,0	1,5	0,1	1,6	0,0				
	B. Non Hutan	1.599,8	990,5	814,5	928,3	4.333,1	1.616,5	5.949,6	1.007,4	6.957,0	17,1				
	Total	8.448,2	9.446,9	7.739,7	6.927,5	32.562,3	5.591,0	38.153,3	2.548,5	40.701,8	100,0				

NO.	PENUTUPAN LAHAN		KAWASAN HUTAN										TOTAL	
	2	3	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	APL	Jumlah	%		
			HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
INDONESIA														
A. Hutan	17.315,7	23.871,3	21.220,8	16.943,1	79.350,8	6.271,2	85.622,0	7.904,1	93.526,2	49,8				
- Hutan Primer	12.466,5	15.829,8	9.877,1	4.586,2	42.759,5	2.460,9	45.220,5	1.443,1	46.663,6	24,9				
- Hutan Sekunder	4.726,9	7.753,5	11.060,7	9.692,7	33.233,7	3.781,9	37.015,6	5.237,9	42.253,5	22,5				
- Hutan Tanaman *	122,4	288,1	283,0	2.664,1	3.357,5	28,4	3.386,0	1.223,1	4.609,1	2,5				
B. Non Hutan	4.571,5	5.789,7	5.567,1	12.259,0	28.187,3	6.576,3	34.763,6	59.462,1	94.225,7	50,2				
Total	21.887,2	29.661,0	26.787,9	29.202,0	107.538,1	12.847,5	120.385,7	67.366,2	187.751,9	100,0				

Ket : Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

* : Hutan tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah kelas penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan tanaman baik Hutan Tanaman Industri (LUPHHK-HT) maupun Hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.

Luas penutupan lahan ini berdasarkan data digital hasil penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2018

Sumber : - Hasil Penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2018, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

- Data digital kawasan hutan Produk Kebijakan Satu Peta per 27 November 2018, Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL								
		HUTAN TETAP					Jumlah	HPK	Jumlah	APL	TOTAL										
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
4	SUMATERA BARAT																				
	A. Hutan Primer	0,6	87,6	132,2	0,5	221,0	33,7	254,7	5,7	260,4											
	- Hutan lahan kering primer	0,6	87,6	132,2	-	220,5	33,7	254,2	5,2	259,3											
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	1,1											
	B. Hutan Sekunder	396,4	1.282,1	996,4	221,8	2.896,6	672,8	3.569,4	1.684,2	5.253,6											
	- Hutan lahan kering sekunder	396,4	1.282,1	996,4	183,9	2.858,7	672,8	3.531,5	1.684,2	5.215,8											
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	37,8	37,8	0,0	37,8	0,0	37,8											
	- Hutan mangrove sekunder	-	0,0	-	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0											
	C. Hutan Tanaman*	-	0,0	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0											
	TOTAL	397,0	1.369,7	1128,6	222,3	3.117,6	706,5	3.824,1	1.689,9	5.514,0											
5	JAMBI																				
	A. Hutan Primer	3.327,9	59,1	155,1	135,1	3.677,1	-	3.677,1	302,8	3.979,9											
	- Hutan lahan kering primer	1.482,5	59,1	155,1	135,1	1.831,7	-	1.831,7	286,2	2.117,9											
	- Hutan rawa primer	1.844,0	-	0,0	-	1.844,0	-	1.844,0	4,0	1.848,0											
	- Hutan mangrove primer	1,4	-	-	-	1,4	-	1,4	12,6	14,0											
	B. Hutan Sekunder	715,1	108,1	3.634,5	3.592,0	8.049,7	-	8.049,7	2.989,2	11.038,9											
	- Hutan lahan kering sekunder	701,8	108,1	3.634,5	3.591,5	8.036,0	-	8.036,0	1.669,4	9.705,3											
	- Hutan rawa sekunder	-	-	0,0	0,5	0,5	-	0,5	1.229,9	1.230,4											
	- Hutan mangrove sekunder	13,2	-	-	-	13,2	-	13,2	89,9	103,1											
	C. Hutan Tanaman*	19,6	-23,4	-275,3	-5.399,8	-5.678,9	-53,5	-5.732,4	-50,9	-5.783,3											
	TOTAL	4.062,6	143,8	3514,3	-1.672,7	6.047,9	-53,5	5.994,4	3.241,2	9.235,6											
6	SUMATERA SELATAN																				
	A. Hutan Primer	6,5	84,1	-	-	90,6	-	90,6	1,0	91,6											
	- Hutan lahan kering primer	6,5	84,1	-	-	90,6	-	90,6	-	90,6											
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	B. Hutan Sekunder	780,9	661,5	37,3	0,0	1.479,8	-	1.479,8	70,8	1.550,6											
	- Hutan lahan kering sekunder	780,3	643,2	37,3	0,0	1.460,8	-	1.460,8	70,8	1.531,6											
	- Hutan rawa sekunder	-	13,9	-	0,0	13,9	-	13,9	0,0	13,9											
	- Hutan mangrove sekunder	0,6	4,4	-	-	5,1	-	5,1	-	5,1											
	C. Hutan Tanaman*	-	8,1	11,6	2.029,3	2.049,0	-	2.049,0	49,8	2.098,8											
	TOTAL	787,4	753,7	49,0	2.029,3	3.619,4	-	3.619,4	121,6	3.741,0											
7	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																				
	A. Hutan Primer	-	56,1	-	22,8	78,9	-	78,9	73,0	151,9											

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN											APL	TOTAL
		HUTAN TETAP						Jumlah						
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	8	9	10	11			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	- Hutan mangrove primer	-	85,1	76,6	56,2	217,9	22,6	240,5	145,6	386,1				
	B. Hutan Sekunder	-	161,7	-736,3	846,8	272,2	-10,4	261,9	-807,0	-545,1				
	- Hutan lahan kering sekunder	-	127,7	-1.118,9	217,4	-773,8	-21,3	-795,1	-1.751,9	-2.547,0				
	- Hutan rawa sekunder	-	-	62,5	-21,6	40,9	-101,2	-60,2	253,1	192,9				
	- Hutan mangrove sekunder	0,0	34,1	320,0	651,0	1005,1	112,1	1117,2	691,8	1809,0				
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0				
	TOTAL	-	246,9	-658,2	903,0	491,7	12,3	503,9	-646,4	-142,5				
	PULAU SUMATERA													
	A. Hutan Primer	4.808,5	1.823,1	888,3	255,9	7.775,8	104,5	7.880,3	725,2	8.605,5				
	- Hutan lahan kering primer	2.963,1	1.681,9	810,2	174,9	5.630,1	33,7	5.663,8	488,4	6.152,3				
	- Hutan rawa primer	1.844,0	-	1,5	1,4	1.846,9	48,1	1.895,0	4,0	1.899,1				
	- Hutan mangrove primer	1,4	141,2	76,6	79,5	298,8	22,6	321,4	232,8	554,2				
	B. Hutan Sekunder	5.194,7	10.208,8	13.415,9	12.228,0	41.047,5	2.840,9	43.888,4	15.933,2	59.821,6				
	- Hutan lahan kering sekunder	4.973,0	9.935,5	9.882,2	8.917,4	33.708,2	1.186,5	34.894,6	8.082,9	42.977,5				
	- Hutan rawa sekunder	205,8	55,9	3.156,5	2.360,8	5.778,9	1.326,7	7.105,5	6.500,1	13.605,6				
	- Hutan mangrove sekunder	15,9	217,5	377,2	949,8	1.560,5	327,8	1.888,2	1.350,2	3.238,5				
	C. Hutan Tanaman*	67,3	-693,6	350,0	5.191,9	4.915,6	129,7	5.045,2	16.222,6	21.267,8				
	TOTAL	10.070,4	11.338,4	14.654,3	17.675,8	53.738,9	3.075,0	56.813,9	32.881,0	89.694,9				
11	BANTEN													
	A. Hutan Primer	0,3	-	-	4,6	4,9	-	4,9	3,2	8,1				
	- Hutan lahan kering primer	0,3	-	-	4,6	4,9	-	4,9	3,2	8,1				
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	B. Hutan Sekunder	-447,4	-7,4	10,3	-101,9	-546,4	0,0	-546,4	35,6	-510,8				
	- Hutan lahan kering sekunder	-449,6	-7,4	10,3	-101,9	-548,5	0,0	-548,5	-76,3	-624,7				
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Hutan mangrove sekunder	2,1	-	-	-	2,1	-	2,1	111,8	113,9				
	C. Hutan Tanaman*	-2,2	0,6	19,1	0,3	17,9	-	17,9	201,8	219,6				
	TOTAL	-449,3	-6,7	29,4	-97,0	-523,6	0,0	-523,6	240,6	-283,1				
12	DKI JAKARTA													
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	B. Hutan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah					
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	JAWA BARAT												
	A. Hutan Primer	-	0,0	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	10,8	10,8	
	- Hutan lahan kering primer	-	0,0	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	10,8	10,8	
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B. Hutan Sekunder	-16,7	222,3	-0,7	-35,4	169,4	-	169,4	1.034,8	1.204,3			
	- Hutan lahan kering sekunder	-16,7	222,3	-0,7	-35,4	169,4	-	169,4	272,2	441,7			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762,6	762,6	
	C. Hutan Tanaman*	1.272,0	125,6	422,5	609,4	2.429,5	-	2.429,5	2.744,0	5.173,5			
	TOTAL	1.255,3	347,9	421,7	574,0	2.598,9	-	2.598,9	3.789,6	6.388,5			
14	JAWA TENGAH												
	A. Hutan Primer	-	7,8	-	-	7,8	-	7,8	-	7,8	7,8	7,8	
	- Hutan lahan kering primer	-	7,8	-	-	7,8	-	7,8	-	7,8	7,8	7,8	
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B. Hutan Sekunder	63,2	291,3	-73,7	3,4	284,2	-	284,2	808,9	1.093,1			
	- Hutan lahan kering sekunder	63,2	291,3	-73,7	1,7	282,5	-	282,5	642,4	924,9			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	1,7	1,7	-	1,7	166,5	168,2			
	C. Hutan Tanaman*	24,2	569,9	-5,0	1.123,6	1.712,7	-	1.712,7	301,9	2.014,6			
	TOTAL	87,4	869,0	-78,7	1.127,0	2.004,7	-	2.004,7	1.110,8	3.115,6			
15	D.I. YOGYAKARTA												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B. Hutan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	APL	TOTAL			
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		- Hutan rawa sekunder	2,3	68,5	725,1	1.269,8	2.065,8	444,8	2.510,5	23.764,6	26.275,1		
		- Hutan mangrove sekunder	-0,7	51,6	0,0	-0,7	50,1	-	50,1	112,1	162,3		
		C. Hutan Tanaman*	-	-	16,6	-9,5	7,1	-	7,1	4,4	11,5		
		TOTAL	208,6	1.382,5	6287,6	4.801,8	12.660,5	497,3	13.157,7	29.133,7	42.291,4		
18	KALIMANTAN SELATAN												
		A. Hutan Primer	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0		
		- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Hutan mangrove primer	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0		
		B. Hutan Sekunder	714,6	-755,2	39,0	4.652,1	4.650,6	-	4.650,6	8.145,1	12.795,7		
		- Hutan lahan kering sekunder	104,7	-755,2	39,0	4.360,4	3.748,9	-	3.748,9	5.884,5	9.633,4		
		- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Hutan mangrove sekunder	610,0	-	-	291,7	901,7	-	901,7	2.260,6	3.162,3		
		C. Hutan Tanaman*	258,9	0,0	0,0	452,4	711,2	34,2	745,4	827,5	1.572,9		
		TOTAL	973,5	-755,2	39,0	5.104,4	5.361,8	34,2	5.396,0	8.972,6	14.368,6		
19	KALIMANTAN TENGAH												
		A. Hutan Primer	0,0	0,0	90,3	-	90,3	-	90,3	24,6	114,9		
		- Hutan lahan kering primer	0,0	0,0	90,3	-	90,3	-	90,3	24,6	114,9		
		- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		B. Hutan Sekunder	1.063,4	1.515,1	1.298,1	6.952,7	10.829,2	7.447,7	18.276,9	6.160,5	24.437,5		
		- Hutan lahan kering sekunder	0,0	4,2	1.029,5	2.841,3	3.875,0	2.386,2	6.261,2	2.205,2	8.466,3		
		- Hutan rawa sekunder	1.063,4	1.249,5	268,6	4.111,8	6.693,3	5.061,4	11.754,7	3.845,6	15.600,3		
		- Hutan mangrove sekunder	-	261,5	-	-0,5	260,9	0,1	261,1	109,8	370,9		
		C. Hutan Tanaman*	-	-79,1	-16,2	1.597,6	1.502,3	365,1	1.867,5	820,5	2.687,9		
		TOTAL	1.063,4	1.436,0	1372,2	8.550,3	12.421,8	7.812,8	20.234,7	7.005,6	27.240,3		
20	KALIMANTAN TIMUR												
		A. Hutan Primer	0,0	25,3	69,4	100,5	195,2	46,5	241,7	152,1	393,8		
		- Hutan lahan kering primer	-	25,3	69,4	0,0	94,7	46,5	141,2	90,5	231,7		
		- Hutan rawa primer	-	-	-	52,2	52,2	-	52,2	0,2	52,4		
		- Hutan mangrove primer	0,0	-	-	48,3	48,3	-	48,3	61,4	109,7		
		B. Hutan Sekunder	2.518,2	182,9	1.582,4	5.856,1	10.141,6	895,5	11.037,1	19.104,1	30.141,2		
		- Hutan lahan kering sekunder	-636,9	182,9	1.582,4	2.945,8	4.074,3	895,5	4.969,8	13.877,3	18.847,1		

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN											APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	HUTAN TETAP						
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah			3	4	5	6			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	- Hutan rawa sekunder	156,8	-	-	0,0	156,8	-	-	156,8	-	-	4.304,8	4.461,6		
	- Hutan mangrove sekunder	2998,3	0,0	-	2.912,3	5910,5	0,0	-	5910,5	0,0	-	922,0	6832,5		
	C. Hutan Tanaman*	0,0	5,7	0,0	6.420,1	6.425,9	56,8	-	6.484,7	7.690,3	-	7.690,3	14.174,9		
	TOTAL	2.518,1	213,9	1651,8	12.376,7	16.762,6	1.000,8	-	17.763,4	26.946,5	-	26.946,5	44.709,9		
21	KALIMANTAN UTARA														
	A. Hutan Primer	94,1	28,2	580,6	12,2	715,1	-	-	715,1	689,0	-	689,0	1.404,1		
	- Hutan lahan kering primer	94,1	28,2	580,6	12,2	715,1	-	-	715,1	608,4	-	608,4	1.323,4		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	-	19,6	19,6		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0	61,0	-	61,0	61,0		
	B. Hutan Sekunder	23,0	632,0	1.997,8	2.949,6	5.602,4	259,1	-	5.861,4	10.728,6	-	10.728,6	16.590,0		
	- Hutan lahan kering sekunder	23,0	621,7	1.997,8	1.861,0	4.503,4	239,0	-	4.742,5	4.840,4	-	4.840,4	9.582,9		
	- Hutan rawa sekunder	-	11,3	-	380,2	391,5	20,0	-	411,5	5.032,8	-	5.032,8	5.444,4		
	- Hutan mangrove sekunder	0,0	-1,0	-	708,4	707,4	-	-	707,4	855,3	-	855,3	1.562,7		
	C. Hutan Tanaman*	-	0,0	0,0	2.462,5	2.462,5	5,6	-	2.468,1	22,1	-	22,1	2.490,2		
	TOTAL	117,1	660,2	2578,4	5.424,2	8.779,9	264,7	-	9.044,6	11.439,7	-	11.439,7	20.484,3		
	PULAU KALIMANTAN														
	A. Hutan Primer	213,9	438,9	956,4	229,9	1.839,2	46,5	-	1.885,6	1.014,9	-	1.014,9	2.900,5		
	- Hutan lahan kering primer	213,9	438,9	956,4	129,4	1.738,7	46,5	-	1.785,1	804,5	-	804,5	2.589,7		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	52,2	52,2	-	-	52,2	87,9	-	87,9	140,1		
	- Hutan mangrove primer	0,0	-	-	48,3	48,3	-	-	48,3	122,4	-	122,4	170,7		
	B. Hutan Sekunder	4.408,0	2.571,9	10.952,2	25.106,4	43.038,5	9.099,5	-	52.138,0	73.118,7	-	73.118,7	125.256,7		
	- Hutan lahan kering sekunder	-422,0	930,6	9.958,5	15.433,3	25.900,4	3.573,2	-	29.473,6	31.911,0	-	31.911,0	61.384,7		
	- Hutan rawa sekunder	1.222,5	1.329,3	993,7	5.761,9	9.307,4	5.526,1	-	14.833,6	36.947,8	-	36.947,8	51.781,4		
	- Hutan mangrove sekunder	3.607,5	312,0	0,0	3.911,2	7.830,7	0,1	-	7.830,8	4.259,8	-	4.259,8	12.090,6		
	C. Hutan Tanaman*	258,9	-73,3	0,4	10.923,1	11.109,0	463,8	-	11.572,8	9.364,7	-	9.364,7	20.937,4		
	TOTAL	4.880,7	2.937,5	11.909,0	36.259,4	55.986,6	9.609,8	-	65.596,4	83.498,2	-	83.498,2	149.094,6		
22	SULAWESI UTARA														
	A. Hutan Primer	129,1	81,5	159,2	61,4	431,1	-	-	431,1	127,2	-	127,2	558,3		
	- Hutan lahan kering primer	128,1	60,5	159,2	61,4	409,2	-	-	409,2	102,5	-	102,5	511,7		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	1,0	20,9	-	-	21,9	-	-	21,9	24,7	-	24,7	46,6		

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	HUTAN TETAP						
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah			7	8	9			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	B. Hutan Sekunder	380,3	261,3	1.526,4	521,3	2.689,3	14,6	2.703,9	640,4	3.344,3					
	- Hutan lahan kering sekunder	380,3	260,8	1.526,4	521,3	2.688,7	14,6	2.703,3	610,3	3.313,6					
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	- Hutan mangrove sekunder	0,0	0,6	-	-	0,6	-	0,6	30,2	30,7					
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	TOTAL	509,4	342,8	1685,6	582,6	3.120,4	14,6	3.135,0	767,6	3.902,6					
22	GORONTALO														
	A. Hutan Primer	38,3	42,5	6,0	-	86,8	-	86,8	61,0	147,8					
	- Hutan lahan kering primer	38,3	6,6	6,0	-	50,8	-	50,8	10,2	61,0					
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	- Hutan mangrove primer	-	35,9	-	-	35,9	-	35,9	50,8	86,8					
	B. Hutan Sekunder	-531,2	966,5	1.178,6	742,9	2.356,8	65,0	2.421,9	1.083,6	3.505,5					
	- Hutan lahan kering sekunder	-558,5	431,9	1.178,6	742,9	1.794,9	65,0	1.859,9	433,2	2.293,1					
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	- Hutan mangrove sekunder	27,3	534,7	-	-	562,0	-	562,0	650,4	1.212,4					
	C. Hutan Tanaman*	-	0,0	-1.831,9	-1.434,5	-3.266,5	-79,2	-3.345,6	-647,2	-3.992,9					
	TOTAL	-493,0	1.009,1	-647,4	-691,7	-822,9	-14,1	-837,0	497,4	-339,6					
24	SULAWESI TENGAH														
	A. Hutan Primer	666,7	1.039,8	338,1	298,5	2.343,1	91,2	2.434,3	2.164,1	4.598,5					
	- Hutan lahan kering primer	666,7	1.039,8	338,1	298,5	2.343,1	91,2	2.434,3	1.377,9	3.812,2					
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	786,3	786,3					
	B. Hutan Sekunder	1.727,6	1.843,4	2.698,7	1.843,4	8.113,2	975,2	9.088,4	8.260,5	17.348,8					
	- Hutan lahan kering sekunder	1.727,6	1.817,0	2.673,7	1.843,4	8.061,7	975,2	9.036,9	6.698,2	15.735,1					
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	18,6	18,6					
	- Hutan mangrove sekunder	0,0	26,4	25,0	-	51,4	-	51,4	1543,7	1595,1					
	C. Hutan Tanaman*	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	TOTAL	2.394,2	2.883,3	3036,8	2.142,0	10.456,3	1.066,4	11.522,7	10.424,6	21.947,3					
25	SULAWESI TENGGARA														
	A. Hutan Primer	65,0	395,5	391,0	172,4	1.024,0	42,3	1.066,3	386,3	1.452,6					
	- Hutan lahan kering primer	65,0	380,1	391,0	137,5	973,7	42,3	1.016,0	248,9	1.264,9					
	- Hutan rawa primer	-	-	-	34,8	34,8	-	34,8	-	34,8					
	- Hutan mangrove primer	-	15,4	-	-	15,4	-	15,4	137,4	152,8					
	B. Hutan Sekunder	773,7	8.002,4	3.314,3	5.718,7	17.809,1	1.506,8	19.315,9	10.065,5	29.381,4					
	- Hutan lahan kering sekunder	773,7	3.310,0	3.312,7	5.314,2	12.710,6	1.350,1	14.060,7	6.240,6	20.301,3					

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					Jumlah						
		HK 3	HL 4	HPT 5	HP 6	Jumlah 7	HPK 8	Jumlah 9	APL 10	TOTAL 11			
1		- Hutan rawa sekunder	-	1.481,4	-	391,6	1.873,0	-	1.873,0	286,3	2.159,2		
		- Hutan mangrove sekunder	0,0	3.211,1	1,6	12,9	3.225,5	156,7	3.382,2	3538,6	6920,9		
		C. Hutan Tanaman*	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0		
		TOTAL	838,8	8.397,9	3705,3	5.891,0	18.833,0	1.549,1	20.382,1	10.451,8	30.834,0		
26		SULAWESI BARAT											
		A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		B. Hutan Sekunder	33,2	170,2	321,6	39,5	564,4	2,0	566,4	361,4	927,8		
		- Hutan lahan kering sekunder	33,2	152,3	267,5	39,5	492,5	0,0	492,5	343,7	836,1		
		- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Hutan mangrove sekunder	0,0	17,9	54,1	-	72,0	2,0	73,9	17,7	91,6		
		C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		TOTAL	33,2	170,2	321,6	39,5	564,4	2,0	566,4	361,4	927,8		
27		SULAWESI SELATAN											
		A. Hutan Primer	-	332,0	22,2	-	354,2	-	354,2	161,4	515,6		
		- Hutan lahan kering primer	-	332,0	22,2	-	354,2	-	354,2	139,1	493,3		
		- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	22,3	22,3		
		B. Hutan Sekunder	187,6	1.526,6	587,9	-113,7	2.188,4	-	2.188,4	904,9	3.093,3		
		- Hutan lahan kering sekunder	187,6	1.259,4	440,7	-113,7	1.774,0	-	1.774,0	642,2	2.416,2		
		- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Hutan mangrove sekunder	0,0	267,1	147,2	-	414,4	-	414,4	262,7	677,1		
		C. Hutan Tanaman*	-	0,0	0,0	-14,3	-14,3	0,0	-14,3	3,6	-10,6		
		TOTAL	187,6	1.858,5	610,1	-128,0	2.528,3	-	2.528,3	1.070,0	3.598,2		
		PULAU SULAWESI											
		A. Hutan Primer	899,1	1.891,3	916,5	532,3	4.239,2	133,5	4.372,7	2.900,0	7.272,7		
		- Hutan lahan kering primer	898,1	1.819,1	916,5	497,4	4.131,1	133,5	4.264,6	1.878,5	6.143,1		
		- Hutan rawa primer	-	-	-	34,8	34,8	-	34,8	-	34,8		
		- Hutan mangrove primer	1,0	72,2	-	-	73,2	-	73,2	1.021,6	1.094,8		
		B. Hutan Sekunder	2.571,1	12.770,5	9.627,4	8.752,0	33.721,1	2.563,7	36.284,8	21.316,3	57.601,1		
		- Hutan lahan kering sekunder	2.543,9	7.231,4	9.399,5	8.347,5	27.522,3	2.405,0	29.927,3	14.968,1	44.895,4		

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN											APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	HUTAN TETAP						
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah			HPK	Jumlah	HPK	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		- Hutan rawa sekunder	-	1.481,4	-	391,6	1.873,0	-	1.873,0	304,9	2.177,8				
		- Hutan mangrove sekunder	27,3	4.057,7	227,9	12,9	4.325,8	158,7	4.484,5	6.043,4	10.527,8				
		C. Hutan Tanaman*	-	-	-1.831,9	-1.448,8	-3.280,8	-79,2	-3.359,9	-643,6	-4.003,5				
		TOTAL	3.470,2	14.661,8	8.712,0	7.835,4	34.679,5	2.618,0	37.297,5	23.572,8	60.870,3				
28	BALI														
		A. Hutan Primer	4,3	27,5	-	-	31,8	-	31,8	7,6	39,4				
		- Hutan lahan kering primer	3,3	26,1	-	-	29,4	-	29,4	5,6	35,0				
		- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		- Hutan mangrove primer	1,0	1,5	-	-	2,4	-	2,4	1,9	4,4				
		B. Hutan Sekunder	33,7	27,2	2,3	-	63,2	-	63,2	167,5	230,7				
		- Hutan lahan kering sekunder	8,7	27,2	2,3	-	38,2	-	38,2	138,2	176,4				
		- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		- Hutan mangrove sekunder	25,0	-	0,0	-	25,0	-	25,0	29,3	54,3				
		C. Hutan Tanaman*	2,5	0,4	0,9	0,8	4,5	-	4,5	2,3	6,9				
		TOTAL	40,4	55,1	3,2	0,8	99,5	-	99,5	177,4	276,9				
29	NUSA TENGGARA BARAT														
		A. Hutan Primer	675,4	428,0	188,2	359,3	1.651,0	-	1.651,0	270,8	1.921,8				
		- Hutan lahan kering primer	671,8	422,9	153,7	359,2	1.607,6	-	1.607,6	73,4	1.681,0				
		- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		- Hutan mangrove primer	3,6	5,2	34,5	0,1	43,4	-	43,4	197,4	240,8				
		B. Hutan Sekunder	785,8	1.797,2	890,3	1.692,9	5.166,2	-	5.166,2	2.816,0	7.982,2				
		- Hutan lahan kering sekunder	778,0	1.783,9	884,0	1.683,4	5.129,2	-	5.129,2	1.570,0	6.699,2				
		- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		- Hutan mangrove sekunder	7,8	13,3	6,3	9,5	36,9	-	36,9	1246,0	1282,9				
		C. Hutan Tanaman*	2,6	245,0	1,0	0,0	248,5	-	248,5	83,9	332,4				
		TOTAL	1.463,8	2.470,2	1079,5	2.052,2	7.065,6	-	7.065,6	3.170,7	10.236,4				
30	NUSA TENGGARA TIMUR														
		A. Hutan Primer	973,5	1.877,6	321,2	816,7	3.989,0	12,5	4.001,5	8.736,7	12.738,1				
		- Hutan lahan kering primer	737,7	1.864,4	320,5	786,2	3.708,7	12,5	3.721,2	7.316,1	11.037,3				
		- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		- Hutan mangrove primer	235,8	13,3	0,7	30,5	280,3	-	280,3	1.420,5	1.700,8				
		B. Hutan Sekunder	838,9	787,7	64,7	244,2	1.935,4	87,7	2.023,1	2.614,0	4.637,2				
		- Hutan lahan kering sekunder	121,7	625,4	64,7	191,8	1.093,6	87,7	1.091,3	866,2	1.957,5				

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					Jumlah						
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah	HPK	Jumlah	HPK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	- Hutan rawa sekunder	95,9	57,1	-	-	153,0	-	-	243,7	396,7			
	- Hutan mangrove sekunder	621,3	105,1	-	52,3	778,8	-	-	1504,1	2282,9			
	C. Hutan Tanaman*	-	-0,2	0,0	12,7	12,5	0,0	-	302,2	314,7			
	TOTAL	1.812,4	2.685,1	385,9	1.073,5	5.936,9	100,2	6.037,1	11.652,9	17.689,9			
	KEP. BALI DAN NUSA TENGGARA												
	A. Hutan Primer	1.653,1	2.333,2	509,4	1.176,0	5.671,7	12,5	5.684,2	9.015,0	14.699,2			
	- Hutan lahan kering primer	1.412,7	2.313,3	474,2	1.145,4	5.345,6	12,5	5.358,1	7.395,2	12.753,3			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	240,4	19,9	35,2	30,6	326,1	-	326,1	1.619,8	1.945,9			
	B. Hutan Sekunder	1.658,4	2.612,0	957,3	1.937,1	7.164,8	87,7	7.252,5	5.597,6	12.850,0			
	- Hutan lahan kering sekunder	908,4	2.436,5	950,9	1.875,2	6.171,0	87,7	6.258,7	2.574,4	8.833,2			
	- Hutan rawa sekunder	95,9	57,1	-	-	153,0	-	153,0	243,7	396,7			
	- Hutan mangrove sekunder	654,1	118,4	6,4	61,9	840,7	-	840,7	2.779,4	3.620,2			
	C. Hutan Tanaman*	5,1	245,2	1,9	13,4	265,6	-	265,6	388,4	654,0			
	TOTAL	3.316,6	5.190,4	1.468,5	3.126,5	13.102,0	100,2	13.202,2	15.001,0	28.203,2			
31	MALUKU UTARA												
	A. Hutan Primer	-	10,9	24,5	69,9	105,4	1,8	107,1	25,8	132,9			
	- Hutan lahan kering primer	-	0,0	24,5	68,8	93,3	-	93,3	0,0	93,3			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	10,9	0,0	1,1	12,0	1,8	13,8	25,8	39,6			
	B. Hutan Sekunder	-	355,6	1.049,9	1.633,9	3.039,4	5.680,6	8.720,0	2.824,4	11.544,4			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	352,8	1.049,4	1.633,8	3.035,9	5.644,5	8.680,4	2.731,9	11.412,3			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	0,0	0,0	34,4	34,4	0,3	34,7			
	- Hutan mangrove sekunder	0,0	2,9	0,5	0,1	3,5	1,7	5,3	92,3	97,5			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	0,0	75,9	75,9	-	75,9	67,0	142,9			
	TOTAL	-	366,5	1074,4	1.779,7	3.220,7	5.662,3	8.903,0	2.917,2	11.820,2			
32	MALUKU												
	A. Hutan Primer	0,0	0,0	-	0,0	0,0	2,1	2,1	4,9	7,0			
	- Hutan lahan kering primer	0,0	-	-	0,0	0,0	1,9	1,9	4,1	6,0			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	0,0	-	-	0,0	0,1	0,2	0,8	1,0			
	B. Hutan Sekunder	-	185,9	1.182,9	921,8	2.290,6	674,8	2.965,4	744,5	3.709,9			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	184,7	1.182,9	921,8	2.289,4	599,3	2.888,7	49,3	2.938,0			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					Jumlah						
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah	HPK	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove sekunder	-	1,2	-	-	1,2	75,4	76,7	695,3	772,0			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	0,0	185,9	1182,9	921,8	2.290,6	676,8	2.967,5	749,4	3.716,9			
	PULAU MALUKU												
	A. Hutan Primer	0,0	10,9	24,5	69,9	105,4	3,8	109,2	30,7	139,9			
	- Hutan lahan kering primer	0,0	0,0	24,5	68,8	93,3	1,9	95,3	4,1	99,3			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	10,9	0,0	1,1	12,0	1,9	13,9	26,6	40,5			
	B. Hutan Sekunder	-	541,6	2.232,8	2.555,7	5.330,1	6.355,3	11.685,4	3.569,0	15.254,4			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	537,5	2.232,3	2.555,6	5.325,3	6.243,8	11.569,1	2.781,1	14.350,2			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	(0,0)	(0,0)	34,4	34,4	0,3	34,7			
	- Hutan mangrove sekunder	-	4,1	0,5	0,1	4,7	77,2	81,9	787,5	869,5			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	(0,0)	75,9	75,9	-	75,9	67,0	142,9			
	TOTAL	0,0	552,5	2.257,3	2.701,5	5.511,3	6.359,2	11.870,5	3.666,6	15.537,1			
33	PAPUA												
	A. Hutan Primer	3.617,8	2.886,8	484,7	10.959,6	17.948,9	1.947,6	19.896,5	18.350,4	38.246,9			
	- Hutan lahan kering primer	3.153,0	2.830,8	169,5	8.090,2	14.243,6	1.180,6	15.424,2	14.305,6	29.729,8			
	- Hutan rawa primer	352,0	6,2	268,2	2.702,9	3.329,4	767,0	4.096,3	3.344,0	7.440,4			
	- Hutan mangrove primer	112,8	49,7	47,0	166,4	376,0	-	376,0	700,8	1.076,8			
	B. Hutan Sekunder	2.731,5	1.014,9	1.683,5	3.420,9	8.850,8	3.811,6	12.662,4	27.590,9	40.253,3			
	- Hutan lahan kering sekunder	714,2	899,1	1.695,1	2.240,0	5.548,5	3.931,9	9.480,4	24.174,6	33.655,1			
	- Hutan rawa sekunder	2.003,7	76,1	-11,5	1.180,9	3.249,2	-206,5	3.042,6	3.324,8	6.367,5			
	- Hutan mangrove sekunder	13,5	39,7	-0,1	-	53,1	86,2	139,3	91,5	230,7			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	287,2	287,2	-	287,2			
	TOTAL	6.349,3	3.901,7	2168,3	14.380,4	26.799,7	6.046,4	32.846,1	45.941,3	76.787,4			
34	PAPUA BARAT												
	A. Hutan Primer	20,3	46,4	4,5	1,7	72,9	18,9	91,8	118,2	209,9			
	- Hutan lahan kering primer	18,9	25,9	3,1	0,8	48,7	2,9	51,6	72,6	124,2			
	- Hutan rawa primer	-	20,1	0,1	0,9	21,2	11,0	32,1	33,9	66,0			
	- Hutan mangrove primer	1,4	0,4	1,3	-	3,1	5,0	8,1	11,7	19,7			
	B. Hutan Sekunder	0,8	-553,6	22,7	-1.011,7	-1.541,8	-233,8	-1.775,6	196,2	-1.579,5			
	- Hutan lahan kering sekunder	0,8	-618,5	22,7	-271,9	-866,9	-229,9	-1.096,8	356,6	-740,2			
	- Hutan rawa sekunder	-	14,1	-	-319,1	-305,0	-0,9	-305,9	-190,4	-496,3			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										TOTAL
		HUTAN TETAP					Jumlah	HPK	Jumlah	APL	TOTAL	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- Hutan mangrove sekunder	0,0	50,9	0,0	-420,8	-369,9	-3,0	-372,9	30,0	-343,0		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	21,1	-507,2	27,2	-1.010,0	-1.468,9	-214,9	-1.683,9	314,4	-1.369,5		
	PULAU PAPUA											
	A. Hutan Primer	3.638,1	2.933,2	489,3	10.961,3	18.021,8	1.966,5	19.988,3	18.488,6	38.456,9		
	- Hutan lahan kering primer	3.171,9	2.856,7	172,6	8.091,0	14.292,2	1.183,6	15.475,8	14.378,2	29.854,0		
	- Hutan rawa primer	352,0	26,4	268,3	2.703,8	3.350,5	777,9	4.128,5	3.377,9	7.506,4		
	- Hutan mangrove primer	114,2	50,1	48,4	166,4	379,0	5,0	384,0	712,5	1.096,5		
	B. Hutan Sekunder	2.732,4	461,3	1.706,2	2.409,1	7.309,0	3.577,8	10.886,7	27.787,1	38.673,8		
	- Hutan lahan kering sekunder	715,1	280,6	1.717,8	1.968,1	4.681,6	3.702,0	8.383,6	24.531,2	32.914,8		
	- Hutan rawa sekunder	2.003,7	90,1	-11,5	861,8	2.944,1	-207,4	2.736,7	3.134,5	5.871,2		
	- Hutan mangrove sekunder	13,5	90,5	-0,1	-420,8	-316,8	83,2	-233,6	121,4	-112,2		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	287,2	287,2	-	287,2		
	TOTAL	6.370,4	3.394,5	2.195,5	13.370,4	25.330,8	5.831,4	31.162,2	46.255,7	77.417,9		
	INDONESIA											
	A. Hutan Primer	11.225,2	9.438,4	3.784,5	13.229,9	37.677,9	2.267,3	39.945,2	32.168,4	72.113,6		
	- Hutan lahan kering primer	8.659,9	9.117,7	3.354,5	10.111,6	31.243,7	1.411,7	32.656,5	24.962,9	57.618,3		
	- Hutan rawa primer	2.196,0	26,4	269,9	2.792,3	5.284,5	826,0	6.110,5	3.469,8	9.580,4		
	- Hutan mangrove primer	369,2	294,3	160,1	326,0	1.149,7	29,5	1.179,2	3.735,7	4.914,9		
	B. Hutan Sekunder	16.182,5	29.826,6	38.827,8	53.215,2	138.052,2	24.524,9	162.577,0	151.109,6	313.686,6		
	- Hutan lahan kering sekunder	8.321,9	22.009,3	34.077,2	39.321,7	103.730,1	17.198,2	120.928,3	87.268,8	208.197,0		
	- Hutan rawa sekunder	3.527,9	3.013,9	4.138,7	9.376,0	20.056,5	6.679,8	26.736,2	47.145,6	73.881,8		
	- Hutan mangrove sekunder	4.332,7	4.803,5	6.11,9	4.517,5	14.265,6	646,9	14.912,6	16.695,2	31.607,8		
	C. Hutan Tanaman*	1.625,3	235,7	-1.043,2	19.182,3	20.000,1	801,5	20.801,6	32.837,2	53.638,9		
	TOTAL	29.032,9	39.500,8	41.569,1	85.627,4	195.730,2	27.593,6	223.323,9	216.115,2	439.439,1		

Ket. *: Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan Tanaman baik Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun Hutan Tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dgn lingkungan sekitarnya.

Deforestasi pada Hutan Tanaman di dalam kawasan hutan KSA-KPA dan/atau HL, tidak diklasifikasikan sebagai Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT

Sumber: - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2017 dan 2018, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital kawasan hutan produk Kebijakan Satu Peta per 27 November 2018, Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TABEL I.3. POTENSI TEGAKAN HUTAN DI INDONESIA

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Potensi Tegakan Pohon (m ³ /ha)	
				Diameter 20 cm ke atas	Diameter 50 cm ke atas
1	Aceh	Hutan lahan kering primer	14	182,94	110,46
		Hutan lahan kering sekunder	11	241,66	159,26
2	Bali	Hutan lahan kering primer	11	154,43	96,71
		Hutan lahan kering sekunder	4	55,72	30,55
3	Banten	Hutan lahan kering sekunder	3	131,90	100,45
		Hutan tanaman	5	73,90	33,07
4	Bengkulu	Hutan lahan kering primer	17	194,77	122,13
		Hutan lahan kering sekunder	13	129,85	59,49
5	Gorontalo	Hutan lahan kering primer	8	203,69	139,00
		Hutan lahan kering sekunder	12	189,70	123,17
6	Jambi	Hutan lahan kering primer	19	214,13	135,30
		Hutan lahan kering sekunder	9	128,23	70,48
7	Jawa Barat	Hutan lahan kering sekunder	17	85,81	52,15
		Hutan tanaman	10	112,68	57,69
8	Jawa Tengah	Hutan lahan kering primer	2	57,94	32,10
		Hutan lahan kering sekunder	2	47,77	26,04
		Hutan tanaman	2	82,28	41,55
9	Jawa Timur	Hutan lahan kering sekunder	43	110,09	85,45
		Hutan tanaman	1	143,78	110,69
10	Kalimantan Barat	Hutan lahan kering primer	58	191,20	117,08
		Hutan lahan kering sekunder	78	170,53	107,22
		Hutan rawa sekunder	31	115,83	43,40
11	Kalimantan Selatan	Hutan lahan kering primer	4	147,19	84,39
		Hutan lahan kering sekunder	34	142,72	79,55
12	Kalimantan Tengah	Hutan lahan kering primer	1	199,21	74,75
		Hutan lahan kering sekunder	13	166,85	97,11
		Hutan rawa sekunder	14	81,77	12,74
13	Kalimantan Timur	Hutan lahan kering primer	9	162,49	103,75
		Hutan lahan kering sekunder	87	115,08	59,92
14	Kalimantan Utara	Hutan lahan kering primer	9	151,49	98,03
		Hutan lahan kering sekunder	25	123,56	72,51
15	Kepulauan Bangka Belitung	Hutan lahan kering sekunder	6	46,55	9,18
		Hutan rawa sekunder	3	47,17	14,74
16	Kepulauan Riau	Hutan lahan kering sekunder	23	103,06	35,94
17	Lampung	Hutan lahan kering primer	25	244,75	172,83
		Hutan lahan kering sekunder	14	120,01	77,92
		Hutan rawa sekunder	3	108,90	50,60
18	Maluku	Hutan lahan kering primer	13	149,49	83,72
		Hutan lahan kering sekunder	51	138,30	84,15
		Hutan rawa sekunder	1	120,42	74,16

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Potensi Tegakan Pohon (m ³ /ha)	
				Diameter 20 cm ke atas	Diameter 50 cm ke atas
19	Maluku Utara	Hutan lahan kering primer	3	118,05	67,53
		Hutan lahan kering sekunder	14	146,59	88,57
20	Nusa Tenggara Barat	Hutan lahan kering primer	56	133,12	80,50
		Hutan lahan kering sekunder	31	73,03	34,91
21	Nusa Tenggara Timur	Hutan lahan kering primer	12	121,55	77,18
		Hutan lahan kering sekunder	39	73,54	39,66
22	Papua	Hutan lahan kering primer	38	136,59	77,76
		Hutan lahan kering sekunder	34	123,05	66,73
		Hutan rawa primer	6	91,44	52,09
		Hutan rawa sekunder	5	57,25	28,12
23	Papua Barat	Hutan lahan kering primer	11	133,14	64,32
		Hutan lahan kering sekunder	18	139,71	81,17
		Hutan rawa primer	1	102,34	51,58
24	Riau	Hutan lahan kering primer	10	136,44	55,03
		Hutan lahan kering sekunder	14	177,43	88,26
		Hutan rawa primer	2	137,16	29,17
		Hutan rawa sekunder	21	134,60	50,57
25	Sulawesi Barat	Hutan lahan kering sekunder	5	193,42	122,33
26	Sulawesi Selatan	Hutan lahan kering primer	7	78,89	28,70
		Hutan lahan kering sekunder	16	97,23	36,59
27	Sulawesi Tengah	Hutan lahan kering primer	61	107,74	51,85
		Hutan lahan kering sekunder	52	101,60	50,75
28	Sulawesi Tenggara	Hutan lahan kering primer	2	76,68	17,53
		Hutan lahan kering sekunder	8	36,35	10,12
29	Sulawesi Utara	Hutan lahan kering primer	8	248,09	175,47
		Hutan lahan kering sekunder	12	204,08	135,97
30	Sumatera Barat	Hutan lahan kering primer	5	149,44	81,98
		Hutan lahan kering sekunder	12	161,75	86,25
		Hutan rawa sekunder	1	76,92	5,72
31	Sumatera Selatan	Hutan lahan kering primer	22	157,66	96,14
		Hutan lahan kering sekunder	19	112,71	59,75
		Hutan rawa sekunder	3	40,73	17,05
32	Sumatera Utara	Hutan lahan kering primer	25	210,59	124,01
		Hutan lahan kering sekunder	32	180,96	101,37

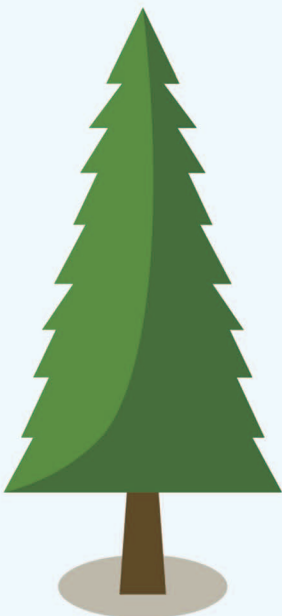
Keterangan:

1. Data yang digunakan adalah data plot PSP kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional tahun 2013-2018
2. Nilai potensi tegakan adalah nilai potensi untuk seluruh jenis pohon

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan



PERENCANAAN KAWASAN HUTAN



*Direktorat Rencana,
Penggunaan dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan*

TABEL II.1. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN HUTAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

1. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)

No.	Jenis Rencana	Pengesahan
1	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011, tanggal 28 Juni 2011 (dalam proses revisi)

2. Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan (Sesuai mandat Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan)

No.	Jenis Rencana	Progres			Keterangan
		Belum Menyusun	Draft	Pengesahan	
1	Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan		√		
2	Rencana Makro Pematapan Hutan			√	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2013, tanggal 25 Juni 2013
3	Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat	√			
4	Rencana Makro Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan		√		
5	Rencana Makro Pemanfaatan Hutan		√		
6	Rencana Makro Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan	√			
7	Rencana Makro Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	√			
8	Rencana Makro Penyuluhan Kehutanan	√			
9	Rencana Makro Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan	√			
10	Rencana Makro Pengendalian dan Pengawasan Pengurusan Hutan	√			

No.	Jenis Rencana	Progres			Keterangan
		Belum Menyusun	Draft	Pengesahan	
11	Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Sumatera		√		
12	Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara		√		
13	Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Kalimantan		√		
14	Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Sulawesi, Maluku, Papua		√		
Jumlah		6	7	1	

3. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)

No.	Provinsi	Progres			Keterangan
		Belum Menyusun	Draft	Pengesahan	
1	Aceh		√		
2	Sumatera Utara		√		
3	Sumatera Barat			√	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012
4	Jambi		√		
5	Riau		√		
6	Kepulauan Riau	√			
7	Bengkulu			√	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013
8	Kepulauan Bangka Belitung			√	Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014, tanggal 23 Juli 2014

No.	Provinsi	Progres			Keterangan
		Belum Menyusun	Draft	Pengesahan	
9	Sumatera Selatan		√		
10	Lampung		√		
11	Banten		√		
12	DKI Jakarta		√		
13	Jawa Barat			√	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014
14	Jawa Tengah			√	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012, 28 September 2012
15	D.I. Yogyakarta			√	Keputusan Gubernur DIY No. 10/KEP/2012, tanggal 9 Januari 2012
16	Jawa Timur			√	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013
17	Bali			√	Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014
18	Nusa Tenggara Barat			√	Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2013, tanggal 2 November 2013
19	Nusa Tenggara Timur			√	Peraturan Gubernur NTT Nomor 34 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013
20	Kalimantan Barat			√	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2016, tanggal 3 Oktober 2016
21	Kalimantan Selatan			√	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 50 Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015
22	Kalimantan Tengah		√		
23	Kalimantan Timur			√	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012, tanggal 5 Juli 2012
24	Kalimantan Utara		√		
25	Sulawesi Utara			√	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015
26	Gorontalo			√	Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 56 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014
27	Sulawesi Tengah			√	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 68 Tahun 2013, tanggal 8 November 2013
28	Sulawesi Selatan			√	Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 147 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018
29	Sulawesi Barat			√	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014
30	Sulawesi Tenggara			√	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2015, tanggal 9

No.	Provinsi	Progres			Keterangan
		Belum Menyusun	Draft	Pengesahan	
31	Maluku Utara			√	September 2015 Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31.1 Tahun 2016, tanggal 22 November 2016
32	Maluku	√			
33	Papua		√		
34	Papua Barat		√		
Jumlah		2	12	20	

4. Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTk)

No.	Kabupaten	Progres		Keterangan
		Draft	Pengesahan	
1	Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah		√	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2013
2	Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah		√	Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2014, tanggal 18 Februari 2014
3	Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah		√	Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2013, tanggal 31 Oktober 2013
4	Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah		√	Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2014, tanggal 3 November 2014
5	Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah		√	Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2014, tanggal 19 November 2013
6	Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah	√		
7	Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah	√		
8	Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	√		

No.	Kabupaten	Progres		Keterangan
		Draft	Pengesahan	
9	Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	√		
10	Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah	√		
11	Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah	√		
12	Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah	√		
13	Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah	√		
14	Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah	√		
15	Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	√		
16	Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau	√		
17	Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan	√		
	Jumlah	12	5	

5. Peraturan Perencanaan Kehutanan

No.	Jenis Peraturan	Pengesahan
1	Sistem Perencanaan Kehutanan	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010, tanggal 14 September 2010
2	Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2012, tanggal 9 Januari 2012
3	Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2013, tanggal 3 Juli 2013

Catatan: Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK) terhenti dikarenakan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 31 Desember 2018

TABEL II.2. PERKEMBANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PROSES REVIEW RTRWP

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN PERUNTUKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	ANGGROE ACEH DARUSSALAM	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMILAH	18.462 64.654 4.517 91.903 -	3.331 67.488 5.496 55.402 -	3.588 18.224 5.743 1.137 2.603 31.275	2.613 60.590 654 66.685 -	2.630 35.010 960 41.656 -	3.028 7.864 10.113 5.456 -	10	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/0955/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS	
2	SUMATERA UTARA	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMILAH	- 50.783 104.210 141.270 -	4.850 461.527 2.291 447.156 36.302 131.717	- 10.857 3.194.449 21.577 704 35.429	- 104.444 3.467 28.504 70.947 207.362	- 208.305 176.722 222.009 35.680 642.716	1.140 8.598 2.326 5.830 -		Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan mengenai kawasan hutan provinsi Sumatera Utara Nomor SK.579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014, menindaklanjuti keputusan MA no 47P/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013	
3	SUMATERA BARAT	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMILAH	4.852 86.339 23.606 97.062 4.330 216.189	7.560 97.563 25.709 50.204 30.350 211.386	882 3.650 6.098 1.045 1.869 13.544	- 87.456 21.541 33.621 4.595 147.213	1.070 50.887 21.293 36.230 16.806 126.286	- 3.412 6.098 253 143 9.906		Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.304/Menhut-II/2011, tanggal 9-6-2011 dan SK.141/Menhut-II/2012 tanggal 15/03/2011	
4	RIAU	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMILAH	4.577 16.864 597.466 296.400 172.400	25.469 32.256 546.252 327.677 2.599.042	5.521 12.331 8.875 19.491 696	2.186 17.636 481.978 11.493 204.250	- - 173.039 84.446 1.445.889	5.796 5 4.846 905 -		1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Riau. 2. Rekomendasi Ombudsman RI No. 0002/REK/0361.2015/PP-41/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 3. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.314/Menhut/Sejen/PLA.015/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.393/Menhut/Sejen/PLA.015/2016 tanggal 23 Mei 2016 4. Persub S.438/Menhut-PK/TL/Ren/PLA.04/2016 tanggal 25 April 2016 5. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.220/Menhut/Sejen/PLA.3/4/2016 tanggal 20 April 2016. 6. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.	
5	JAMBI	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMILAH	- - 63.411 8.834 -	1.582 303 5.010 100.152 -	- - - 10.908 -	- 271 1.323 18.935 -	336 - 167 13.545 -	- - - - -		Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.727/Menhut-II/2012, tanggal 10-12-2012 dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS;	
		JUMILAH	1.087.707	3.530.696	46.914	717.543	1.703.374	11.552			
		JUMILAH	72.245	107.047	10.908	20.529	14.048	-			

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)			PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)			KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	SUMATERA SELATAN	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMILAH	607 55.562 23.838 - 2.818 82.825	22.145 25.653 9.432 88.932 264.388 410.550	6.207 2.224 1.493 36.054 1.485 47.463	607 8.436 24.099 6.970 4.187 44.299	12.574 7.071 1.912 31.106 177.541 230.204	7.624 1.891 1.493 30.183 - 41.191	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 September 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPD RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCL.S; telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.190/Menhk/Sejten/PLA.0/4/2018 tanggal 20 April 2018 sebagai tindak lanjut rekomendasi/indikasi korektif atas Surat Ombudsman RI No. 254/ORI-SRT/III/2018 tanggal 22 Februari 2018
7	BENGKULU	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMILAH	3.683 18.082 1.897 5.796 - 29.458	13.217 13.112 58.376 18.130 - 102.835	101 - - - - 101	3.610 5.358 4.226 17.819 - 31.013	- 399 1.453 340 - 2.192	101 - - - - 101	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.643/Menhut-II/2011, tanggal 10-11-2012
8	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
9	KEP. BANGKA BELITUNG	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMILAH	772 - - 8.589 - 9.361	420 33.012 - 100.158 - 133.590	- 1.993 - 1.225 - 3.218	190 2.529 - 8.159 - 10.878	- - - 19.131 - 19.131	- 1.993 - 1.225 - 3.218	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.798/Menhut-II/2012, tanggal 27-12-2012
10	KEP. RIAU	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMILAH	3.120 13.197 11.374 163 30.869 58.723	12.943 36.317 114.252 6.461 362.981 532.954	3 2.085 282 - - 2.370	4014 11.733 25.807 720 104.688 146.962	1.571 5.163 67.243 8949 256.152 339.078	2.108 - - 262 - 2.370	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPD RI/IX/2014; telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No SK.76/Menhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri; Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 272/Menhk/Sejten/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Prov. Kepri sebagai tindak lanjut Persetujuan Sebagian DPCLS Provinsi Kepri didasarkan atas Surat DPR RI Nomor PW 105706/DPD RI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
12	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
13	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
14	DI. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
15	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
16	BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
18	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)			PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)			KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	NUSA TENGGARA TIMUR	KSA/KPA Darat KSA/KPA Air HL HPT HP HPK JUMILAH	3.613 - - 6.263 11.472 21.348	7.352 1.963 74.606 23.800 59.939 45.535 213.195	5.328 5.064 34 14.092 - 24.518	617 - - 3.499 8.052 12.168	- 12.492 4.307 10.307 27.057 54.163	5.328 551 35 5.897 - 11.811	Terdapat Usulan sesuai Surat Gubernur NTT, Nomor : 1. Surat Gubernur Nomor BU.522/14/D/SHUT/2013, tgl 11-10-2013 2. Surat Gubernur No. BU.522/19/D/SHUT/2013, tgl 20-11-2013 3. Surat Gubernur No. BU.522/13/D/SHUT/2014 tgl 5-6-2014 4. Surat Gubernur No. BU.522/03/D/SHUT/2015, tgl 15-4-2015 Update per 31 Des 2015 adalah Review RTRW NTT dalam tahap finalisasi Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK. 357/Menhk/Sejen/PLA.o/5/2016; 11 Mei 2016 Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Kalbar
20	KALIMANTAN BARAT	HL HPT HP HPK JUMILAH	198.125 235.863 126.769 111.339 714.792	220.648 637.048 1.064.863 211.200 2.560.149	77.186 51.984 87.434 5.768 271.408	66.048 149.567 41.681 77.007 358.639	- 189.460 294.912 69.765 554.137	29.156 2.977 20.253 - 76.008	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.232/Menhut-II/2011, tanggal 31-5-2011 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Kalteng
21	KALIMANTAN TENGAH	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMILAH	148.512 180.947 636.399 2.401.681 533.117 3.900.656	38.866 5.426 124.183 840.773 1.913.076 2.922.312	15.169 50.472 17.933 40.234 820.907 944.715	48.412 33.116 86.977 402.043 119.118 689.666	- - 101.157 333.261 734.238 1.168.656	13.601 9.968 3.179 2.720 204 29.672	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.436/Menhut-II/2009, tanggal 23 Juli 2009 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.432/Menhut-II/2014 tanggal 22 Juli 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Kalsei
22	KALIMANTAN SELATAN	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMILAH	29.092 17.249 8.170 133.764 82.018 270.293	1.372 52.711 51.308 174.716 212 280.319	6.556 18.247 1.312 14.644 7.092 47.851	1.240 6.795 28.168 63.391 - 99.594	8.749 563 31 14.227 35.933 59.503	6.556 15.733 4.355 13.103 - 39.747	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Kaltim
23	KALIMANTAN TIMUR	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMILAH	- 14.796 482.778 127.752 - 625.326	176.708 85.973 582.195 1.689.617 25 2.534.518	14.006 21.705 15.760 121.359 - 172.830	- 7.677 53.799 214.764 - 276.240	48.732 24.999 108.063 287.533 25 469.352	- 11.732 - - - - 11.732	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.434/Menhut-II/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Sulut
24	SULAWESI UTARA	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMILAH	793 6.457 - - - 7.250	12.421 15.278 16.545 3.821 526 48.591	1.423 1.166 - - - 2.589	465 296 - - - 761	182 521 5.264 904 166 7.037	290 - - - - 290	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.434/Menhut-II/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Sulut

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN PERUNTUKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
25	SULAWESI TENGAH	KSA/KPA	59.489	73.687	-	-	5.510	-	-	Perselesaian Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.635/Menhut-II/2013 tanggal 23 September 2013, sebagaimana telah diperbaharui dengan SK.708/Menhut-II/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Sulteng	
		HL	142.445	200.128	-	34.379	9.802	-	-		
		HPT	59.184	302.334	1.004	8.005	28.686	-	-		
		HP	50.765	197.972	120	404	28.788	0	0		
		HPK	9.563	208.702	80	-	37.285	91	91		
		JUMILAH	321.446	982.823	1.204	42.788	110.071	91	91		
26	SULAWESI SELATAN	KSA/KPA	22.595	13.266	-	-	-	-	-	1. Usulan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 522/2064/DISHUT tanggal 31 Maret 2015 dan terakhir dengan Surat Nomor 522/7937/DISHUT tanggal 22 Nopember 2018.	
		HL	76.036	98.388	886	-	-	-	-		
		HPT	13.403	50.105	160	-	-	-	-		
		HP	32.598	9.478	1.314	-	-	-	-	2. Laporan Final Tim Terpadu Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka RTRWP Sulsel telah dipaparkan keMenteri tanggal 21 Desember	
		HPK	112.034	203.836	2.360	-	-	-	-		
		JUMILAH	28.823	8.334	-	8.061	-	-	-	Perselesaian Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011	
27	SULAWESI TENGGARA	KSA/KPA	187.128	30.236	-	52.660	-	-	-		
		HL	23.706	29.427	-	15.773	13.059	-	-		
		HPT	61.714	154.376	-	34.078	52.287	-	-		
		HP	3.563	87.792	-	4.539	44.759	-	-		
		HPK	17.031	310.165	-	115.111	110.105	-	-		
		JUMILAH	8.353	5.550	37	28.603	5.095	167	-		
28	GORONTALO	KSA/KPA	55.850	22.428	1.550	8.265	13.779	1.055	-	Perselesaian Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.324/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Gorontalo	
		HL	14.161	4.535	2.316	3.661	2.055	1.194	-		
		HPT	3.319	2.048	2.048	-	1.509	1.538	-		
		HP	95.395	35.832	5.951	55.553	22.605	3.787	-		
		HPK	214.184	44.126	-	214.184	8.470	825	-		
		JUMILAH	80.446	44.566	-	37.416	11.671	28.618	-	Perselesaian Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.726/Menhut-II/2012, tanggal 10-12-2012 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.862/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2010 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Sulbar	
29	SULAWESI BARAT	KSA/KPA	3.484	17.256	-	-	2	-	-		
		HL	30.670	75.645	6.125	-	3.955	2.326	-		
		HPT	204.600	117.452	987	4.785	11.482	987	-	Perselesaian Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.871/Menhut-II/2013 tanggal 6 Desember 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPD RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Perselesaian Perubahan Kawasan Hutan yang DPOLS	
		HP	41.439	84.196	-	12.264	26.863	-	-		
		HPK	16.352	1.230.827	578	3.619	321.813	-	-		
		JUMILAH	296.545	1.525.376	-	20.668	364.115	3.313	-		
30	MALUKU	KSA/KPA	28.650	1.656	444	-	-	-	-		
		HL	180.735	56.280	6.017	29.001	1.662	2.892	-	Perselesaian Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.490/Menhut-II/2012 tanggal 5-9-2012	
		HPT	92.591	77.108	10.065	22.994	8.599	710	-		
		HP	40.641	136.148	1.122	9.585	15.648	1.479	-		
		HPK	42.156	679.564	7.071	30.642	247.452	-	-		
		JUMILAH	384.773	950.736	24.719	92.222	273.361	5.081	-		

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)			PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)			KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	PAPUA	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMLAH	8.108 405.429 156.662 3.570.941 2.058.356 6.199.496	133.814 269.758 80.581 126.766 667.704 1.278.623	521 10.661 18.189 14.307 4.482 48.160	763 395.176 133.115 3.404.532 1.803.244 5.736.830	9.662 44.532 39.468 50.426 232.297 376.385	521 7.742 18.282 14.307 4.406 45.258	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.458/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Papua
33	PAPUA BARAT	KSA/KPA HL HPT HP HPK JUMLAH	238.324 97.990 92.203 136.735 467.507 1.032.759	35.714 145.399 102.674 132.632 563.033 979.452	4 1.687 2.150 3.080 16.949 23.870	5.835 8.388 23.532 - 400.465 438.220	- - 44.817 61.594 136.634 243.045	4 59 2.633 - 1.238 3.934	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.710/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Papua Barat

Keterangan: pm = pro memory

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d. 31 Desember 2018

TABEL II.3 PROGRES PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN DALAM USULAN REVISI RTRWP

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Aceh	Peruntukan : 131.717 Ha Fungsi : 179.536 Ha Penunjukan : 31.275 Ha	Peruntukan : 80.256 Ha Fungsi : 130.542 Ha Penunjukan : 26.461 Ha SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 Persub : S.33/Menhut-VII/2014, 16 Januari 2014. Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09557/DPR RI//X/2014 tgl 25 September 2014 (DPCLS sudah di Include-kan seluas 37.640 ha)	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Aceh. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
2	Sumatera Utara	Peruntukan : 1.269.284 Ha Fungsi : 296.263 Ha Penunjukan : 35.429 Ha	Peruntukan : 642.716 Ha Fungsi : 207.362 Ha Penunjukan : 17.894 Ha Persub : S.407/Menhut-VII/2014, 18 September 2014	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti keputusan MA no 47p/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
3	Sumatera Barat	Peruntukan : 211.386 Ha Fungsi : 216.189 Ha Penunjukan : 13.544 Ha	Peruntukan : 126.286 Ha Fungsi : 147.213 Ha Penunjukan : 9.906 Ha SK.304/Menhut-II/2011; 9 Juni 2011 dan SK.141/Menhut-II/2012; 15 Maret 2012 (DPR setuju untuk areal DPCLS) Persub : S.628/Menhut-VII/2009; 12 Agustus 2009	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan Keputusan Menhutbun No. 422/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
4	Riau	Peruntukan : 3.530.696 Ha Fungsi : 1.087.707 Ha Penunjukan : 46.914 Ha	Peruntukan : 1.703.374 Ha Fungsi : 717.543 Ha Penunjukan : 1.152 Ha SK.673/Menhut-II/2014, 8 Agustus 2014, menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI terdapat tambahan perubahan peruntukan seluas 65.125 ha → SK.314/Menhk/Setjen/PLA.2/2016 jo SK.393/Menhk/Setjen/PLA.0/2016	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Riau. 2. Rekomendasi Ombudsman RI No. 0002/REK/0361.2015/ PBP-4/III/2016 tanggal 16 Februari 2016 3. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.314/Menhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.393/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 4. Persub S.438/Menhk-PKTL/Ren/PLA.0/4/2016 tanggal 25 April 2016 5. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.220/Menhk/Setjen/PLA.3/4/2016 tanggal 20 April

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
5	Kepulauan Riau	Peruntukan : 532.954 Ha Fungsi : 58.723 Ha Penunjukan : 2.370 Ha	Peruntukan : 399.078 Ha Fungsi : 146.962 Ha Penunjukan : 2.370 Ha SK.76/Menhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015.	2016. 6. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K. 1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri. 2. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI No. 0014/REK/0906.2013/PBP.41/XII/2014, telah diterbitkan Keutusan Menteri LHK No SK.76/Menhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri 3. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.91/Menhk-II/2015 tanggal 6 Maret 2015. 4. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
6	Jambi	Peruntukan : 107.047 Ha Fungsi : 72.245 Ha Penunjukan : 10.908 Ha	Peruntukan : 14.048 Ha Fungsi : 20.529 Ha SK.727/Menhut-II/2012; 10 Desember 2012 Persub : S.11/Menhut-VII/2013; 8 Januari 2013 Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tgl 24 September 2014 (DPCLS sudah di Include-kan seluas 336 ha)	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Jambi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
7	Bengkulu	Peruntukan : 102.835 Ha Fungsi : 29.458 Ha Penunjukan : 101 Ha	Peruntukan : 2.192 Ha Fungsi : 31.013 Ha Penunjukan : 101 Ha SK.643/Menhut-II/2011; 10 November 2011 Persub : S.58/Menhut-VII/2012; 30 Januari 2012	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Keputusan Menhutbun No.421/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
8	Kepulauan Bangka Belitung	Peruntukan : 133.590 Ha Fungsi : 9.361Ha Penunjukan : 3.218Ha	Peruntukan : 19.131 Ha Fungsi : 10.878 Ha Penunjukan : 3.210 Ha SK. 798/Menhut-II/2012; 27 Desember 2012 Persub : S.110/Menhut-VII/2013; 8 Januari 2013	1. Akan diterbitkan Keputusan Menhut mengenai Perubahan atas Keputusan No. SK.357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
9	Sumatera Selatan	Peruntukan : 410.550 Ha Fungsi : 82.825Ha Penunjukan : 47.463Ha	Peruntukan : 230.204 Ha Fungsi : 44.299 Ha Penunjukan : 41.191 Ha SK.822/Menhut-II/2013; 19 November 2013	1. Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK nomor

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Peretujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
			<p>Persub : S.32/Menhut-VII/2014, 16 Januari 2104 Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09557/DPR RII/X/2014 tgl 25 September 2014 (DPCLS pertama sudah di include-kan seluas 19.045 ha) Persub : S.519/Menhut-VII/2009; 6 Juli 2009</p>	<p>SK.454/Menhk/Sejten/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 mengenai Kawasan Hutan Prov. Sumsel. 3. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
10	Lampung	Tidak ada usulan perubahan		<p>1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
11	DKI Jakarta	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.97/Menhut-VII/2011; 3 Maret 2011	<p>1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
12	Jawa Barat	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.276/Menhut-VII/2010; 10 Juni 2010	<p>1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
13	Banten	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.277/Menhut-VII/2010; 10 Juni 2010	<p>1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
14	Jawa Tengah	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.933/Menhut-VII/2009; 11 Desember 2009	<p>1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
15	DI. Yogyakarta	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.932/Menhut-VII/2009; 11 Desember 2009	<p>1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
16	Jawa Timur	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.581/Menhut-VII/2010; 11 November 2010	<p>1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK. 395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
17	Bali	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.728/Menhut-VII/2009; 14 September 2009	<p>1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
18	Nusa Tenggara Barat	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.727/Menhut-VII/2009; 14 September 2009	<ol style="list-style-type: none"> Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK. 598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
19	Nusa Tenggara Timur	Peruntukan : 213.195 Ha Fungsi : 21.461 Ha Penunjukan : 24.518 Ha	Peruntukan : 54.163 Ha Fungsi : 12.168 Ha Penunjukan : 11.811 Ha SK. 357/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2016; 11 Mei 2016 Persub : S.582/Menhk-PKTL/REN/PLA.0/6/2016 tgl 13 Juni 2016	<p>Pemerintah NTT telah mengajukan usulan perubahan Kawasan hutan sesuai Surat Gubernur NTT :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Gubernur Nomor BU.522/14/DISHUT/2013 tanggal 11 Oktober 2013. Surat Gubernur No. BU.522/19/DISHUT/2013 tanggal 20 November 2013 Surat Gubernur No. BU.522/13/DISHUT/2014 tanggal 5 Juni 2014 Surat Gubernur No. BU.522/03/DISHUT/2015 tanggal 15 April 2015. <ol style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK. 357/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2016; 11 Mei 2016 Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.237/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 11 Mei 2016.
20	Kalimantan Barat	Peruntukan : 2.355.730 Ha Fungsi : 727.727Ha Penunjukan : 236.133Ha	Peruntukan : 554.137 Ha Fungsi : 352.772 Ha Penunjukan : 52.386 Ha SK.936/Menhut-II/2013, 20 Desember 2013. Persub No : S.26/Menhut-VII/2014; 10 Januari 2014.	<ol style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 69.294 Ha.
21	Kalimantan Tengah	Peruntukan : 2.922.312 Ha Fungsi : 3.900.658Ha Penunjukan : 944.715Ha	Peruntukan : 1.168.656 Ha Fungsi : 689.666 Ha Penunjukan : 29.672 Ha SK.292/Menhut-II/2011; 31 Mei 2011. Persub No : S.431/Menhut-VII/2012; 28 September 2012.	<ol style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Keputusan Mentan No. 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
22	Kalimantan Timur	Peruntukan : 2.534.518 Ha Fungsi : 625.326 Ha Penunjukan : 172.830 Ha	Peruntukan : 469.352 Ha Fungsi : 276.240 Ha Penunjukan : 11.732 Ha	<ol style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

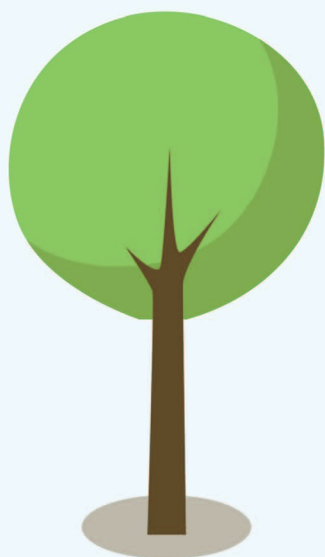
No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
23	Kalimantan Selatan	Peruntukan : 270.293 Ha Fungsi : 47.851 Ha Penunjukan : 280.319 Ha	SK.554/Menhut-II/2013; 2 Agustus 2013. Persub No : S.519/Menhut-VII/2013; 5 September 2013. Peruntukan : 59.503 Ha Fungsi : 99.594 Ha Penunjukan : 39.747 Ha SK.432/Menhut-II/2009; 22 Juli 2009. Persub No : S.518/Menhut-VII/2009; 6 Juli 2009.	2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K. 1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
24	Gorontalo	Peruntukan : 35.832 Ha Fungsi : 95.395 Ha Penunjukan : 5.951 Ha	Peruntukan : 23.604 Ha Fungsi : 55.553 Ha Penunjukan : 3.787 Ha SK.324/Menhut-II/2010; 25 Mei 2010. Persub No : S.238/Menhut-VII/2010; 14 Mei 2010.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
25	Sulawesi Utara	Peruntukan : 48.591 Ha Fungsi : 7.250 Ha Penunjukan : 2.589 Ha	Peruntukan : 7.037 Ha Fungsi : 761 Ha Penunjukan : 290 Ha SK.434/Menhut-II/2013; 17 Juni 2013. Persub No : S.521/Menhut-VII/2013; 5 September 2013.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
26	Sulawesi Tengah	Peruntukan : 982.823 Ha Fungsi : 321.446 Ha Penunjukan : 1.204 Ha	Peruntukan : 101.071 Ha Fungsi : 42.788 Ha Penunjukan : 91 Ha SK.635/Menhut-II/2013; 24 September 2013 Sebagaimana telah diperbaharui melalui SK.708/Menhut-II/2014; 22 Agustus 2014. Persub No. S.884/Menhut-VII/2014; 1 September 2014.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
27	Sulawesi Selatan	Peruntukan : 203.835 Ha Fungsi : 112.034 Ha Penunjukan : 2.360 Ha		1. Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP melalui surat Gubernur Nomor 522/2064/DISHUT tanggal 31 Maret 2015 dan terakhir dengan Surat Nomor 522/7937/DISHUUT tanggal 22 Nopember 2018. 2. Laporan Final Tim Terpadu Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka RTRWP Sulsel telah dipaparkan ke Menteri tanggal 21 Desember 2018.
28	Sulawesi Tenggara	Peruntukan : 310.165 Ha Fungsi : 304.924 Ha	Peruntukan : 110.105 Ha Fungsi : 115.111 Ha SK.465/Menhut-II/2011; 9 Agustus 2011.	1. Akan diterbitkan Keputusan Menhut mengenai Perubahan atas Keputusan Menhut No. 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
			Persub No : S. 61/Menhut-VII/2013; 30 Januari 2013.	Tenggara. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 49.195 Ha.
29	Sulawesi Barat	Peruntukan : 168.860 Ha Fungsi : 294.630 Ha	Peruntukan : 73.556 Ha Fungsi : 251.600 Ha SK.726/Menhut-II/2012; 10 Desember 2012 Persub No : S. 62/Menhut-VII/2013; 30 Januari 2013	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.362/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
30	Maluku	Peruntukan : 1.525.376 Ha Fungsi : 296.545 Ha Penunjukan : 7.691 Ha	Peruntukan : 364.115 Ha Fungsi : 20.668 Ha Penunjukan : 3.313 Ha SK. 871/Menhut-II/2013; 6 Desember 2013. Persub No. S.27/Menhut-VII/2014; 10 Januari 2014.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.354/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
31	Maluku Utara	Peruntukan : 950.736 Ha Fungsi : 384.773 Ha Penunjukan : 24.719 Ha	Peruntukan : 273.361 Ha Fungsi : 92.222 Ha Penunjukan : 5.081 Ha SK.490/Menhut-II/2012; 5 September 2012 Persub No : S.427/Menhut-VII/2012; 26 September 2012	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.302/Menhut-II/2014 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
32	Papua	Peruntukan : 1.278.623 Ha Fungsi : 6.199.496 Ha Penunjukan : 48.160 Ha	Peruntukan : 376.385 Ha Fungsi : 5.736.830 Ha Penunjukan : 45.258 Ha SK.458/Menhut-II/2012; 15 Agustus 2012 Persub No : S. 409/Menhut-VII/2012; 11 September 2011	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menhut No. 891/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah TK I Irian Jaya. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
33	Papua Barat	Peruntukan : 979.452 Ha Fungsi : 1.032.759 Ha Penunjukan : 23.870 Ha	Peruntukan : 243.045 Ha Fungsi : 438.220 Ha Penunjukan : 23.934 Ha SK.710/Menhut-II/2014; 27 Agustus 2014 Persub No. S.406/Menhut-VII/2014; 18 September 2014	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 50.356 Ha.

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 31 Desember 2018



PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN



*Direktorat Penguatan
dan Penatagunaan Kawasan Hutan*

TABEL. III. 1. LUAS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Provinsi	SK	Tanggal	KONSERVASI			HL	HPT	HP	HPK	Luas Darat	Luas Darat dan Perairan	Luas Provinsi	Ket
				Perairan	Darat	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DI. Aceh	859/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2016	11 November 2016	0,00	1.057.628,00	1.057.628,00	1.794.350,00	145.384,00	551.073,00	15.378,00	3.563.813,00	3.563.813,00	5.795.600	
2	Sumatera Utara	579/Menhut-II/2014	24 Juni 2014	0,00	427.008,00	427.008,00	1.205.881,00	641.769,00	704.452,00	75.694,00	3.055.795,00	3.055.795,00	7.298.123	
3	Sumatera Barat	35/Menhut-II/2013	15 Januari 2013	37.164,00	769.775,00	806.939,00	791.671,00	233.211,00	360.608,00	187.629,00	2.342.894,00	2.380.057,00	4.201.289	
4	Riau	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016	07 Desember 2016	0,00	630.753,00	630.753,00	233.910,00	1.017.318,00	2.339.578,00	1.185.433,00	5.406.992,00	5.406.992,00	8.702.366	
5	Jambi	863/Menhut-II/2014	29 September 2014	0,00	685.471,00	685.471,00	179.588,00	258.285,00	963.792,00	11.399,00	2.098.535,00	2.098.535,00	5.005.816	
6	Sumatera Selatan	454/MenLHK/Sejen/PLA.2/6/2016 & 190/MenLHK/Sejen/PLA.0/4/2018	17 Juni 2016 & 20 April 2018	49.104,00	741.681,00	790.785,00	578.279,00	213.918,00	1.712.819,00	160.996,00	3.407.693,00	3.456.797,00	9.159.243	
7	Bengkulu	784/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	0,00	462.965,00	462.965,00	250.750,00	173.280,00	25.873,00	11.763,00	924.631,00	924.631,00	1.991.933	
8	Lampung	256/Kpts-II/2000	23 Agustus 2000	0,00	462.030,00	462.030,00	317.615,00	33.358,00	191.732,00	0,00	1.004.735,00	1.004.735,00	3.462.380	
9	Kep. Berbel	798/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	0,00	34.500,00	34.500,00	166.371,00	0,00	442.051,00	693,00	643.615,00	643.615,00	1.642.406	
10	Kepulauan Riau	76/MenLHK-II/2015 & 272/Menhk/Sejen/PLA.0/6/2018	06/03/2015 & 6 Juni 2018	0,00	4.734,73	4.734,73	97.362,65	118.832,99	78.830,62	82.071,11	381.832,10	381.832,10	820.172,00	
11	DKI Jakarta	220/Kpts-II/2000	02 Agustus 2000	108.000,00	272,34	108.272,34	44,76	0,00	158,35	0,00	475,45	108.475,45	66.401	
12	Jawa Barat	195/Kpts-II/2003	04 Juli 2003	0,00	132.180,00	132.180,00	291.306,00	190.152,00	202.965,00	0,00	816.603,00	816.603,00	3.537.776	
13	Jawa Tengah	359/Menhut-II/2004	01 Oktober 2004	110.117,00	16.413,00	126.530,00	84.430,00	183.930,00	362.360,00	0,00	647.133,00	757.250,00	3.298.069	
14	DI Yogyakarta	171/Kpts-II/2000	29 Juni 2000	0,00	910,34	910,34	2.057,90	0,00	13.851,28	0,00	16.819,52	16.819,52	313.315	
15	Jawa Timur	395/Menhut-II/2011	21 Juli 2011	3.506,00	230.126,00	233.632,00	344.742,00	0,00	782.772,00	0,00	1.357.640,00	1.357.640,00	4.779.975	
16	Banten	419/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	51.467,00	112.991,00	164.458,00	12.359,00	49.439,00	26.998,00	0,00	201.787,00	253.254,00	966.292	
17	Bali	433/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	3.415,00	22.876,59	26.293,59	95.766,06	6.719,26	1.907,10	0,00	127.271,01	130.686,01	578.006	
18	NTB	598/Menhut-II/2009 & 270/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017	02/10/2009 & 05/06/2017	11.121,00	167.913,00	179.034,00	430.485,00	286.700,00	150.740,00	0,00	1.033.838,00	1.046.959,00	1.857.232	
19	NTT	357/Menhk/Sejen/PLA.0/5/2016	11 Mei 2016	256.482,00	264.930,00	521.412,00	684.572,00	169.707,00	288.214,00	78.494,00	1.485.917,00	1.742.399,00	4.871.810	
20	Kalimantan Barat	733/Menhut-II/2014	02 September 2014	190.945,00	1.430.101,00	1.621.046,00	2.310.874,00	2.132.398,00	2.127.365,00	197.918,00	8.198.656,00	8.389.600,00	14.730.700	
21	Kalimantan Tengah	529/Menhut-II/2012	25 September 2012	22.542,00	1.608.286,00	1.630.828,00	1.346.066,00	3.317.461,00	3.881.817,00	2.543.535,00	12.697.165,00	12.719.707,00	15.356.450	
22	Kalimantan Selatan	435/Menhut-II/2009	23 Juli 2009	0,00	213.285,00	213.285,00	528.425,00	126.660,00	762.188,00	151.424,00	1.779.982,00	1.779.982,00	3.874.423	
23	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	718/Menhut-II/2014 & 278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017 & SK.254/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2018	23/07/2009 & 09/06/2017 & 30/05/2018	0,00	1.704.666,00	1.704.666,00	2.848.243,00	5.045.164,45	4.023.463,32	211.575,88	13.833.112,65	13.833.112,65	20.453.434	
24	Sulawesi Utara	734/Menhut-II/2014	02 September 2014	69.800,00	245.165,00	314.965,00	161.784,00	208.927,00	64.367,00	14.696,00	694.939,00	764.739,00	1.385.164	
25	Sulawesi Tengah	869/Menhut-II/2014	30 September 2014	340.119,00	648.374,00	988.493,00	1.276.087,00	1.390.971,00	401.814,00	217.322,00	3.934.588,00	4.274.687,00	6.184.129	
26	Sulawesi Selatan	434/Menhut-II/2009	23 Juli 2009	606.804,00	244.463,00	851.267,00	1.232.683,00	494.846,00	124.024,00	22.976,00	2.119.992,00	2.725.796,00	4.671.748	
27	Sulawesi Tenggara	465/Menhut-II/2011	09 Agustus 2011	1.504.160,00	282.924,00	1.787.084,00	1.081.489,00	466.854,00	401.581,00	93.571,00	2.326.419,00	3.830.579,00	3.806.770	
28	Gorontalo	325/Menhut-II/2010	25 Mei 2010	0,00	196.653,00	196.653,00	204.608,00	251.097,00	89.879,00	82.431,00	824.668,00	824.668,00	1.125.707	
29	Sulawesi Barat	862/Menhut-II/2014	29 September 2014	0,00	215.190,00	215.190,00	452.030,00	330.700,00	71.859,00	22.597,00	1.092.376,00	1.092.376,00	1.678.718	
30	Maluku	854/Menhut-II/2014	29 September 2014	9.208,00	420.330,00	429.538,00	627.256,00	894.258,00	643.699,00	1.324.866,00	3.910.409,00	3.919.617,00	4.691.403	
31	Maluku Utara	302/Menhut-II/2013	01 Mei 2013	0,00	218.499,00	218.499,00	584.068,00	666.851,00	481.730,00	564.082,00	2.515.220,00	2.515.220,00	3.198.250	
32	Papua Barat	783/Menhut-II/2014	22 September 2014	928.350,00	1.711.908,00	2.640.258,00	1.631.589,00	1.778.480,00	2.188.160,00	1.474.650,00	8.784.787,00	9.713.137,00	9.967.163	
33	Papua	782/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	1.019.017,00	6.736.267,00	7.755.284,00	7.815.283,00	5.961.240,00	4.739.327,00	4.116.365,00	29.368.492,00	30.387.499,00	31.903.605	
				5.321.321,00	22.101.271,00	27.422.592,00	29.661.015,37	26.787.910,70	29.202.047,67	12.847.548,99	120.599.794,73	125.921.113,73	191.357.868,00	

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2018

catatan :

- Luas kawasan hutan berfungsi didasarkannya pada lembar SK kawasan hutan yang di tentukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Luas Provinsi www.bps.go.id
- Luas APL dihitung berdasarkan data provinsi point 2 dikurangi dengan luas kawasan hutan daratan (dimungkinkan masih terdapat APL pada Kawasan Konservasi Perairan yang tidak terhitung)

TABEL III.2. PERKEMBANGAN PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN PARSIAL SID DESEMBER 2018

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		S/D Tahun 2018			
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	15400,00
1	Aceh	2	15.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15.400,00	2	15.400,00
2	Bali	13	1.059,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1.059,35	13	1.059,35
3	Banten	6	5.336,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5.336,78	6	5.336,78
4	Bengkulu	2	7,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7,12	2	7,12
5	DI. Yogyakarta	5	2.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.140,00	5	2.140,00
6	Gorontalo	2	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	55.000,00	2	55.000,00
7	Jambi	4	32.479,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	32.479,50	4	32.479,50
8	Jawa Barat	59	560.258,89	-	-	2	72,68	2	27,46	-	-	2	1.501,23	65	561.859,96	65	561.859,96
9	Jawa Tengah	16	355,75	-	-	3	179,93	2	238,94	-	-	-	-	21	774,62	21	774,62
10	Jawa Timur	8	905,44	-	-	3	703,06	4	95,53	-	-	-	-	15	1.704,02	15	1.704,02
11	Kalimantan Barat	22	1.121.215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1.121.215,00	22	1.121.215,00
12	Kalimantan Selatan	4	3.198,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.198,70	4	3.198,70
13	Kalimantan Tengah	1	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000,00	1	5.000,00
14	Kalimantan Timur	12	317.247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	317.247,00	12	317.247,00
15	Kep. Bangka Belitung	1	177,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	177,42	1	177,42
16	Kepulauan Riau	3	24.280,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24.280,50	3	24.280,50
17	Lampung	4	74.200,00	-	-	-	-	1	3.327,00	-	-	-	-	5	77.527,00	5	77.527,00
18	Maluku	3	115.734,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	115.734,46	3	115.734,46
19	Maluku Utara	1	1.475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.475,00	1	1.475,00
20	Papua	6	3.829.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.829.100,00	6	3.829.100,00
21	Papua Barat	5	1.615.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.615.000,00	5	1.615.000,00
22	Riau	2	8.027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.027,00	2	8.027,00
23	Sulawesi Barat	1	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	230,00	1	230,00
24	Sulawesi Selatan	10	780.282,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	780.282,70	10	780.282,70
25	Sulawesi Tengah	7	55.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	55.700,00	7	55.700,00
26	Sulawesi Tenggara	3	398.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	398.250,00	3	398.250,00
27	Sulawesi Utara	2	99.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	99.934,00	2	99.934,00
28	Sumatera Barat	2	39.927,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39.927,50	2	39.927,50
29	Sumatera Selatan	5	106.091,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	106.091,78	5	106.091,78
30	Sumatera Utara	5	48.025,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	480,00	6	48.505,50	6	48.505,50
JUMLAH		216	9.316.039,39	-	-	8	955,67	9	3.688,63	-	-	3	1.981,23	236	9.322.664,92	236	9.322.664,92

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2018

TABEL III.3. PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN SID DESEMBER 2018

NO.	PROVINSI	SID TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		SID TAHUN 2018	
		BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aceh	4.430,93	1.097,67	-	-	152,70	135,76	165,55	-	162,13	24,32	-	-	4.911,31	1.257,75
2	Sumatera Utara	7.840,46	1.662,00	-	221,54	205,45	118,57	556,35	-	425,70	-	-	-	9.027,96	2.002,11
3	Sumatera Barat	3.914,23	1.578,70	-	10,96	-	-	-	-	-	-	-	-	3.914,23	1.589,66
4	Riau	8.760,42	1.407,16	-	-	203,62	113,38	213,14	-	297,74	-	-	-	9.474,92	1.520,54
5	Jambi	3.625,07	764,51	103,27	35,66	-	-	3,44	-	1,56	3,85	-	-	3.733,34	804,02
6	Sumatera Selatan	4.513,52	1.044,58	-	-	98,24	-	202,00	-	76,00	32,00	-	-	4.889,76	1.076,58
7	Bengkulu	1.524,49	489,85	134,00	-	-	-	5,00	-	-	-	-	-	1.663,49	489,85
8	Lampung	3.176,39	25,01	62,27	-	34,36	-	-	-	21,00	0,00	-	-	3.294,02	25,01
9	Kep. Bangka Belitung	496,49	66,00	7,72	-	43,99	-	100,31	11,42	56,65	0,00	-	-	705,16	77,42
10	Kepulauan Riau	18,04	805,17	-	-	654,27	56,74	527,92	-	-	-	-	-	1.200,23	861,91
11	DKI Jakarta	44,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,00	0,00
12	Jawa Barat	19.847,56	2,84	174,22	-	167,53	14,43	23,54	-	-	-	-	-	20.212,85	17,27
13	Jawa Tengah	19.064,65	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30	-	-	19.064,65	2,30
14	D.I. Yogyakarta	203,51	-	72,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276,28	0,00
15	Jawa Timur	19.382,27	43,56	12,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.394,80	43,56
16	Banten	46,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,91	0,00
17	Bali	1.610,00	208,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.610,00	208,97
18	Nusa Tenggara Barat	4.806,47	856,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.806,47	856,16
19	Nusa Tenggara Timur	4.860,94	13,30	412,73	-	167,67	-	138,00	-	127,91	-	-	-	5.707,25	13,30
20	Kalimantan Barat	9.517,04	7.794,98	201,30	599,55	110,52	265,77	633,65	37,57	100,29	170,52	-	-	10.562,80	8.868,39
21	Kalimantan Tengah	3.424,91	3.054,12	210,82	250,07	334,17	364,03	288,64	87,45	765,66	-	-	-	5.024,20	3.755,67
22	Kalimantan Selatan	10.861,09	3.115,13	216,59	226,45	431,14	-	124,81	93,90	98,25	20,19	-	-	11.731,88	3.455,67
23	Kalimantan Timur	5.412,90	10.864,61	2.935,64	380,82	1.046,42	30,48	369,00	7,03	-	-	-	-	9.764,16	11.282,94
24	Sulawesi Utara	2.614,97	7.423,72	59,59	25,38	101,00	324,00	62,50	-	31,37	-	-	-	2.869,43	7.773,10
25	Sulawesi Tengah	10.589,49	6.345,69	545,32	190,99	288,86	77,94	238,00	-	312,59	-	-	-	11.974,26	6.614,62
26	Sulawesi Selatan	710,63	1.653,77	-	-	-	-	-	-	65,51	-	-	-	776,14	1.653,77
27	Sulawesi Tenggara	5.789,45	4.228,80	-	-	-	-	-	-	218,00	-	-	-	6.007,45	4.228,80
28	Gorontalo	5.634,05	993,73	230,01	13,87	134,58	5,93	132,22	4,87	22,74	-	-	-	6.153,60	1.018,40
29	Sulawesi Barat	739,07	127,55	55,87	1.099,26	-	105,12	118,91	-	105,24	-	-	-	1.019,09	1.331,93
30	Maluku	7.616,84	3.954,72	-	-	198,74	33,49	97,70	12,20	-	-	-	-	7.913,28	4.000,41
31	Maluku Utara	221,05	938,00	96,65	673,67	55,67	324,24	121,29	202,04	28,67	25,63	-	-	523,33	2.163,58
32	Papua Barat	1.043,53	1.626,62	300,43	1.233,23	199,73	341,75	167,85	-	29,01	22,06	-	-	1.740,55	3.223,66
33	Papua	11.705,70	11.153,54	123,75	536,81	87,06	200,45	90,88	-	99,30	-	-	-	12.106,69	11.890,80
JUMLAH		184.047,07	73.340,46	5.955,68	5.498,26	4.715,71	2.512,08	4.380,70	456,49	3.045,33	300,87	0,00	0,00	202.144,49	82.108,16

Cat: (-) tidak ada data

selama tahun 2018 tidak ada progres tata batas kawasan hutan, dikarenakan ada program TORA sampai dengan desember 2018 BPKH belum ada realisasi, karena TORA nya baru sampai tahap sosialisasi dan verifikasi

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d Desember 2018

TABEL III.4. PERKEMBANGAN PENGESAHAN BERITA ACARA TATA BATAS S/D DESEMBER 2018

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		S/D TAHUN 2018	
		BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM
1	Aceh	3	5.807,32	-	-	-	-	18	248,73	6	77,80	-	-	15	95
2	Sumatera Utara	83	13.038,73	5	180,03	-	-	12	112,37	20	1.096,28	-	-	120	14.427,41
3	Sumatera Barat	129	4.912,77	43	1.437,85	-	-	5	98,00	2	29,53	-	-	179	6.478,15
4	Riau	119	11.315,24	3	274,10	-	-	5	411,05	3	122,10	-	-	130	12.122,49
5	Jambi	87	5.405,58	3	129,75	4	21.110,52	3	13,77	-	-	-	-	97	26.659,62
6	Sumatera Selatan	191	7.408,27	2	137,00	-	-	4	201,78	2	39,33	-	-	199	7.786,38
7	Bengkulu	119	2.457,14	1	9,90	-	-	-	-	-	-	-	-	120	2.467,04
8	Lampung	54	4.164,59	26	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80	4.166,59
9	Kep. Bangka Belitung	38	475,11	2	72,90	-	-	11	94,00	11	83,35	-	-	62	725,36
10	Kepulauan Riau	7	90,78	1	25,01	-	-	-	-	1	644,31	-	-	9	760,10
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	121	449,78	3	63,38	3	7,28	8	56,01	6	194,95	-	-	141	771,41
13	Jawa Tengah	54	78,04	3	7,54	-	-	1	15,01	3	4,11	-	-	61	104,70
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	31	508,28	1	1,95	3	24,43	1	3,41	6	198,88	-	-	42	736,94
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	39	1.616,40	1	9,40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1.625,80
18	Nusa Tenggara Barat	97	5.337,11	3	28,69	-	-	-	-	-	-	-	-	100	5.365,80
19	Nusa Tenggara Timur	101	7.219,37	-	-	2	28,45	15	185,68	18	400,06	-	-	136	7.833,56
20	Kalimantan Barat	233	13.588,74	35	794,76	22	1.108,58	5	296,87	2	222,01	-	-	297	16.010,96
21	Kalimantan Tengah	54	4.126,67	4	180,27	7	297,59	21	1.063,00	3	197,89	-	-	89	5.865,42
22	Kalimantan Selatan	57	3.578,46	9	283,31	11	475,55	8	371,70	4	169,14	-	-	89	4.878,16
23	Kalimantan Timur	256	16.767,16	32	1.311,38	24	1.321,40	-	-	1	9,35	-	-	313	19.409,29
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	67	6.851,59	6	101,44	-	-	8	179,89	-	-	-	-	81	7.132,92
26	Sulawesi Tengah	200	13.698,99	63	1.667,61	9	219,73	-	-	-	-	-	-	272	15.586,33
27	Sulawesi Selatan	140	10.457,65	-	-	-	-	2	32,66	-	-	-	-	142	10.490,31
28	Sulawesi Tenggara	124	11.240,36	2	103,52	4	299,85	-	-	-	-	-	-	130	11.643,73
29	Gorontalo	4	210,40	39	1.234,87	13	134,39	3	140,52	-	-	-	-	59	1.720,18
30	Sulawesi Barat	-	-	6	255,75	5	1.059,57	1	91,32	-	-	-	-	12	1.406,64
31	Maluku	164	9.278,69	26	411,18	-	-	-	-	30	557,99	-	-	220	10.247,86
32	Maluku Utara	7	252,62	36	1.253,28	-	-	-	-	51	896,50	-	-	94	2.402,39
33	Papua Barat	174	15.120,95	17	1.126,40	-	-	1	14,89	-	-	-	-	192	16.262,25
34	Papua	20	3.037,12	90	7.795,19	-	-	21	1.200,75	-	-	-	-	131	12.033,06
	JUMLAH	2.841	178.493,91	462	18.898,47	107	26.087,34	153	4.831,38	169	4.943,59	-	-	3.732	233.254,69

Cat: (-) tidak ada data

Wilayah Sulawesi dan Papua tidak ada proses pengesahan BATB

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2018

TABEL III.5 PERKEEMBANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN

No	Provinsi	TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		SID TAHUN 2018			
		UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)		
1	2			5	877.678,37	1	5.326,23	7	-	-	-	11	-	13	14
1	Aceh	5	877.678,37	1	5.326,23	-	-	-	-	-	-	-	-	15	919.633,15
2	Bali	14	128.545,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	138.764,60
3	Bangka Belitung	36	210.919,03	-	-	4	3.035,84	-	-	-	-	-	-	87	541.821,09
4	Banten	5	112.385,41	-	-	9	81.494,91	-	-	-	-	-	-	20	199.704,43
5	Bengkulu	16	65.964,14	-	-	-	-	-	-	1	2.724,46	-	-	54	705.347,88
6	DI. Yogyakarta	8	8.577,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8.860,94
7	DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	107.856,20
8	Gorontalo	15	699.183,29	8	16.771,84	2	29.515,63	-	-	-	-	-	-	31	774.116,56
9	Jambi	15	274.056,89	5	192.026,59	14	553.278,31	1	18.140,32	-	-	-	-	47	1.731.671,52
10	Jawa Barat	62	525.118,52	4	300,84	8	321.664,06	25	69.575,81	-	-	-	-	139	951.184,97
11	Jawa Tengah	71	328.097,46	4	616,95	33	289.472,78	4	68,19	-	-	-	-	138	787.303,30
12	Jawa Timur	22	153.351,66	4	4.806,971,79	44	471.277,10	10	54.373,83	-	-	-	-	144	943.328,64
13	Kalimantan Barat	71	4.806,971,79	17	119.015,98	4	74.549,16	-	-	8	46.065,56	-	-	163	6.140.953,18
14	Kalimantan Selatan	22	1.127.249,07	-	-	1	57.541,50	-	-	-	-	-	-	42	1.536.627,98
15	Kalimantan Tengah	11	3.079.176,70	1	3.970,20	4	334.471,35	3	40.543,91	4	315.587,35	-	-	30	4.094.155,81
16	Kalimantan Timur	24	2.176.348,01	7	118.733,10	2	130.089,68	-	-	-	-	-	-	83	3.275.556,64
17	Kalimantan Utara	12	7.030.817,72	4	182.752,03	3	793.467,70	2	73.792,49	-	-	-	-	21	8.100.991,16
18	Kep. Riau	11	37.424,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	104.105,77
19	Lampung	2	2.424,58	3	250.438,98	2	25.031,79	1	28.343,91	-	-	-	-	29	603.237,44
20	Maluku	38	2.144.573,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	2.662.823,09
21	Maluku Utara	31	424.194,21	1	103.253,90	-	-	-	-	-	-	-	-	56	1.346.741,83
22	Nusa Tenggara Barat	26	740.860,78	-	-	4	8.584,31	2	19.759,95	-	-	-	-	66	1.184.973,50
23	Nusa Tenggara Timur	25	150.193,26	5	145.846,63	44	171.207,19	2	237.178,06	-	-	-	-	135	1.028.055,58
24	Papua	58	21.181.295,05	-	-	6	1.860.981,60	-	-	-	-	-	-	92	24.685.430,50
25	Papua Barat	18	5.313.837,47	1	244.980,05	2	842.556,11	-	-	-	-	-	-	39	8.114.305,04
26	Riau	15	690.069,88	4	855.740,95	-	-	-	-	-	-	-	-	47	2.053.585,97
27	Sulawesi Barat	8	325.912,29	5	359.889,95	3	312.616,07	-	-	-	-	-	-	19	1.061.994,40
28	Sulawesi Selatan	17	1.308.052,01	-	-	3	71.190,61	-	-	-	-	-	-	68	2.035.298,50
29	Sulawesi Tengah	31	1.689.118,99	13	480.071,45	-	-	-	-	-	-	-	-	63	2.773.097,35
30	Sulawesi Tenggara	19	950.772,36	8	535.336,16	-	-	-	-	-	-	-	-	46	3.263.657,61
31	Sulawesi Utara	41	243.541,31	1	208,81	5	118.948,44	-	-	-	-	-	-	63	406.237,25
32	Sumatera Barat	31	926.278,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	1.413.858,94
33	Sumatera Selatan	32	2.314.165,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	2.998.571,42
34	Sumatera Utara	28	1.688.614,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	1.725.266,43
TOTAL		840	61.695.771,68	92	3.615.280,63	197	6.550.974,13	54	542.667,37	13,00	364.377,37	2,061	88.419.118,65		

Catatan : Apabila terdapat ketidak sesuaian luas dan jumlah SK yang tercantum dalam matrik, maka perbaikan/koreksi mengacu pada fisik luas yang tercantum dalam SK.

Sampai dengan Desember 2018 terdapat perbaikan database pada tahun lama yakni belum masuk tnd tahun ybs, sehingga diakumulasikan pada Bulan Desember 2018

Sumber: Direktorat Pengukutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2018

TABEL III.6. PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HA DAN IUPHHK-HT S/D DESEMBER 2018

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013 (km)		TAHUN 2014 (km)		TAHUN 2015 (Km)		TAHUN 2016 (Km)		TAHUN 2017 (Km)		TAHUN 2018 (Km)		S/D TAHUN 2018 (Km)	
		HA	HT	HA	HT	HA	HT	HA	HT	HA	HT	HA	HT	HA	HT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aceh	2.366,97	1.066,00	-	-	-	-	107,15	-	-	-	-	-	2.474,12	1.066,00
2	Sumatera Utara	1.973,28	1.733,00	-	99,728	-	-	53,50	203,19	-	-	-	-	2.026,78	2.035,92
3	Sumatera Barat	1.698,74	2.189,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.698,74	2.189,16
4	Riau	7.648,64	1.672,71	-	457,37	-	84,93	-	1.145,03	-	-	-	-	7.648,64	3.360,04
5	Jambi	3.161,87	1.299,58	-	-	-	69,46	-	-	-	-	-	-	3.161,87	1.369,04
6	Sumatera Selatan	2.554,95	1.425,97	-	510,31	-	140,94	-	113,383	-	-	-	-	2.554,95	2.190,60
7	Bengkulu	356,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356,98	-
8	Lampung	52,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,35	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	457,78	231,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457,78	231,47
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	9.487,95	-	141,92	260,97	-	130,84	148,05	479,38	294,87	1.227,30	-	-	10.072,79	2.098,49
21	Kalimantan Timur	13.578,12	2.483,54	254,98	81,80	240,41	-	410,49	316,37	841,76	519,78	-	-	15.325,76	3.411,49
22	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	115,13	-	-	-	115,13	-
23	Kalimantan Selatan	1.559,10	466,55	-	115,13	-	-	285,69	-	815,86	115,13	-	-	2.660,65	696,81
24	Kalimantan Tengah	14.202,92	417,36	314,22	-	99,00	9,79	90,12	154,66	90,12	403,46	-	-	14.796,38	985,27
25	Sulawesi Utara	1.531,72	-	-	-	82,06	-	-	-	-	-	-	-	1.613,78	-
26	Sulawesi Tengah	3.852,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.852,04	-
27	Sulawesi Selatan	1.188,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.188,61	-
28	Sulawesi Tenggara	920,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920,05	-
29	Gorontalo	0,00	-	-	-	-	101,32	-	-	-	56,39	-	-	-	157,71
30	Sulawesi Barat	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	7.275,38	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.275,38	162,00
32	Maluku Utara	246,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,47	-
33	Papua Barat	11.456,82	-	-	-	-	-	161,28	-	-	-	-	-	11.618,10	-
34	Papua	114,49	-	-	-	-	-	134,12	-	-	-	-	-	248,61	-
	Jumlah	85.685,23	13.157,34	711,12	1.525,31	421,47	537,28	1.390,40	2.412,02	2.157,74	2.322,06	-	-	90.365,96	19.954,01

Cat: (-) data tidak ada

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2018



PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN



*Direktorat Pengukuhan
dan Penatagunaan Kawasan Hutan*

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

1). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) MENJADI KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2013 (ha)	TAHUN 2013 (ha)	TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	SID TAHUN 2018 (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	70.755	-	-	-	-	-	-	70.755,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	40.390	-	-	-	-	-	-	40.390,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	32.686	-	-	-	-	-	-	32.686,70
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	11.076	-	-	-	-	-	-	11.075,56
15	D.I. Yogyakarta	1.001	-	-	-	-	-	-	1.000,66
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3.155	-	-	-	-	-	-	3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	6.514,95	6.514,95
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	10.659	-	-	-	-	-	-	10.659,00
28	Sulawesi Selatan	22.063	-	-	-	-	-	-	22.063,10
29	Sulawesi Tenggara	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000,00
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	153.575	-	-	-	-	-	-	153.575,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		349.359,02	-	-	-	-	-	6.514,95	355.873,97

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatausahaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

2). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN LINDUNG (HL) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		SID TAHUN 2018	
		(ha)	3	(ha)	4	(ha)	5	(ha)	6	(ha)	7	(ha)	8	(ha)	9
1	NAD	2.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.725,00
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	167,40	-	-	-	-	-	-	167,40
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	6.351,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.351,22
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583,00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,00	-	102,00
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	5.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.170,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	1.942,00	-	-	-	-	17,30	-	-	-	-	-	1.959,30
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2.990,00	-	-	-	-	-	165,00	-	-	-	-	-	-	3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	8.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.750,00
22	Kalimantan Timur	2.460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.460,00
23	Kalimantan Selatan	11.926,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.926,54
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	295,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,40
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	83.185,00	-	-	-	-	83.185,00
JUMLAH		40.955,76	2.237,40	-	-	-	-	349,70	102,00	83.188,00	-	-	-	126.829,86	

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

3). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013 (ha)	TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	S/D TAHUN 2018 (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	20.290	-	-	-	-	-	20.290,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	55,00	-	-	-	-	55,00
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	2.958,00	-	-	2.958,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	48.021	-	-	-	-	-	48.021,12
21	Kalimantan Tengah	53.125	-	-	-	-	-	53.125,00
22	Kalimantan Timur	59.285	-	-	-	-	-	59.285,00
23	Kalimantan Selatan	56.007	-	-	-	-	-	56.007,21
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	959,71	301	1.260,71
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	1.963	-	-	-	-	-	1.962,75
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	6.550	-	-	-	-	-	6.549,76
33	Papua	-	-	-	-	44.599,00	-	44.599,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	1.137,00	-	1.137,00
	JUMLAH	245.240,84	55,00	-	2.958,00	46.695,71	301,00	295.250,55

Keterangan :

- : Nilai/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

4). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	S/D TAHUN 2018
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	6.163,75	-	-	-	-	-	6.163,75
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	137.376,00	-	-	-	-	-	137.376,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	20.700,00	-	-	-	-	-	20.700,00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	41.025,56	-	-	-	-	-	41.025,56
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	649,00	-	-	649,00
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	193,00	-	-	-	-	-	193,00
28	Sulawesi Selatan	145,00	-	-	-	-	-	145,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	7.650,00	-	-	-	-	-	7.650,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		213.253,31	-	-	649,00	-	-	213.902,31

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

5) PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	SID TAHUN 2018
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	14.747,00	-	-	-	-	-	14.747,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	13.388,00	-	-	-	-	-	13.388,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	1.218,43	-	-	-	1.218,43
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	234,50	-	-	-	-	-	234,50
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3.200,00	-	-	-	-	-	3.200,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	1.030,00	-	-	-	-	-	1.030,00
JUMLAH		32.599,50	-	1.218,43	-	-	-	33.817,93

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

6). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013 (ha)	TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	S/D TAHUN 2018 (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	213.221,00	-	-	-	-	-	213.221,00
3	Sumatera Barat	11.148,00	-	-	-	-	-	11.148,00
4	Riau	194.440,00	-	-	-	-	-	194.440,00
5	Kepulauan Riau	342,82	-	-	-	-	-	342,82
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2.710,00	-	-	-	-	-	2.710,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	20.160,00	-	-	-	-	-	20.160,00
22	Kalimantan Timur	77.010,00	-	-	-	-	-	77.010,00
23	Kalimantan Selatan	31.790,00	-	-	-	-	-	31.790,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		550.821,82	-	-	-	-	-	550.821,82

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

7). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013 (ha)	TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	S/D TAHUN 2018 (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	14.780,00	-	-	-	-	-	14.780,00
5	Kepulauan Riau	12.950,00	-	-	-	-	-	12.950,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	133.075,00	-	-	-	-	-	133.075,00
22	Kalimantan Timur	31.685,00	-	-	-	-	-	31.685,00
23	Kalimantan Selatan	5.900,00	-	-	-	-	-	5.900,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	198.390,00	-	-	-	-	-	198.390,00

Keterangan :

- : Nilai/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

8). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013 (ha)	TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	SID TAHUN 2018 (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	INAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	43.100,00	-	-	-	-	-	43.100,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	3.242,00	-	-	3.242,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	25.560,00	-	-	-	-	-	25.560,00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	24.804,80	-	-	-	-	-	24.804,80
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	617,00	-	-	-	-	-	617,00
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	352,62	-	-	-	-	-	352,62
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	600.250,00	-	-	-	-	-	600.250,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	11.759,00	-	-	-	-	-	11.759,00
28	Sulawesi Selatan	10.355,00	-	-	-	-	-	10.355,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	6.075,00	-	-	-	-	-	6.075,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		722.873	-	-	3.242,00	-	-	726.115,42

Keterangan :

- : Nilai/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

9). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013 (ha)	TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	S/D TAHUN 2018 (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	11.595,00	-	-	-	-	-	11.595,00
23	Kalimantan Selatan	66.000,00	-	-	-	-	-	66.000,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	77.595,00	-	-	-	-	-	77.595,00

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatausahaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

10). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013 (ha)	TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	S/D TAHUN 2018 (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	59.120,00	-	-	-	-	-	59.120,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	60.320,00	-	-	-	-	-	60.320,00

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

11). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013 (ha)	TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	S/D TAHUN 2018 (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	800,00	-	-	-	-	-	800,00
3	Sumatera Barat	9.840,00	-	-	-	-	-	9.840,00
4	Riau	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	29.924,85	-	-	-	-	-	29.924,85
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	261,00	-	-	76.532,00	-	-	76.793,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	6.303,00	-	7.730,57	-	-	-	14.033,57
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	64,00	-	-	-	-	-	64,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3.915,00	-	-	-	-	-	3.915,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	2.436,00	-	-	-	-	-	2.436,00
JUMLAH		59.543,85	-	7.730,57	76.532,00	-	-	143.806,42

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

12). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013 (ha)	TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	S/D TAHUN 2018 (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	5.920,00	-	-	-	-	-	5.920,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	3.297,00	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	58.450,00	-	-	-	-	-	61.747,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	3.221,00	-	-	-	-	-	3.221,00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		67.591,00	-	-	3.297,00	-	-	70.888,00

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

13). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013 (ha)	TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	S/D TAHUN 2018 (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	12.150,00	-	-	-	-	-	12.150,00
4	Riau	49.700,00	-	-	-	-	-	49.700,00
5	Kepulauan Riau	3.902,00	-	-	-	-	-	3.902,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	1.820,00	-	-	-	-	-	1.820,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	18.445,00	-	-	-	-	-	18.445,00
30	Sulawesi Barat	9.125,00	-	-	-	-	-	9.125,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	2.856,00	-	-	-	-	-	2.856,00
JUMLAH		97.998,00	-	-	-	-	-	97.998,00

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

14). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		
		(ha)	3	(ha)	4	(ha)	5	(ha)	6	(ha)	7	(ha)	8	(ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00
3	Sumatera Barat	25.381,00	4.105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.486,00
4	Riau	133.238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.238,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	15.269,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.269,75
21	Kalimantan Tengah	84.948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.948,00
22	Kalimantan Timur	53.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.760,00
23	Kalimantan Selatan	38.630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.630,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	17.555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.555,00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	2.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.860,00
33	Papua	234.730,00	-	-	-	89.951,00	-	-	-	-	-	-	-	324.681,00
34	Papua Barat	4.076,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.076,00
JUMLAH		610.627,75	4.105,00	4.105,00	89.951,00	89.951,00	89.951,00	89.951,00	89.951,00	89.951,00	89.951,00	89.951,00	89.951,00	704.663,75

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatausahaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

15). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	S/D TAHUN 2018
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	21.750,00	-	-	-	-	-	21.750,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	79,75	-	-	-	-	-	79,75
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	49.400,00	-	-	-	-	-	49.400,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	6.572,00	-	-	-	6.572,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		71.229,75	-	6.572,00	-	-	-	77.801,75

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatausahaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

16). PERKEMBANGAN MUTASI ANTAR KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013 (ha)	TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	S/D TAHUN 2018 (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	5.688,65	-	-	-	-	60,94	5.749,59
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	28.238,00	-	-	28.238,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	27.200,00	-	-	-	425,50	-	27.625,50
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	14.295,75	-	-	-	-	4.382,00	18.677,75
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	6,50	-	-	-	-	-	6,50
15	D.I. Yogyakarta	283,58	-	-	-	-	-	283,58
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	71.645,64	-	-	-	71.645,64
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	300.040,00	-	-	-	-	-	300.040,00
22	Kalimantan Timur	61.850,00	-	-	-	-	-	61.850,00
23	Kalimantan Selatan	7.563,60	-	-	-	-	-	7.563,60
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	24.669,00	-	-	-	2.605,63	-	27.274,63
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	15.381,90	-	-	-	-	-	15.381,90
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	15,00	-	-	15,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		456.978,98		71.645,64	28.253,00	3.031,13	4.442,94	564.351,69

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatausahaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

17). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	S/D TAHUN 2018
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	490,00	-	-	-	-	-	490,00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	4.158,00	-	-	-	4.158,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	27.594,89	-	745,00	-	-	-	28.339,89
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		28.084,89	-	745,00	4.158,00	-	-	32.987,89

Keterangan :

- : Nilai/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatausahaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

18). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONSERVASI (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013 (ha)	TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	S/D TAHUN 2018 (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	169,95	-	-	-	-	169,95
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	25,00	-	-	-	-	-	25,00
23	Kalimantan Selatan	465,00	-	-	-	-	-	465,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		490,00	169,95	-	-	-	-	659,95

Keterangan :

- : Nilai/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatausahaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

19). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	S/D TAHUN 2018
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	3.738,00	-	-	3.738,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	285,55	-	285,55
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	3.738,00	285,55	-	4.023,55

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatausahaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

20). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013 (ha)	TAHUN 2014 (ha)	TAHUN 2015 (ha)	TAHUN 2016 (ha)	TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	S/D TAHUN 2018 (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	9.477,00	-	-	9.477,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	341,55	-	341,55
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH				9.477,00	341,55		9.818,55

Keterangan :

- : Nilai/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatausahaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

21). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) MENJADI HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	S/D TAHUN 2018
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	386,50	-	386,50
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	103,00	-	103,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	271,00	-	271,00
JUMLAH		-	-	-	-	760,50	-	760,50

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.2. PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN)

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		SID TAHUN 2018	
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16
1	Aceh	12	39.376,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	39.376,65
2	Sumatera Utara	12	28.054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	28.054,00
3	Sumatera Barat	10	17.433,85	-	-	-	900,75	-	-	-	-	-	-	11	18.334,60
4	Riau	12	68.812,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	68.812,98
5	Jambi	14	78.412,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	78.412,53
6	Sumatera Selatan	33	122.140,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	122.140,80
7	Bengkulu	5	14.327,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14.327,45
8	Lampung	16	134.147,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	134.147,20
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	2	7.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.530,00
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2	2.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.950,00
19	Nusa Tenggara Timur	2	1.137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.137,00
20	Kalimantan Barat	17	28.804,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	28.804,72
21	Kalimantan Tengah	33	70.778,17	1	609,70	-	-	-	-	-	-	-	-	34	71.387,87
22	Kalimantan Selatan	9	31.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	31.916,00
23	Kalimantan Timur	7	36.600,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	36.600,08
24	Kalimantan Utara	2	3.291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.291,00
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	18	21.558,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	21.558,15
27	Sulawesi Selatan	6	4.015,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.015,35
28	Sulawesi Tenggara	21	37.035,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	37.035,71
29	Gorontalo	3	5.089,56	-	-	-	-	1	571,74	-	-	-	-	4	5.661,30
30	Sulawesi Barat	2	2.486,00	-	-	-	-	1	1244,78	-	-	-	-	3	3.730,78
31	Maluku	3	5.664,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.664,58
32	Maluku Utara	11	19.654,14	-	-	-	-	1	1057,16	-	-	-	-	12	20.711,30
33	Papua	15	92.303,95	1	32,75	-	-	-	-	1	195,76	-	-	17	92.532,46
34	Papua Barat	8	16.397,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16.397,74
JUMLAH		275	889.917,61	2	642,45	4	3.774,43	1	195,76	1	195,76	1	195,76	282	894.530,25

Sumber : Direktorat Pengkukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

Keterangan

- : Nilai/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.3. PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK NON KEHUTANAN LAINNYA (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN)

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		SID TAHUN 2018	
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aceh	58	265.743,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	265.743,70
2	Sumatera Utara	28	143.194,23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	386,72	29	143.580,95
3	Sumatera Barat	26	157.956,37	1	6.429,52	-	-	1	5.370,25	-	-	-	-	28	169.756,14
4	Riau	135	1.526.981,50	2	8.061,60	1	3.393,00	1	4629,40	-	-	-	-	139	1.543.065,50
5	Jambi	43	349.236,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	349.236,98
6	Sumatera Selatan	40	342.816,64	4	16.821,10	-	-	2	5.259,85	2	904,38	1	65,18	49	365.867,15
7	Bengkulu	11	57.581,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	57.581,25
8	Lampung	7	59.959,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	59.959,45
9	Kep. Bangka Belitung	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	8	55.333,03	1	9.694,84	-	-	-	-	-	-	-	-	9	65.027,87
11	DKI Jakarta	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3	846,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	846,86
19	Nusa Tenggara Timur	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	21	256.539,54	3	14.732,43	2	5.427,30	-	-	-	-	-	-	26	278.699,07
21	Kalimantan Tengah	77	807.580,60	31	187.734,45	12	65.546,05	9	32.151,29	14	65.183,77	6	16.948,48	149	1.175.144,64
22	Kalimantan Selatan	18	214.204,83	1	1454,23	-	-	-	-	1	7.231,96	2	2.716,88	22	225.607,90
23	Kalimantan Timur	49	417.594,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	417.594,56
24	Kalimantan Utara	10	111.090,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	111.090,13
25	Sulawesi Utara	1	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000,00
26	Sulawesi Tengah	9	78.532,90	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.964,00	10	88.496,90
27	Sulawesi Selatan	5	5.452,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.452,64
28	Sulawesi Tenggara	3	20.784,20	-	-	-	-	1	4.003,45	-	-	2	17.820,40	6	42.608,05
29	Gorontalo	5	53.966,68	1	8.863,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	62.829,68
30	Sulawesi Barat	10	103.776,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	103.776,71
31	Maluku	12	12.657,74	1	386,33	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13.044,07
32	Maluku Utara	10	48.544,94	1	11.404,20	-	-	-	-	-	-	-	-	11	59.949,14
33	Papua	28	745.768,04	9	192.850,49	-	-	1	12.245,80	5	102.150,14	1	28.817,42	44	1.081.831,89
34	Papua Barat	13	237.292,01	6	115.460,33	2	31.917,40	-	-	3	57.600,86	-	-	24	442.270,60
JUMLAH		630*	6.077.435,53	61*	573.892,52	17*	106.283,75	15*	63.660,04	25*	233.071,11	14*	76.719,08	762*	7.131.062,03

Keterangan :

- : Nilai/Tidak ada kegiatan

*) : Perubahan terjadi karena ada hasil pencermatan proses TMKH dan Pelepasan Kawasan Hutan (termasuk proses pelepasan sesuai mekanisme PP 60 Tahun 2012 dan Pasal 51 PP 104 Tahun 2015)

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018

TABEL IV.4. PERKEMBANGAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2013				TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018				SID TAHUN 2018				
		Tanah Masuk Unit	Tanah Keluar Unit	Tanah Masuk Luas (ha)	Tanah Keluar Luas (ha)	Tanah Masuk Unit	Tanah Keluar Unit	Tanah Masuk Luas (ha)	Tanah Keluar Luas (ha)	Tanah Masuk Unit	Tanah Keluar Unit	Tanah Masuk Luas (ha)	Tanah Keluar Luas (ha)	Tanah Masuk Unit	Tanah Keluar Unit	Tanah Masuk Luas (ha)	Tanah Keluar Luas (ha)	Tanah Masuk Unit	Tanah Keluar Unit	Tanah Masuk Luas (ha)	Tanah Keluar Luas (ha)	Tanah Masuk Unit	Tanah Keluar Unit	Tanah Masuk Luas (ha)	Tanah Keluar Luas (ha)	Tanah Masuk Unit	Tanah Keluar Unit	Tanah Masuk Luas (ha)	Tanah Keluar Luas (ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sumatera Utara	1	277	1	271	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.571,00	1	12.781,10	1	480	1	480,11	-	-	-	-	3	14.328,30	3	13.532,31	
3	Sumatera Barat	1	13414	1	13414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.414,00	1	13.414,00	
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4200	1	1800	-	-	-	-	1	4.200,00	1	1.800,00	
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Lampung	1	90	1	30	1	1.373,67	-	-	1	1.373,67	1	1.308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.837,34	2	1.338,00	
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kepulauan Riau	1	851	1	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	850,50	1	119,60	
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Jawa Barat	9	5158	9	1016	1	110,80	1	110,79	1	10,00	1	10,28	-	-	-	-	1	90,40	1	45,04	1	8,10	1	7,75	13	5.377,38	13	1.189,64	
13	Jawa Tengah	6	234	5	65	1	127,82	1	56,85	-	-	-	-	1	177,80	1	163,90	-	-	-	-	-	-	-	-	8	540,02	7	285,79	
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Jawa Timur	23	1773	22	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	79,52	4	61,17	3	10,980	3	10,814	2	67,07	2	33,45	32	1.930,64	31	1.257,91
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Bali	15	103	15	76	-	-	-	-	1	84,14	1	62,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	187,14	16	138,14	
18	NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	NTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Kalimantan Selatan	2	1198	1	579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.198,00	1	578,80	
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	59	23.098,35	56	16.722,81	3	1.612,29	2	167,64	3	1.467,81	3	1.380,42	6	13.828,32	6	13.006,17	6*	4.781,38	6*	2.335,96	3	75,17	3	41,19	80	44.863,32	76	33.654,19	

Ket:

TM : Tanah Masuk / Compensated area for forest

TK : Tanah Keluar / Converted forest area for non forest

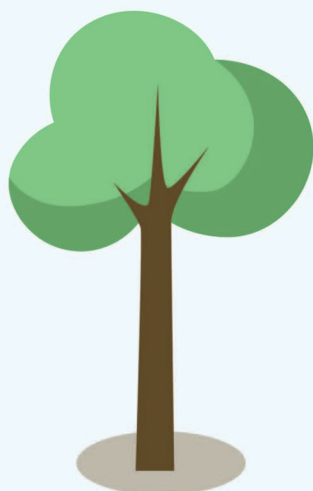
- : Nilai/Tidak ada kegiatan

*) : Perubahan terjadi karena ada hasil pencermatan proses TM/TK dan Pelepasan Kawasan Hutan (termasuk proses pelepasan sesuai mekanisme PP 60 Tahun 2012 dan Pasal 51 PP 104 Tahun 2015)

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2018



PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)



*Direktorat Rencana,
Penggunaan dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan*

TABEL V.1 PERKEMBANGAN PENETAPAN WILAYAH KPH (KPHP DAN KPHL)

NO	PROVINSI	TAHAPAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	TAHUN																	
					SID 2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018					
					Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1.	Aceh	1. Rancang Bangun*) 2. Arah-an Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	S.1737/VII-WP3H/2013 SK.932/Menhut-II/2014	31 Desember 2013 31 Desember 2014	0 0 0 0	- - - -	6 2.544,205															
2.	Sumatera Utara	1. Rancang Bangun*) 2. Arah-an Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK. 102/Menhut-II/2010	5 Maret 2010	35 33 33	3.202.990,00 3.204.780,00 3.196.381,00																
3.	Sumatera Barat	1. Rancang Bangun*) 2. Arah-an Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.798/Menhut-VIII/2009	7 Desember 2009	0 9 9 11	- 1.681.204,00 1.681.204,00 1.679.564,00																
4.	Riau	1. Rancang Bangun 2. Arah-an Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	S.632/VII-WP3H/2010	15 September 2010	38 30 0 0	3.634.974,00 3.661.304,87 - -																
5.	Kepulauan Riau	1. Rancang Bangun 2. Arah-an Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	S.257/VII-WP3H/2010 S22/969/set SK.452/Menhk/Sejen/PLA.0/6/20116	6 Mei 2010 30 September 2015 17 Juni 2016	0 6 0 0	- 259.617,00 -				6	281.383,67											
6.	Jambi	1. Rancang Bangun 2. Arah-an Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK. 77/Menhut-VIII/2010	10 Februari 2010	18 17 17 17	1.503.320,00 1.444.198,00 1.461.000,00 1.458.934,00																
7.	Bengkulu	1. Rancang Bangun*) 2. Arah-an Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK. 91/Menhut-VIII/2010	19 Februari 2010	0 5 7	- 462.734,00 481.195,00																
8.	Bangka Belitung	1. Rancang Bangun*) 2. Arah-an Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK. 797/Menhut-VIII/2009	7 Desember 2009	0 13 13	- 628.165,00 -																
9.	Sumatera Selatan	1. Rancang Bangun*) 2. Arah-an Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.76/Menhut-II/2010	10 Februari 2010	0 20 24 24	- 2.601.689,00 2.433.934,00 2.558.407,00																
10.	Lampung	1. Rancang Bangun*) 2. Arah-an Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK. 68/Menhut-II/2010	28 Januari 2010	0 12 16 16	- 501.549,00 542.704,80 518.913,00																
11.	DI. Yogyakarta	1. Rancang Bangun 2. Arah-an Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK. 439/Menhut-II/2007	13 Desember 2007	0 0 1 1	- - 16.358,60 16.358,60																

NO	PROVINSI	TAHAPAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	TAHUN														
					SID 2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		
					Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	
12.	Bali	1. Rancang Bangun*)																	
		2. Arahlan Pencadangan																	
		3. Usulan Penetapan		106.427,00															
		4. Penetapan	SK. 800/Menhut-II/2009	7 Desember 2009															
13.	Nusa Tenggara Barat	1. Rancang Bangun*)																	
		2. Arahlan Pencadangan		908.834,00															
		3. Usulan Penetapan		903.816,30															
		4. Penetapan	SK. 337/Menhut-VII/2009	15 Juni 2009															
14.	Nusa Tenggara Timur	1. Rancang Bangun		1.240.787,00															
		2. Arahlan Pencadangan		1.240.787,00															
		3. Usulan Penetapan		1.240.787,00															
		4. Penetapan	SK.664/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017	28 November 2017												22	1.132.925		
15.	Kalimantan Barat	1. Rancang Bangun*)																	
		2. Arahlan Pencadangan		6.966.136,00															
		3. Usulan Penetapan		6.966.136,00															
		4. Penetapan	SK. 67/Menhut-II/2010	28 Januari 2010															
16.	Kalimantan Tengah	1. Rancang Bangun		8.535.128,10															
		2. Arahlan Pencadangan		8.510.524,00															
		3. Usulan Penetapan		8.510.524,00															
		4. Penetapan	SK.02/Menhut-II/2012	9 Januari 2012															
17.	Kalimantan Timur	1. Rancang Bangun		12.486.355,00															
		2. Arahlan Pencadangan		12.606.634,00															
		3. Usulan Penetapan		12.606.634,00															
		4. Penetapan	SK.674/Menhut-II/2011	01 Desember 2011															
18.	Kalimantan Selatan	1. Rancang Bangun*)																	
		2. Arahlan Pencadangan		1.390.224,00															
		3. Usulan Penetapan		1.315.485,29															
		4. Penetapan	SK. 78/Menhut-II/2010	10 Februari 2010															
19.	Gorontalo	1. Rancang Bangun*)																	
		2. Arahlan Pencadangan		620.082,00															
		3. Usulan Penetapan		583.290,21															
		4. Penetapan	SK. 65/Menhut-II/2010	28 Januari 2010															
20.	Sulawesi Utara	1. Rancang Bangun*)																	
		2. Arahlan Pencadangan		974.232,00															
		3. Usulan Penetapan		974.232,00															
		4. Penetapan	SK.386/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	15 Agustus 2017												6	435.195		
21.	Sulawesi Tengah	1. Rancang Bangun*)																	
		2. Arahlan Pencadangan		3.549.606,00															
		3. Usulan Penetapan		3.218.226,00															
		4. Penetapan	SK. 79/Menhut-II/2010	10 Februari 2010															
22.	Sulawesi Selatan	1. Rancang Bangun*)																	
		2. Arahlan Pencadangan		1.835.163,00															
		3. Usulan Penetapan		2.068.188,80															
		4. Penetapan	SK.665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017	28 Nopember 2017													16	1.819.100	
23.	Sulawesi Tenggara	1. Rancang Bangun*)																	
		2. Arahlan Pencadangan		2.083.166,00															
		3. Usulan Penetapan		2.137.155,03															
		4. Penetapan	SK. 338/Menhut-VII/2009	15 Juni 2009															
24.	Sulawesi Barat	1. Rancang Bangun*)																	
		2. Arahlan Pencadangan		862.491,00															
		3. Usulan Penetapan		861.745,00															
		4. Penetapan	SK. 799/Menhut-II/2009	7 Desember 2009															

NO	PROVINSI	TAHAPAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	TAHUN													
					S/D 2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
					Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
25	Maluku	1. Rancang Bangun*) 2. Arahian Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan			0 18 0 22	- 2.246.425,00 - 2.207.864,00												
26	Maluku Utara	1. Rancang Bangun*) 2. Arahian Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK. 66/Menhut-II/2010	28 Januari 2010	0 16 0 16	- 1.730.281,00 - 1.768.424,00												
27	Papua	1. Rancang Bangun*) 2. Arahian Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK. 73/Menhut-II/2010	8 Pebruari 2010	0 56 56 56	- 18.180.146,00 18.239.238,00 18.180.201,00												
28	Papua Barat	1. Rancang Bangun*) 2. Arahian Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK. 481/Menhut-III/2009	18 Agustus 2009	0 21 21 21	- 5.388.407,00 5.404.745,00 5.404.745,00												
			SK. 744/Menhut-II/2009	19 Oktober 2009														

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2018

Ket:

0 : Belum ada Proses

*) : Rancang bangun dilaksanakan sebelum tahun 2007

**) : Ada koreksi data

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak memiliki wilayah KPH

TABEL V.2 PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN Luas (ha)					
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)
1	Aceh	Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Merah, Gayo Lues, Kota Langsa	KPHL Unit III Aceh	SK.992/Menhut-II/2013	27/12/2013	406.273	276.118	-	-	-	682.391
2	Sumatera Utara	Mandailing Natal	KPHP Mandailing Natal	SK. 332/Menhut/II/2010	25/05/2010	12.661	14.704	131.781	-	-	159.166
3	Sumatera Utara	Toba Samosir dan Labuhan Batu Utara	KPHL Unit XXII	SK.993/Menhut-II/2013	27/12/2013	65.038	-	51.189	-	-	116.227
4	Sumatera Utara	Toba Samosir	KPHL Tobasamosir	SK.866/Menhut-II/2013	05/12/2013	75.762	5.191	6.294	-	-	87.247
5	Sumatera Barat	Dharmasraya	KPHP Dharmasraya	SK.695/Menhut-II/2013	21/11/2013	-	17.721	15.829	-	-	33.550
6	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	KPHP Pesisir Selatan	SK.696/Menhut-II/2013	21/11/2013	9.091	4.563	46.274	-	-	59.928
7	Sumatera Barat	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Sokok, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok dan Tanah Datar	KPHL Bukit Barisan	SK.867/Menhut-II/2013	05/12/2013	69.504	16.759	245	-	-	86.508
8	Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)	SK.44/Menhut/II/2012	02/02/2012	94.883	5.286	17.383	-	-	117.552
9	Sumatera Barat	Sijunjung	KPHL Sijunjung	SK. 331/Menhut/II/2010	25/05/2010	83.952	40.785	25.755	-	-	150.492
10	Sumatera Barat	Solok	KPHL Solok (unit VI)	SK.42/Menhut/II/2012	02/02/2012	114.061	3.481	12.804	-	-	130.346
11	Sumatera Selatan	Banyuasin	KPHL Banyuasin	SK.961/Menhut-II/2013	27/12/2013	69.147	5.660	-	-	-	74.807
12	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	KPHP Meranti	SK.689/Menhut-VIII/2012	29/11/2012	20.082	134.597	97.588	-	-	252.267
13	Sumatera Selatan	Musi Rawas	KPHP Rawas	SK.688/Menhut-VIII/2012	29/11/2012	-	89.511	32.074	-	-	121.585
14	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu, Muara Enim dan Lahat	KPHP Unit XIV Benakat Revisi	SK.827/Menhut-II/2013	19/11/2013	-	256.594	-	-	-	256.594
15	Sumatera Selatan	Mus Rawas	KPHP Laktian Unit VI	SK. 790/Menhut/II/2009	07/12/2009	-	76.776	-	-	-	76.776
16	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	KPHP Lalan	SK. 789/Menhut/II/2009	07/12/2009	-	265.953	-	-	-	265.953
17	Kepulauan Riau	Karimun	KPHL Karimun	SK.442/Menhut/II/2012	09/08/2012	9.605	-	8.002	-	-	17.607
18	Riau	Siak, Kampar dan Kota Pekanbaru	KPHP Minas Tahura	SK.765/Menhut-II/2012	26/12/2012	-	-	140.562	-	6.172	146.734
19	Riau	Kampar	KPHP Kampar Kiri (Unit XVII)	SK. 640/Menhut/II/2011	07/11/2011	24.028	-	119.755	-	-	143.783
20	Riau	Kepulauan Meranti	KPHP Tebing Tinggi (Unit XXIV)	SK.343/Menhut/II/2011	28/06/2011	412	-	69.335	-	-	69.747
21	Riau	Pelalawan, Siak	KPHP Tasik Besar Serkap	SK. 509/Menhut/II/2010	21/09/2010	-	491.768	2.660	18.848	-	513.276
22	Kep. Bangka Belitung	Bangka	KPHP Sigambir-Kotawaringin	SK.962/Menhut-II/2013	27/12/2013	4.769	30.169	-	-	-	34.938
23	Kep. Bangka Belitung	Bangka Tengah	KPHP Sungai Sembulan	SK. 329/Menhut/II/2010	25/05/2010	5.185	34.228	-	-	-	39.413
24	Kep. Bangka Belitung	Bangka Barat	KPHP Rambat Menduyung	SK.763/Menhut-II/2012	26/12/2012	8.803	50.819	-	-	-	59.622
25	Kep. Bangka Belitung	Belitung Timur	KPHP Gunung Duren	SK.764/Menhut-II/2012	26/12/2012	12.615	45.620	-	-	-	58.235
26	Bengkulu	Bengkulu Utara	KPHP Bengkulu Utara	SK.995/Menhut-II/2013	27/12/2013	165	9.546	42.640	-	-	52.351
27	Bengkulu	Muko-Muko	KPHP Muko-Muko	SK. 330/Menhut/II/2010	25/05/2010	-	11.937	66.337	-	-	78.274
28	Bengkulu	Rejang Lebong	KPHL Bukit Balai Rejang	SK.994/Menhut-II/2013	27/12/2013	16.059	-	-	-	-	16.059
29	Jambi	Kerinci	KPHP Kerinci	SK.960/Menhut-II/2013	27/12/2013	-	34.250	-	-	-	34.250
30	Jambi	Merangin	KPHP Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai	SK.43/Menhut/II/2012	02/02/2012	36.088	9.944	30.105	-	-	76.137
31	Jambi	Sarolangun	KPHP Lima unit VII	SK. 714/Menhut/II/2011	19/12/2011	54.793	43.807	22.502	-	-	121.102
32	Jambi	Tanjung Jabung Barat	KPHL Sungai Beram Hitam	SK. 787/Menhut/II/2009	07/12/2009	15.965	-	-	-	-	15.965
33	Lampung	Pesawaran	KPHL Pesawaran	SK.438/Menhut-II/2012	09/08/2012	9.944	1.260	-	-	-	11.204
34	Lampung	Way Kanan	KPHP Bukit Punggur	SK.439/Menhut-II/2012	09/08/2012	19.131	21.995	-	-	-	41.126
35	Lampung	Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus	KPHL Batu Teqi	SK. 650/Menhut/II/2010	22/11/2010	58.162	-	-	-	-	58.162

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN					
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)
36	Lampung	Lampung Selatan	KPHL Rajabasa (Unit XIV)	SK.367/Menhut/II/2011	07/07/2011	5.160	-	-	-	-	5.160
37	Lampung	Lampung Selatan, Lampung Timur	KPHP Gedong Wani (Unit XVI)	SK.427/Menhut/II/2011	27/07/2011	-	30.243	-	-	-	30.243
38	Lampung	Lampung Tengah	KPHP Register 47 Way Terusan	SK.794/Menhut/II/2009	07/12/2009	-	12.500	-	-	-	12.500
39	Lampung	Mesuji	KPHP Sungai Buaya	SK.996/Menhut-II/2013	27/12/2013	-	44.249	-	-	-	44.249
40	Lampung	Tanggamus	KPHL Kotaagung Utara (Unit X)	SK.379/Menhut/II/2011	18/07/2011	56.020	-	-	-	-	56.020
41	Lampung	Tulang Bawang, Way Kanan	KPHP Muara Dua	SK.236/Menhut/II/2011	10/05/2012	-	49.134	-	-	-	49.134
42	DI Yogyakarta	Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo	KPHP Yogyakarta	SK.721/Menhut/II/2011	20/12/2011	2.313	13.412	-	-	-	15.725
43	Bali	Buleleng, Bangli, Tabanan, Badung	KPHL Bali Tengah (Unit II)	SK.620/Menhut/II/2011	01/11/2011	14.651	-	-	-	-	14.651
44	Bali	Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung	KPHL Bali Timur (Unit III)	SK.621/Menhut/II/2011	01/11/2011	21.891	1.087	-	-	-	22.978
45	Bali	Jembrana, Buleleng, Tabanan	KPHL Bali Barat	SK.784/Menhut/II/2009	07/12/2009	59.848	1.892	1.610	-	-	63.350
46	Nusa Tenggara Barat	Bima, Dompu	KPHP Tambora Utara	SK.970/Menhut-II/2013	27/12/2012	-	14.769	12.151	-	-	26.920
47	Nusa Tenggara Barat	Bima dan Kota Bima	KPHP Maria Unit XXIII	SK.752/Menhut-II/2012	26/12/2012	8.515	4.554	14.563	-	-	27.632
48	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	KPHL Ampang	SK.751/Menhut-II/2012	26/12/2012	24.168	8.261	6.252	-	-	38.681
49	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat, Lombok Utara	KPHL Rinjani Barat	SK.785/Menhut/II/2009	07/12/2009	28.911	5.075	6.977	-	-	40.963
50	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	KPHL Tastura	SK.963/Menhut-II/2013	27/12/2013	11.153	5.000	-	-	-	16.153
51	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	KPHL Rinjani Timur	SK.225/Menhut/II/2012	04/05/2012	31.987	5.602	-	-	-	37.589
52	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	KPHP Batuanteh (Unit IX)	SK.342/Menhut/II/2011	28/06/2011	14.303	14.842	3.631	-	-	32.776
53	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	KPHP Sejorong	SK.971/Menhut-II/2013	27/12/2013	15.762	5.274	19.952	-	-	40.988
54	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	KPHP Rote Ndao	SK.333/Menhut/II/2010	25/05/2010	15.509	25.221	-	-	-	40.730
55	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	KPHL Flores Timur	SK.972/Menhut-II/2013	27/12/2013	39.856	1.793	13.759	-	-	55.408
56	Nusa Tenggara Timur	Alor	KPHL Alor Pantar	SK.767/Menhut-II/2012	26/12/2012	59.419	22.938	21.977	-	-	104.334
57	Nusa Tenggara Timur	Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan	KPHL Mutis Timau (Unit XIX)	SK.41/Menhut/II/2012	02/02/2012	97.005	-	18.375	-	-	115.380
58	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	KPHP Manggarai Barat	SK.973/Menhut-II/2013	27/12/2013	27.113	18.613	14.571	-	-	60.297
59	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	KPHP Kapuas Hulu (Unit XVIII dan Unit XIX)	SK.380/Menhut/II/2011	18/07/2011	224.522	83.241	150.262	-	-	458.025
60	Kalimantan Barat	Ketapang	KPHP Kendawangan	SK.680/Menhut/II/2012	23/11/2012	16.288	162.583	-	-	-	178.851
61	Kalimantan Barat	Sintang	KPHP Sungai Merakai	SK.791/Menhut/II/2009	07/12/2009	10.420	46.473	-	-	-	56.893
62	Kalimantan Timur	Berau	KPHP Berau Barat	SK.649/Menhut/II/2010	22/11/2010	247.025	118.261	410.253	-	-	775.539
63	Kalimantan Timur	Bulungan	KPHP Kayan	SK.223/Menhut/II/2012	04/05/2012	168.198	9.776	309.868	-	-	487.842
64	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan	KPHP Meratus	SK.768/Menhut-II/2012	26/12/2012	-	274.159	113.329	-	-	387.488
65	Kalimantan Timur	Kota Tarakan	KPHL Tarakan	SK.783/Menhut/II/2009	07/12/2009	2.400	-	2.223	-	-	4.623
66	Kalimantan Timur	Malinau	KPHP Malinau	SK.224/Menhut/II/2012	04/05/2012	220.723	110.518	384.271	-	-	715.512
67	Kalimantan Timur	Paser	KPHP Kendilo	SK.966/Menhut-II/2013	27/12/2013	44.152	61.051	34.032	-	-	139.235
68	Kalimantan Selatan	Banjir	KPHP Banjar	SK.793/Menhut/II/2009	07/12/2009	42.090	72.513	25.354	-	-	139.957
69	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	KPHL Hulu Sungai Selatan	SK.750/Menhut-II/2012	26/12/2012	21.221	11.530	52	-	-	32.803
70	Kalimantan Selatan	Kota baru	KPHP Pulau Laut dan Sebuku (UNIT III)	SK.226/Menhut/II/2012	04/05/2012	12.863	99.395	-	-	-	112.258
71	Kalimantan Selatan	Tabalong	KPHP Tabalong	SK.997/Menhut-II/2013	27/12/2013	48.776	44.759	23.822	-	-	117.357
72	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	KPHP Tanah Laut	SK.440/Menhut/II/2012	09/08/2012	15.862	71.490	5.289	-	-	92.641
73	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	KPHL Gerbang Barito	SK.964/Menhut-II/2013	27/12/2013	90.361	43.345	20.961	-	-	154.667

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN					
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)
74	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	KPHP Gunung Mas	SK.974/Menhut-II/2013	27/12/2013	57.337	50.107	187.291	-	-	294.735
75	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	KPHP Kota Waringin Barat	SK.749/Menhut-II/2012	19/12/2011	9.672	257.160	49.303	-	-	316.135
76	Kalimantan Tengah	Lamandau	KPHP Lamandau	SK.717/Menhut-II/2012	26/12/2012	25.432	19.906	180.951	-	-	226.289
77	Kalimantan Tengah	Kapuas	KPHL Kapuas	SK.247/Menhut/III/2011	02/05/2011	105.372	-	-	-	-	105.372
78	Kalimantan Tengah	Murung Raya	KPHP Murung Raya	SK.965/Menhut-II/2013	27/12/2013	103.578	205.729	598.948	-	-	908.255
79	Kalimantan Tengah	Seruyan	KPHP Seruyan (Unit XX)	SK.716/Menhut/II/2011	19/12/2011	38.970	6.112	328.827	-	-	373.909
80	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan	KPHP Polgar	SK.788/Menhut/III/2009	07/12/2009	5.265	19.739	16.594	-	-	41.598
81	Gorontalo	Boalemo	KPHP Bolaemo (Unit V)	SK.402/Menhut/II/2011	21/07/2011	29.383	12.403	55.140	-	-	96.926
82	Gorontalo	Gorontalo	KPHP Gorontalo	SK.976/Menhut-II/2013	27/12/2013	13.126	17.781	40.775	-	-	71.682
83	Gorontalo	Gorontalo Utara	KPHP Gorontalo Utara	SK.766/Menhut-II/2012	26/12/2012	18.632	15.759	71.417	-	-	105.808
84	Gorontalo	Pohuwato	KPHL Unit III Pohuwato	SK.334/Menhut/II/2010	25/05/2010	59.301	13.605	43.369	-	-	116.275
85	Sulawesi Tengah	Banggai, Tojo Una-Una Morowali	KPHP Toili Baturube	SK.967/Menhut-II/2013	27/12/2013	126.447	55.389	94.800	-	-	276.636
86	Sulawesi Tengah	Donggala, Parigi, Moutong	KPHP Dampelas Tinombo	SK.792/Menhut/III/2009	07/12/2009	21.017	10.244	69.651	-	-	100.912
87	Sulawesi Tengah	Banggai	KPHP Balantak	SK.754/Menhut-II/2012	26/12/2012	30.418	28.049	58.936	-	-	117.403
88	Sulawesi Tengah	Buol	KPHP Pogogul	SK.756/Menhut-II/2012	26/12/2012	44.257	54.008	101.268	-	-	199.533
89	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong, Sigi, Donggala dan Kota Palu	KPHP Dolago Tanggunung	SK.755/Menhut-II/2012	26/12/2012	67.794	19.008	57.548	-	-	144.350
90	Sulawesi Tengah	Poso	KPHP Sintuwu Maroso/Rano Patanu	SK.639/Menhut/II/2011	07/11/2011	46.341	28.740	62.349	-	-	137.430
91	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	KPHP Unit XVII Tojo Una-Una	SK.968/Menhut-II/2013	27/12/2013	39.921	10.827	61.744	-	-	112.492
92	Sulawesi Tengah	Mamuju, Mamasa	KPHL Ganda Dewala	SK.441/Menhut-II/2012	09/08/2012	157.598	-	-	-	-	157.598
93	Sulawesi Tengah	Majene	KPHL Malurda	SK.753/Menhut-II/2012	26/12/2012	45.109	-	6.962	-	-	52.071
94	Sulawesi Tengah	Mamasa	KPHL Mamasa Tengah (Unit VIII)	SK.340/Menhut/II/2011	27/06/2011	33.218	-	4.744	-	-	37.962
95	Sulawesi Tengah	Mamasa	KPHP Mamasa Barat (Unit VII)	SK.341/Menhut/II/2011	27/06/2011	17.352	-	36.203	-	-	53.555
96	Sulawesi Tengah	Mamuju Utara	KPHL Unit II Lariang	SK.60/Menhut/II/2011	28/02/2011	34.512	2.394	21.010	-	-	57.916
97	Sulawesi Tengah	Mamuju, Mamuju Tengah	KPHP Budong-Buddong	SK.998/Menhut-II/2013	27/12/2013	5.463	36.461	86.172	-	-	128.096
98	Sulawesi Tengah	Polewali Mandar	KPHL Mapili	SK.651/Menhut/II/2010	22/11/2010	53.485	-	23.711	-	-	77.196
99	Sulawesi Tengah	Bombana	KPHP Tina Orima bombana	SK.426/Menhut-II/2011	27/07/2011	23.659	74.514	17.953	-	-	116.126
100	Sulawesi Tengah	Buton	KPHP Unit III Lakompa	SK.795/Menhut/III/2009	07/12/2009	12.432	11.880	6.288	-	-	30.600
101	Sulawesi Tengah	Buton Utara	KPHL Peropa'Ea Gantara	SK.975/Menhut-II/2013	27/12/2013	15.157	-	2.571	-	-	17.728
102	Sulawesi Tengah	Konawe	KPHL Konawe	SK.762/Menhut-II/2012	26/12/2012	96.941	8.018	35.668	-	-	140.627
103	Sulawesi Tengah	Konawe Selatan, Kota Kendari	KPHP Unit XXIV Gularaya	SK.61/Menhut/II/2011	28/02/2011	41.405	89.343	3.671	-	-	134.419
104	Sulawesi Selatan	Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Takalar, Jeneponto	KPHP Jeneberang (Unit IX)	SK.715/Menhut/II/2011	19/12/2011	60.451	45.471	54.932	-	-	160.854
105	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	KPHL Larona Malili (Unit I)	SK.722/Menhut/II/2011	20/12/2011	156.593	6.391	79.008	-	-	241.992
106	Sulawesi Selatan	Wajo	KPHP Awota	SK.979/Menhut-II/2013	27/12/2013	5.539	13.532	-	-	-	19.071
107	Maluku Utara	Helimaha Selatan	KPHP Bacan	SK.969/Menhut-II/2013	27/12/2013	62.836	7.760	70.212	-	-	140.808
108	Maluku Utara	Helimaha Tengah, Kota Tidore Kepulauan	KPHP Gunung Sinopa	SK.337/Menhut/II/2010	25/05/2010	21.056	9.604	13.917	-	-	44.577
109	Maluku	Buru	KPHP Wae Apu	SK.770/Menhut-II/2012	26/12/2012	73.478	62.921	96.033	-	-	232.432
110	Maluku	Maluku Tengah	KPHP Wae Sapalewa	SK.336/Menhut/II/2010	25/05/2010	4.545	34.609	27.903	-	-	67.057
111	Maluku	Buru, Buru Selatan	KPHP Wae Tina	SK.977/Menhut-II/2013	27/12/2013	51.599	86.938	65.847	-	-	204.384
112	Maluku	Seram Bagian Timur	KPHP Wae Bubi	SK.978/Menhut-II/2013	27/12/2013	12.666	11.059	42.739	-	-	66.464

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN						
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)	
												Luas (ha)
113	Papua Barat	Sorong Selatan	KPHP Sorong Selatan	SK.771/Menhut-II/2012	26/12/2012	121.361	73.189	88.710	-	-	-	283.260
114	Papua Barat	Kota Sorong	KPHL Kota Sorong (remu)	SK.999/Menhut-II/2013	27/12/2013	6.602	-	6.173	-	-	-	12.775
115	Papua Barat	Sorong	KPHP Sorong	SK. 701/Menhut/II/2010	20/12/2010	11.789	111.444	100.136	-	-	-	223.369
116	Papua	Biak Numfor	KPHL Biak Numfor	SK. 648/Menhut/II/2010	22/11/2010	120.340	30.527	55.149	-	-	-	206.016
117	Papua	Keerom	KPHP Keerom Revisi	SK.828/Menhut-II/2013	19/11/2013	49.196	30.330	93.930	-	-	-	173.456
118	Papua	Sarmi dan Jayapura	KPHP Mamberamo Revisi	SK.829/Menhut-II/2013	19/11/2013	50.492	46.105	159.217	-	-	-	255.814
119	Papua	Waropen	KPHP Waropen	SK.760/Menhut-II/2012	26/12/2012	83.372	97.691	5.899	-	-	-	186.962
120	Papua	Kepulauan Yapen	KPHP Yapen	SK. 786/Menhut/II/2009	07/12/2009	15.100	90.767	-	-	-	-	105.867

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data SID 31 Desember 2018

TABEL V.3 PENETAPAN WILAYAH KPH KONSERVASI

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		Luas (ha)
			Surat Keputusan	Tanggal	
1	2	3	4	5	6
1	Taman Nasional Batang Gadis	Sumatera Utara	SK.786/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	72.150,00
2	Taman Nasional Siberut	Sumatera Barat	SK.787/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	190.500,00
3	Taman Nasional Sembilang	Sumatera Selatan	SK. 748/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	202.896,31
4	Taman Nasional Tesso Nilo	Riau	SK.788/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	38.576,00
5	Taman Nasional Bukit Tigapuluh	Riau	SK.789/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	144.223,00
6	Taman Nasional Berbak	Jambi	SK. 774/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	62.700,00
7	Taman Nasional Bukit Duabelas	Jambi	SK. 720/Menhut -II/2010	29 Desember 2010	60.500,00
8	Taman Nasional Way Karibas	Lampung	SK. 712/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	130.000,00
9	Taman Nasional Ujung Kulon	Banten	SK. 775/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	122.956,00
10	Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Banten dan Jawa Barat	SK. 776/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	113.357,00
11	Taman Nasional Gunung Ciremai	Jawa Barat	SK.790/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	15.500,00
12	Taman Nasional Gunung Merapi	DIY dan Jawa Tengah	SK. 713/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	6.410,00
13	Taman Nasional Karimun Jawa	Jawa Tengah	SK. 749/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	111.625,00
14	Taman Nasional Gunung Merbabu	Jawa Tengah	SK. 751/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	5.725,00
15	Taman Nasional Meru Betiri	Jawa Timur	SK. 779/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	58.000,00
16	Taman Nasional Alas Purwo	Jawa Timur	SK. 801/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	43.420,00
17	Taman Nasional Baluran	Jawa Timur	SK. 718/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	25.000,00
18	Taman Nasional Bali Barat	Bali	SK. 780/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	19.002,89
19	Taman Nasional Gunung Rinjani	Nusa Tenggara Barat	SK. 781/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	41.330,00
20	Taman Nasional Lawangi Wanggameti	Nusa Tenggara Timur	SK. 714/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	47.014,00
21	Taman Nasional Manupeu Tanah Daru	Nusa Tenggara Timur	SK. 719/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	87.984,00
22	Taman Nasional Komodo	Nusa Tenggara Timur	SK. 753/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	173.000,00
23	Taman Nasional Danau Kelimutu	Nusa Tenggara Timur	SK. 754/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	5.356,50
24	Taman Nasional Danau Sentarum	Kalimantan Barat	SK. 715/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	132.000,00
25	Taman Nasional Gunung Palung	Kalimantan Barat	SK. 721/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	90.000,00
26	Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	SK. 750/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	181.090,00
27	Taman Nasional Kulai	Kalimantan Timur	SK. 778/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	198.629,00
28	Taman Nasional Kayan Mentarang	Kalimantan Timur	SK. 752/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	1.360.500,00
29	Taman Nasional Tanjung Puting	Kalimantan Tengah	SK. 777/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	415.040,00
30	Taman Nasional Sebangau	Kalimantan Tengah	SK.791/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	568.700,00
31	Taman Nasional Bunaken	Sulawesi Utara	SK. 782/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	89.065,00
32	Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	Sulawesi Utara dan Gorontalo	SK. 716/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	287.115,00
33	Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara	SK. 755/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	105.194,00
34	Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	Sulawesi Selatan	SK. 717/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	43.750,00
35	Taman Nasional Manusela	Maluku	SK. 756/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	189.000,00
36	Taman Nasional Akelajawe Loloabata	Maluku Utara	SK.757/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	167.300,00
37	Taman Nasional Lorentz	Papua	SK.792/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	2.354.644,00
38	Taman Nasional Wasur	Papua	SK.793/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	413.810,00
39	Rawa Singkil	Aceh	SK.980/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	102.500

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	
40	Kerumutan	Riau	SK.981/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	120.000
41	Arau Hilir	Padang	SK.982/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	105.375
42	Danku Bentayan	Sumatera Selatan	SK.983/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	89.574
43	Guntur-Papandayan	Jawa Barat	SK.984/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	15.318
44	Tambora	Nusa Tenggara Barat	SK.985/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	78.116
45	Rutung	Nusa Tenggara Timur	SK.986/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	32.248
46	Gunung Melintang	Kalimantan Barat	SK.987/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	25.125
47	Morowali	Sulawesi Tengah	SK.988/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	209.400
48	Towuti	Sulawesi Tengah	SK.989/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	209.400
49	Nantu	Gorontalo	SK.990/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	31.215
50	Jayawijaya	Papua	SK.991/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	800.000
51	BOLMALIT MAGHLIT	Papua Barat	SK.450/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	9.194
52	SORONG KLAMONO	Papua Barat	SK.456/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	2.990
53	GUNUNG MEJA SIDEI KAIRONI	Papua Barat	SK.457/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	968
54	ARFAK	Papua Barat	SK.458/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	68.325
55	WA GEO	Papua Barat	SK.459/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	264.073
56	MOROWALI	Sulawesi Tengah	SK.460/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	216.908
57	BAKIRIANG	Sulawesi Tengah	SK.461/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	17.479
58	PAMONA	Sulawesi Tengah	SK.462/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	35.125
59	PANGI BINANGGA	Sulawesi Tengah	SK.463/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	70.997
60	GUNUNG TOMBALA	Sulawesi Tengah	SK.464/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	38.608
61	KPHK GUNUNG DAKO	Sulawesi Tengah	SK.465/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	21.659
62	KUALA LUPAK	Kalimantan Selatan	SK.466/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	4.008
63	GIAM SIAK KECIL BUKIT BATU	Riau	SK.467/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	99.858
64	BUKIT RIMBANG BUKIT Baling	Riau	SK.468/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	142.156
65	BUKIT KABA	Bengkulu	SK.469/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	15.133
66	ENGGANO	Bengkulu	SK.470/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	9.374
67	PATI BARAT	Jawa Tengah	SK.471/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	1.426
68	CILACAP	Jawa Tengah	SK.472/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	982
69	PARAWEN	Kalimantan Tengah	SK.473/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	5.855
70	KPHK LAMANDAU	Kalimantan Tengah	SK.474/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	61.425
71	BEDUGUL SANGEH	Bali	SK.475/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	3.635
72	KINTAMANI	Bali	SK.476/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	2.649
73	BARUMUN	Sumatera Utara	SK.694/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2016	02 September 2016	36.261
74	SICIKE CIKE	Sumatera Utara	SK.724/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	6.144
75	KAWAH IJEN	Jawa Timur	SK.725/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	2.575
76	DATARAN TINGGI YANG	Jawa Timur	SK.726/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	12.865
77	CYCLEOPS YOUTIEFA	Papua	SK.727/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	33.289
78	MUARA KAMAN SEDULANG	Kalimantan Timur	SK.728/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	65.445
79	TALIABU	Maluku	SK.730/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	13.114
80	JAKARTA	Jakarta	SK.731/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	242
81	KEPULAUAN KRAKATAU	Lampung	SK.732/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	13.365
82	LAMBUSANGO	Sulawesi Tenggara	SK.733/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	28.595

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	
83	PEROPA	Sulawesi Tenggara	SK.734/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	44.012
84	DURIAN LUNCUK	Jambi	SK.735/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	111
85	MUARA KENDAWANGAN	Kalimantan Barat	SK.737/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	147.614
86	GUNUNG NYIUT	Kalimantan Barat	SK.738/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	91.759
87	SIMPANG TILU	Jawa Barat	SK.739/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	23.356
88	BURANGRANG TANGKUBAN PERAHU	Jawa Barat	SK.740/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	4.772
89	MOYO	Nusa Tenggara Barat	SK.741/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	30.945
90	PADANG SUGIHAN	Sumatera Selatan	SK.743/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	88.148
91	HARLU	Kalimantan Timur	SK.744/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	3.681
92	GUNUNG MUTIS	Nusa Tenggara Timur	SK.745/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	12.315
93	PULAU WEH	Aceh	SK.746/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	6.481
94	LINGGA ISAQ	Aceh	SK.747/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	86.634
95	TANGKOKO	Sulawesi Utara	SK.748/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	8.545
96	YOGYAKARTA	Yogyakarta	SK.749/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	632
97	GUNUNG SAHUWAI	Maluku	SK.729/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	32.476
98	HUTAN BAKAU PANTAI TIMUR	Jambi	SK.736/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	4.872
99	GUNUNG TUNAK	Nusa Tenggara Barat	SK.742/Menlhk/Setjeni/PLA.0/9/2016	20 September 2016	2.225
100	ALE AISIO	Nusa Tenggara Timur	SK.429/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	9.825
101	CAMPLONG	Nusa Tenggara Timur	SK.428/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.015
102	DOLOK SURUNGAN	Sumatera Utara	SK.414/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	22.241
103	DOLOK TINGGI RAJA	Sumatera Utara	SK.413/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	408
104	HOLIDAY RESORT	Sumatera Utara	SK.415/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	2.100,42
105	KARANG GADING DAN LANGKAT TIMUR LAUT	Sumatera Utara	SK.410/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	13.474
106	KATERI	Nusa Tenggara Timur	SK.427/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	7.945,32
107	NABIRE-TANJUNG WIAY	Papua	SK.432/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	4.462
108	NDETA KILIKIMA	Nusa Tenggara Timur	SK.423/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.847
109	RIUNG	Nusa Tenggara Timur	SK.426/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	11.829
110	SANGIANG	Nusa Tenggara Barat	SK.421/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	11.546,10
111	SEMONGKAT	Nusa Tenggara Barat	SK.418/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.783
112	SIBOLANGIT	Sumatera Utara	SK.411/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	596
113	SJABA HUTAGINJANG	Sumatera Utara	SK.417/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	416
114	SUPIROK	Sumatera Utara	SK.412/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	15.330
115	SURANADI	Nusa Tenggara Barat	SK.420/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	448,10
116	TALI WANG	Nusa Tenggara Barat	SK.419/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	6.608,20
117	TAMAN BURU PULAU PINI	Sumatera Utara	SK.416/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	8.325
118	TELUK KUPANG	Nusa Tenggara Timur	SK.431/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	67.628
119	TELUK MAUMERE	Nusa Tenggara Timur	SK.425/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	9.013
120	TUTI ADAGAE	Nusa Tenggara Timur	SK.422/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	7.699,98
121	WAE WUUL	Nusa Tenggara Timur	SK.424/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.484,84
122	WATU ATA	Nusa Tenggara Timur	SK.430/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	4.898,80
TOTAL					12.084.633,70

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2018

TABEL V.4 DAFTAR KPH BERLEMBAGA DAN UNIT-UNIT YANG DINAUNGI

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN	
1	2	3	4	5	
Aceh	1	KPH WILAYAH I	UNIT I	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 tahun 2018	
	2	KPH WILAYAH II	UNIT II		
	3	KPH WILAYAH III	UNIT III		
	4	KPH WILAYAH IV	UNIT IV		
	5	KPH WILAYAH V	UNIT V		
	6	KPH WILAYAH VI	UNIT VI		
Bengkulu	1	KPHL Bengkulu Selatan	UNIT V	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2017	
	2	KPHL Bukit Balai Rejang	UNIT VII		
	3	KPHL Bukit Daun	UNIT III		
	4	KPHL Kaur	UNIT VI		
	5	KPHL Seluma	UNIT IV		
	6	KPHP Bengkulu Utara	UNIT II		
	7	KPHP Muko Muko	UNIT I		
Jambi	1	KPHP BATANGHARI	UNIT XI UNIT XII	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 1176 tahun 2017	
	2	KPHP Bungo	UNIT II UNIT III		
	3	KPHP HILIR SAROLANGUN	UNIT VIII		
	4	KPHP Kerinci	UNIT I		
	5	KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	UNIT VII		
	6	KPHP Merangin	UNIT IV UNIT V UNIT VI		
	7		KPHP MUARO JAMBI		UNIT XIII
	8		KPHP TANJUNG JABUNG BARAT		UNIT XV UNIT XVI UNIT XVII
	9	KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR			UNIT XIV
	10	KPHP Tebo Barat	UNIT IX		
	11	KPHP Tebo Timur	UNIT X		
Kepulauan Bangka Belitung	1	KPHL Belantu Mendanau	UNIT X	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017	
	2	KPHP Bubus Panca	UNIT III		
	3	KPHP Gunung Duren	UNIT XIII		
	4	KPHP Jebu Bembang Antan	UNIT II		
	5	KPHP Muntai Palas	UNIT VIII		
	6	KPHP Rambat Menduyung	UNIT I		
	7	KPHP Sigambir Kotawaringin	UNIT IV		
	8	KPHP Sungai Sembulan	UNIT V		
Kepulauan Riau	1	KPHL Unit II Batam	UNIT II	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2017	
	2	KPHP Unit I Karimun	UNIT I		
	3	KPHP Unit III Lingga	UNIT III		
	4	KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinang	UNIT IV		
	5	KPHP Unit V Natuna	UNIT V		
	6	KPHP Unit VI Anambas	UNIT VI		
Lampung	1	KPH I Pesisir Barat	UNIT I	Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017	
	2	KPH II Liwa	UNIT II		
	3	KPH III Bukit Punggur	UNIT III		
	4	KPH IV Muara Dua	UNIT IV		
	5	KPH IX Kotaagung Utara	UNIT X		
	6	KPH V Sungai Buaya	UNIT V		
	7	KPH VI Way Terusan	UNIT VI		
	8	KPH VII Way Waya-Tangkit Tebak	UNIT VII UNIT VIII		
	9		KPH VIII Batu Tegi		IX
	10	KPH X Pematang Neba	UNIT XI		
	11	KPH XI Pesawaran	UNIT XII		
	12	KPH XII Gunung Balak	UNIT XV		
	13	KPH XIII Gunung Raja Basa-Way Pisang-Batu Serampok	UNIT XIII UNIT XIV		
	14		KPH XIV Gedong Wani		UNIT XVI
Riau	1	KPHP Minas Tahura	UNIT IX	Peraturan Gubernur Riau No. 76 Tahun 2017	
	2	UPT KPH Bagan Siapi Api	UNIT I UNIT II UNIT III UNIT XII	Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017	
	3		UPT KPH Bengkalis Pulau		UNIT IV UNIT V UNIT VI
	4				UPT KPH Hutan Mandah
	5	UPT KPH Indragiri		UNIT XXIX UNIT XXVIII UNIT XXX	
	6		UPT KPH Kampar Kiri	UNIT XVIII	
	7	UPT KPH Mandau	UNIT VII		

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
			UNIT VIII	
			UNIT X	
	8	UPT KPH Rokan	UNIT XI	
			UNIT XIII	
			UNIT XIV	
	9	UPT KPH Singingi	UNIT XXXI	
			UNIT XXXII	
	10	UPT KPH Sorek	UNIT XIX	
			UNIT XX	
			UNIT XXI	
	11	UPT KPH Suligi-Batu Gajah	UNIT XV	
			UNIT XVI	
			UNIT XVII	
	12	UPT KPH Tasik Besar Serkap	UNIT XXII	
	13	UPT KPH Tebing Tinggi	UNIT XXIII	
			UNIT XXIV	
			UNIT XXV	
Sumatera Barat	1	KPH Agam Raya	UNIT III	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017
	2	KPH Bukit Barisan	UNIT IV	
	3	KPH Dharmasraya	UNIT VIII	
	4	KPH Hulu Batanghari	UNIT VII	
	5	KPH Lima Puluh Kota	UNIT II	
	6	KPH Mentawai	UNIT X	
			UNIT XI	
	7	KPH Pasaman Raya	UNIT I	
	8	KPH Sijunjung	UNIT V	
	9	KPH Solok	UNIT VI	
	10	KPHP Pesisir Selatan	UNIT IX	
Sumatera Selatan	1	KPH Wilayah I Meranti	UNIT IV	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
	2	KPH Wilayah II Lalan	UNIT II	
			UNIT III	
	3	KPH Wilayah III Palembang-Banyuasin	UNIT I	
	4	KPH Wilayah IV Sungai Lumpur - Riding	UNIT XXIII	
			UNIT XXIV	
	5	KPH Wilayah IX Suban Jeriji	UNIT XIV	
	6	KPH Wilayah V Lempuing - Mesuji	UNIT XXI	
			UNIT XXII	
	7	KPH Wilayah VI Bukit Nanti - Martapura	UNIT XV	
			UNIT XX	
	8	KPH Wilayah VII Mekakau - Saka	UNIT XIX	
			UNIT XVI	
			UNIT XVII	
			UNIT XVIII	
	9	KPH Wilayah VIII Semendo	UNIT XIII	
	10	KPH Wilayah X Dempo	UNIT XII	
	11	KPH Wilayah XI Kikim - Pasemah	UNIT IX	
			UNIT X	
			UNIT XI	
	12	KPH Wilayah XII Benakat	UNIT VII	
	13	KPH Wilayah XIII Lakitan - Bukit Cogong	UNIT VI	
			UNIT VIII	
	14	KPH Wilayah XIV Rawas	UNIT V	
Sumatera Utara	1	KPH Wilayah I Staba	UNIT I	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
			UNIT V	
	2	KPH Wilayah II Pematang Siantar	UNIT IX	
			UNIT VI	
			UNIT X	
			UNIT XII	
	3	KPH Wilayah III Kisaran	UNIT III	
			UNIT XIII	
	4	KPH Wilayah IV Balige	UNIT XIV	
			UNIT XXI	
	5	KPH Wilayah IX Panyabungan	XXIX	
	6	KPH Wilayah V Aek Kanopan	UNIT VII	
			UNIT XXII	
			UNIT XXIII	
	7	KPH Wilayah VI Sipirok	UNIT XXVI	
	8	KPH Wilayah VII Gunung Tua	UNIT XI	
			UNIT XXXI	
	9	KPH Wilayah VIII Kotanopan	UNIT XXX	
	10	KPH Wilayah X Padang Sidempuan	UNIT XXVIII	
	11	KPH Wilayah XI Pandan	UNIT XXIV	
			UNIT XXV	
			UNIT XXVII	
	12	KPH Wilayah XII Tarutung	UNIT XVI	
			UNIT XX	
	13	KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul	UNIT XIX	
			UNIT XVII	
			UNIT XVIII	

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	14	KPH Wilayah XIV Sidikalang	UNIT VIII UNIT XV	
	15	KPH Wilayah XV Kabanjahe	UNIT II UNIT IV	
	16	KPH Wilayah XVI Gunung Sitoli	UNIT XXXII UNIT XXXIII	
Yogyakarta	1	BKPH Yogyakarta	-	Peraturan Gubernur DIY Nomor. 96 Tahun 2015
Kalimantan Barat	1	KPH Bengkayang	UNIT II	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 147 Tahun 2016
	2	KPH Kapuas Hulu Selatan	UNIT XXI	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 135 Tahun 2016
	3	KPH Kapuas Hulu Timur	UNIT XX	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2016
	4	KPH Kapuas Hulu Utara	Unit XVIII Unit XIX	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 137 Tahun 2016
	5	KPH Kayong	UNIT XXV	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 138 Tahun 2016
	6	KPH Ketapang Selatan	UNIT XXIX UNIT XXX UNIT XXXI UNIT XXXII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 139 Tahun 2016
	7	KPH Ketapang Utara	UNIT XXXIII UNIT XXVI UNIT XXVII UNIT XXVIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 140 Tahun 2016
	8	KPH Kubu Raya	UNIT XXXIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 141 Tahun 2016
	9	KPH Landak	UNIT VI UNIT VII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 134 Tahun 2016
	10	KPH Melawi	UNIT XIII UNIT XXII UNIT XXIV	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 142 Tahun 2016
	11	KPH Mempawah	UNIT VIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 133 Tahun 2016
	12	KPH Sambas	UNIT I	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 143 Tahun 2016
	13	KPH Sanggau Barat	UNIT III UNIT V	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 144 Tahun 2016
	14	KPH Sanggau Timur	UNIT IV UNIT XI	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 145 Tahun 2016
	15	KPH Sekadau	UNIT XII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 146 Tahun 2016
	16	KPH Sintang Timur	UNIT XIV UNIT XV UNIT XVI UNIT XVII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 149 Tahun 2016
	17	KPH Sintang Utara	UNIT IX UNIT X Unit XXXIV	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 148 Tahun 2016
Kalimantan Selatan	1	KPH Balangan	UNIT VIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0102 Tahun 2018
	2	KPH Cantung	UNIT II	
	3	KPH Sengayam	UNIT IV	
	4	KPH Hulu Sungai	UNIT IX	
	5	KPH Kayu Tangi	UNIT I	
	6	KPH Kusan	UNIT VI	
	7	KPH Pulau Laut Sebuku	UNIT III	
	8	KPH Tabalong	UNIT V UNIT X	
	9	KPH Tanah Laut	UNIT VII	
Kalimantan Tengah	1	KPHL Gerbang Barito	UNIT IX	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
	2	KPHL Kapuas - Kahayan	UNIT IV UNIT XXXII UNIT XXXIII	
	3	KPHP Barito Hilir	UNIT VII UNIT XIV	
	4	KPHP Barito Hulu	UNIT V	
	5	KPHP Barito Tengah	UNIT VI UNIT VIII	
	6	KPHP Kahayan Hilir	UNIT XXXI	
	7	KPHP Kahayan Hulu	UNIT XV UNIT XVI	
	8	KPHP Kahayan Tengah	UNIT III UNIT XIII UNIT XVIII	
	9	KPHP Kapuas Hulu	UNIT X UNIT XII	
	10	KPHP Kapuas Tengah	UNIT XI	
	11	KPHP Katingan Hilir	UNIT XXX	
	12	KPHP Katingan Hulu	UNIT XVII	
	13	KPHP Kotawaringin Barat	UNIT XXII UNIT XXVI	
	14	KPHP Mentaya Hulu - Seruyan Tengah	UNIT XIX UNIT XX	
	15	KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hilir	UNIT XXIX UNIT XXVII UNIT XXVIII	

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	16	KPHP Murung Raya	UNIT I UNIT II	
	17	KPHP Seruyan Hulu	UNIT XXI	
	18	KPHP Sukamara - Lamandau	UNIT XXIII UNIT XXIV UNIT XXV	
Kalimantan Timur	1	KPHP Bengalon	UNIT XVII UNIT XVIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016
	2	KPHP Berau Barat	UNIT XII UNIT XIV UNIT XV UNIT XVI	
	3	KPHP Bongan	UNIT XXX UNIT XXXII	
	4	KPHP Das Belayan	UNIT XXIX UNIT XXVI UNIT XXVIII	
	5	KPHP Batu Ayau	UNIT XXII UNIT XXIII UNIT XXV	
	6	KPHP Meratus	UNIT XXIV UNIT XXXI	
	7	KPHP Kendilo	UNIT XXXIII Unit XXXIV	
	8	KPHP Santan	UNIT XIX UNIT XXVII	
Kalimantan Utara	1	KPH Bulungan	UNIT IX UNIT VIII UNIT XIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016
	2	KPH Malinau	UNIT II UNIT X UNIT XI UNIT XX UNIT XXI	
	3	KPH Nunukan	UNIT I UNIT III UNIT IV	
	4	KPH Tana Tidung	UNIT V UNIT VII	
	5	KPH Tarakan	UNIT VI	
Gorontalo	1	KPH Wil. I dan Wil. II Gorontalo Barat	UNIT I UNIT II	Peraturan Gubernur Gorontalo No. 85 Tahun 2016
	2	KPH Wil. III Pahuwato	UNIT III	
	3	KPH Wil. IV Gorontalo Utara	UNIT IV	
	4	KPH Wil. V Boalemo	UNIT V	
	5	KPH Wil. VI Gorontalo	UNIT VI	
	6	KPH Wil. VII Bone Bolango dan Gorontalo	UNIT VII	
Maluku	1	KPH Ambon	UNIT XIII UNIT XIV	Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2017
	2	KPH Buru	UNIT II	
	3	KPH Buru Selatan	UNIT I UNIT III	
	4	KPH Kepulauan Aru	UNIT XXI UNIT XXII	
	5	KPH Kota Tual	UNIT XV	
	6	KPH Maluku Barat Daya	UNIT XIX UNIT XX	
	7	KPH Maluku Tengah	UNIT IX UNIT VI UNIT VII UNIT VIII	
	8	KPH Maluku Tenggara	UNIT XVI	
	9	KPH Maluku Tenggara Barat	UNIT XVII UNIT XVIII	
	10	KPH Seram Bagian Barat	UNIT IV UNIT V	
	11	KPH Seram Bagian Timur	UNIT X UNIT XI UNIT XII	
Maluku Utara	1	KPH Halmahera Barat	UNIT III	Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 69 Tahun 2016
	2	KPH Halmahera Selatan	UNIT XII UNIT XIII UNIT XIV	
	3	KPH Halmahera Tengah	UNIT VI UNIT VII	
	4	KPH Halmahera Timur	UNIT IV UNIT V UNIT VIII	

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	5	KPH Halmahera Utara	UNIT II	
	6	KPH Kepulauan Sula	UNIT XV	
	7	KPH Pulau Morotai	UNIT I	
	8	KPH Pulau Taliabu	UNIT XVI	
	9	KPH Ternate-Tidore	UNIT XI	
	10	KPH Tidore Kepulauan	UNIT IX UNIT X	
Sulawesi Barat	1	KPH Bonehau Kalumpang	UNIT XII UNIT XIII	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46.a Tahun 2016
	2	KPH Budong-Budong	UNIT V	
	3	KPH Karama	UNIT VI	
	4	KPH Karossa	UNIT IV	
	5	KPH Lariang	UNIT II	
	6	KPH Malunda	UNIT X	
	7	KPH Mamasa Barat	UNIT VII	
	8	KPH Mamasa Tengah	UNIT VIII	
	9	KPH Mamasa Timur	UNIT IX	
	10	KPH Mapili	UNIT XI	
	11	KPH Pasangkayu	UNIT I	
	12	KPH Sarudu	UNIT III	
Sulawesi Selatan	1	KPH AJATAPPARENG	UNIT II	Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018
	2	KPH BILA	UNIT III	
	3	KPH BULUSARAUNG	UNIT I	
	4	KPH CENRANA	UNIT XIII	
	5	KPH JENEBERANG I	UNIT XIV	
	6	KPH JENEBERANG II	UNIT XV	
	7	KPH KALAENA	UNIT X	
	8	KPH LARONA MALILI	UNIT XI	
	9	KPH LATIMOJONG	UNIT VIII	
	10	KPH MATA ALLO	UNIT V	
	11	KPH RONGKONG	UNIT IX	
	12	KPH SADDANG I	UNIT VI	
	13	KPH SADDANG II	UNIT VII	
	14	KPH SAWITTO	UNIT IV	
	15	KPH SELAYAR	UNIT XVI	
	16	KPH WALANAE	UNIT XII	
Sulawesi Tengah	1	KPH Balantak	UNIT XVIII UNIT XX	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018
	2	KPH Banawa Lalundu	UNIT VII	
	3	KPH Dampelas Tinombo	UNIT III UNIT IV	
	4	KPH Dolago Tanggunung	UNIT V Unit VI Unit VI	
	5	KPH Gunung Dako	UNIT II	
	6	KPH Kulawi	UNIT VIII	
	7	KPH Pogogul	UNIT I	
	8	KPH Pulau Peling	UNIT XXI	
	9	KPH Sintuwu Maroso	UNIT X UNIT XI UNIT XII	
	10	KPH Sivia Patuju	UNIT XVI UNIT XVII	
	11	KPH Toili Baturube	UNIT XIX	
	12	KPH Tepe Asa Maroso	UNIT XIV	
	13	KPH Tepo Asa Aroa	UNIT XIII UNIT XV	
Sulawesi Tenggara	1	KPH UNIT I KAPONTORI	UNIT I	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2017
	2	KPH UNIT II LASALIMU	UNIT II	
	3	KPH UNIT III LAKOMPA	UNIT III	
	4	KPH UNIT IV KATONDOKI	UNIT IV	
	5	KPH UNIT IX PULAU KABAENA	UNIT IX	
	6	KPH UNIT V WAKONTI	UNIT V	
	7	KPH UNIT VI PULAU MUNA	UNIT VI	
	8	KPH UNIT VII PEROPA EA	UNIT VII	
	9	KPH UNIT VIII GANTARA	UNIT VIII	
	10	KPH UNIT X TINA ORIMA	UNIT X	
	11	KPH UNIT XI MEKONGGA SELATAN	UNIT XI	
	12	KPH UNIT XII LADONGI	UNIT XII	
	13	KPH UNIT XIII MEKONGGA UTARA	UNIT XIII	

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	14	KPH UNIT XIV UEESI	UNIT XIV	
	15	KPH UNIT XIX LAIWOI UTARA	UNIT XIX	
	16	KPH UNIT XV ALAAHA	UNIT XV	
	17	KPH Unit XVI Patampunua Selatan	UNIT XVI	
	18	KPH UNIT XVII PATAMPANUA UTARA	UNIT XVII	
	19	KPH UNIT XVIII LAIWOI BARAT	UNIT XVIII	
	20	KPH UNIT XX LAIWOI TENGAH	UNIT XX	
	21	KPH UNIT XXI LAIWOI TENGGARA	UNIT XXI	
	22	KPH UNIT XXII LAIWOI	UNIT XXII	
	23	KPH UNIT XXIII PULAU WAWONII	UNIT XXIII	
	24	KPH UNIT XXIV GULARAYA	UNIT XXIV	
	25	KPH UNIT XXV WAKATOBI	UNIT XXV	
Sulawesi Utara	1	KPHL UNIT III KEP. SANGIHE, KEP.	UNIT III	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 98 Tahun 2016
	2	KPHL Unit VI Minahasa Utara - Bitung -	UNIT VI	
	3	KPHP Unit I Bolaang Mongondow dan	UNIT I	
	4	KPHP UNIT II BOLAANG MONGONDOW	UNIT II	
	5	KPHP Unit IV Model Poigar	UNIT IV	
	6	KPHP UNIT V MINAHASA, TOMOHON,	UNIT V	
Bali	1	KPH BALI BARAT	UNIT I	Peraturan Gubernur Bali Nomor 111 Tahun 2016
	2	KPH BALI SELATAN	UNIT IV	
	3	KPH BALI TIMUR	UNIT III	
	4	KPH BALI UTARA	UNIT II	
Nusa Tenggara Barat	1	Balai KPH Ampang Plampang	UNIT XIII	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 29 Tahun 2018
			UNIT XIV	
	2	Balai KPH Ampang Riwo	UNIT XV	
	3	Balai KPH Batulanteh	UNIT IX	
	4	Balai KPH Brang Beh	UNIT XI	
	5	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	UNIT VII	
			UNIT VIII	
	6	Balai KPH Madapangga, Rompu, Waworada	UNIT XX	
			UNIT XXI	
	7	Balai KPH Maria Donggomassa	UNIT XXII	
			UNIT XXIII	
	8	Balai KPH Orong Telu	UNIT X	
	9	Balai KPH Pelangan Tastura	UNIT II	
			UNIT III	
	10	Balai KPH Rinjani Barat	UNIT I	
	11	Balai KPH Rinjani Timur	UNIT IV	
	12	Balai KPH Ropang	UNIT XII	
	13	Balai KPH Sejong Mataiyang	UNIT V	
			UNIT VI	
	14	Balai KPH Tambora	UNIT XVII	
			UNIT XVIII	
	15	Balai KPH Tofopajo Soromandi	UNIT XIX	
			UNIT XVI	
Nusa Tenggara Timur	1	KPH Wilayah Kabupaten Alor	UNIT X	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 90 Th. 2016
	2	KPH WILAYAH KABUPATEN BELU	XXII	
	3	KPH Wilayah Kabupaten Ende	UNIT VI	
	4	KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur	UNIT VIII	
	5	KPH Wilayah Kabupaten Kupang	UNIT XVII	
	6	KPH Wilayah Kabupaten Lembata	UNIT IX	
	7	KPH Wilayah Kabupaten Malaka	UNIT XIX	
	8	KPH Wilayah Kabupaten Manggarai	UNIT II	
	9	KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat	UNIT I	
	10	KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	UNIT III	
	11	KPH Wilayah Kabupaten Nagekeo	UNIT V	
	12	KPH Wilayah Kabupaten Ngada	UNIT IV	
	13	KPH Wilayah Kabupaten Rote Ndao	UNIT XVI	
	14	KPH Wilayah Kabupaten Sabu Raijua	UNIT XV	
	15	KPH Wilayah Kabupaten Sikka	VII	
	16	KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat	UNIT XII	
	17	KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	UNIT XI	
	18	KPH Wilayah Kabupaten Sumba Tengah	UNIT XIII	
	19	KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah	XX	
	20	KPH Wilayah Kota Kupang	UNIT XVIII	
	21	KPH Wilayah Timor Tengah Utara	UNIT XXI	
	22	UPT - KPH Wilayah Kabupaten Sumba	UNIT XIV	

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
Papua	1	KPHP Unit XXIII Sarmi	UNIT XXIII	Peraturan Gubernur Papua No. 31 Tahun 2017
	2	KPHP UNIT LIII Boven Digoel	UNIT LIII	
	3	KPHL Unit XX Biak Numfor	UNIT XX	
	4	KPHP Unit XVII Waropen	Unit XVII	
	5	KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen	UNIT XIX	
	6	KPHP Unit XXIX Keerom	Unit XXIX	
	7	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI -	Unit XXI	
	8	KPHL Unit II Nabire	UNIT II	
	9	KPHL Unit VI Mimika	UNIT VI	
	10	KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	UNIT XXVIII	
	11	KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang	UNIT XXXV	
	12	KPHL Unit XLII Jayawijaya	UNIT XLII	
	13	KPHL Unit XLII Lani Jaya		
	14	KPHP Unit XLIII Nduga	UNIT XLIII	
Papua Barat	1	KPHL Unit I Raja Ampat	UNIT I	Peraturan Gubernur Papua Barat No. 5 Tahun 2018
	2	KPHP Unit II Sorong	UNIT II	
	3	KPHL Unit II Sorong		
	3	KPHL Unit VII Sorong Selatan	UNIT VII	
	4	KPHL Unit XII Manokwari	UNIT XII	
	6	KPHP Unit IV Tambrau	UNIT IV	
	7	KPHP Unit V Sorong Selatan	UNIT V	
	8	KPHP Unit XV Bintuni	UNIT XV	
	9	KPHP Unit XVI Fakfak	UNIT XVI	

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2018

TABEL V.5. PENETAPAN KPH FASILITASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	2	3	4	5
1	Aceh	UNIT I KPHL	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	568.250
2	Aceh	UNIT II KPHL	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	253.948
3	Aceh	UNIT IV KPHL	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	402.986
4	Aceh	UNIT V KPHL	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	290.162
5	Aceh	UNIT VI KPHL	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	310.552
6	Sumatera Utara	UNIT XVI KPHL	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	72.166
7	Sumatera Utara	UNIT XVII KPHP	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	86.555
8	Sumatera Utara	UNIT XVIII KPHL	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	49.415
9	Sumatera Utara	UNIT XX KPHP	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	88.931
10	Sumatera Utara	UNIT XXIII KPHL	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	64.937
11	Sumatera Utara	UNIT XXIV KPHL	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	124.347
12	Sumatera Utara	UNIT XXV KPHL	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	60.396
13	Sumatera Utara	UNIT XXVI KPHL	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	174.395
14	Sumatera Utara	UNIT XXVII KPHP	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	38.071
15	Sumatera Utara	UNIT XXVIII KPHP	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	127.758
16	Sumatera Utara	UNIT XXXI KPHP	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	270.460
17	Sumatera Selatan	UNIT II KPHP	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	62.486
18	Sumatera Selatan	UNIT XII KPHL	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	26.052
19	Sumatera Selatan	UNIT XIII KPHL	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	69.431
20	Sumatera Selatan	UNIT XIV KPHP	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	179.044
21	Sumatera Selatan	UNIT XV KPHL	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	94.847
22	Sumatera Selatan	UNIT XVI KPHL	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	29.706
23	Kep. Riau	UNIT III KPHP	SK.634/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	98.752
24	Kep. Riau	UNIT IV KPHP	SK.634/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	46.756
25	Riau	UNIT V KPHP	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	23.438
26	Riau	UNIT VII KPHP	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	102.958
27	Riau	UNIT XIV KPHP	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	67.118
28	Riau	UNIT XX KPHP	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	168.458
29	Riau	UNIT XXI KPHP	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	124.109
30	Riau	UNIT XXX KPHP	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	150.718
31	Riau	UNIT XXXI KPHL	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	88.870
32	Kep. Bangka Belitung	UNIT II KPHP	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	103.539
33	Kep. Bangka Belitung	UNIT III KPHP	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	89.310
34	Kep. Bangka Belitung	UNIT VIII KPHP	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	171.189
35	Kep. Bangka Belitung	UNIT X KPHL	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	97.508
36	Bengkulu	UNIT III KPHL	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	96.125
37	Bengkulu	UNIT IV KPHL	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	82.242
38	Bengkulu	UNIT V KPHL	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	48.686
39	Bengkulu	UNIT VI KPHL	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	78.232
40	Jambi	UNIT IX KPHP	SK.632/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	142.967
41	Jambi	UNIT X KPHP	SK.632/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	103.650
42	Lampung	UNIT II KPHL	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	42.074
43	Lampung	UNIT VII KPHL	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	24.337
44	Lampung	UNIT VIII KPHL	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	21.117
45	Lampung	UNIT XV KPHL	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	24.285
46	Nusa Tenggara Barat	UNIT XVI KPHL	SK.631/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	25.422
47	Nusa Tenggara Barat	UNIT XX KPHP	SK.631/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	45.663
48	Nusa Tenggara Timur	UNIT II KPHL	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	17.736
49	Nusa Tenggara Timur	UNIT III KPHL	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	50.952
50	Nusa Tenggara Timur	UNIT IV KPHL	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	35.734
51	Nusa Tenggara Timur	UNIT IX KPHL	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	49.182
52	Nusa Tenggara Timur	UNIT V KPHP	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	32.791
53	Nusa Tenggara Timur	UNIT VI KPHP	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	57.740
54	Nusa Tenggara Timur	UNIT VII KPHL	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	36.999
55	Nusa Tenggara Timur	UNIT XI KPHL	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	20.647
56	Nusa Tenggara Timur	UNIT XX KPHP	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	69.461
57	Nusa Tenggara Timur	UNIT XXI KPHP	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	105.632
58	Nusa Tenggara Timur	UNIT XXII KPHL	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	46.537

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	2	3	4	5
59	Kalimantan Barat	UNIT XXIII KPHP	SK 620/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	189.599
60	Kalimantan Barat	UNIT XXIV KPHP	SK 620/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	179.461
61	Kalimantan Barat	UNIT XXV KPHP	SK 620/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	318.717
62	Kalimantan Utara	UNIT VII KPHP	SK 623/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	120.789
63	Kalimantan Timur	UNIT XXIX KPHP	SK 623/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	109.314
64	Kalimantan Timur	UNIT XXVI KPHP	SK 623/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	979.933
65	Kalimantan Timur	UNIT XXVII KPHP	SK 623/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	263.467
66	Kalimantan Timur	UNIT XXX KPHL	SK 623/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	15.130
67	Kalimantan Timur	UNIT XXXII KPHP	SK 623/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	333.166
68	Kalimantan Timur	UNIT XXXIII KPHP	SK 623/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	255.245
69	Kalimantan Selatan	UNIT IX KPHL	SK 624/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	62.186
70	Kalimantan Selatan	UNIT VI KPHP	SK 624/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	262.919
71	Kalimantan Tengah	UNIT III KPHP	SK 629/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	59.185
72	Kalimantan Tengah	UNIT V KPHP	SK 629/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	334.069
73	Kalimantan Tengah	UNIT XIV KPHP	SK 629/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	48.400
74	Kalimantan Tengah	UNIT XXIX KPHP	SK 629/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	200.518
75	Kalimantan Tengah	UNIT XXXI KPHP	SK 629/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	378.819
76	Sulawesi Utara	UNIT VI KPHL	SK 625/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	27.101
77	Gorontalo	UNIT VII KPHP	SK 639/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	35.784
78	Sulawesi Tengah	UNIT II KPHP	SK 618/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	162.785
79	Sulawesi Tengah	UNIT VII KPHP	SK 618/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	109.923
80	Sulawesi Tengah	UNIT XIV KPHP	SK 618/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	190.830
81	Sulawesi Tengah	UNIT XXI KPHP	SK 618/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	117.079
82	Sulawesi Barat	UNIT IV KPHP	SK 636/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	63.110
83	Sulawesi Barat	UNIT VI KPHP	SK 636/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	156.917
84	Sulawesi Tenggara	UNIT V KPHP	SK 635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	12.179
85	Sulawesi Tenggara	UNIT VI KPHP	SK 635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	73.726
86	Sulawesi Tenggara	UNIT XI KPHP	SK 635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	46.580
87	Sulawesi Tenggara	UNIT XII KPHP	SK 635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	47.088
88	Sulawesi Tenggara	UNIT XIII KPHL	SK 635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	125.717
89	Sulawesi Tenggara	UNIT XIV KPHL	SK 635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	163.744
90	Sulawesi Tenggara	UNIT XIX KPHP	SK 635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	113.580
91	Sulawesi Tenggara	UNIT XXV KPHL	SK 635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	10.022
92	Sulawesi Selatan	UNIT X KPHP	SK 616/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	20.901
93	Maluku Utara	UNIT IV KPHP	SK 619/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	199.327
94	Maluku Utara	UNIT IX KPHP	SK 619/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	17.998
95	Maluku Utara	UNIT XVI KPHP	SK 619/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	168.726
96	Maluku	UNIT I KPHP	SK 638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	144.539
97	Maluku	UNIT XIV KPHL	SK 638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	10.288
98	Maluku	UNIT XVI KPHL	SK 638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	11.836
99	Maluku	UNIT XVIII KPHP	SK 638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	132.339
100	Maluku	UNIT XXI KPHP	SK 638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	70.159
101	Maluku	UNIT XXII KPHP	SK 638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	0
102	Papua Barat	UNIT I KPHL	SK 630/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	192.142
103	Papua Barat	UNIT IV KPHP	SK 630/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	139.738
104	Papua Barat	UNIT XV KPHP	SK 630/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	640.508
105	Papua Barat	UNIT XVI KPHP	SK 630/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	209.554
106	Papua	UNIT II KPHL	SK 622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	359.135
107	Papua	UNIT LI KPHP	SK 622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	666.097
108	Papua	UNIT VI KPHL	SK 622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	273.223
109	Papua	UNIT X KPHL	SK 622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	627.940
110	Papua	UNIT XLII KPHL	SK 622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	139.928
111	Papua	UNIT XLIII KPHL	SK 622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	257.531
112	Papua	UNIT XXII KPHP	SK 622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	185.260
113	Papua	UNIT XXVIII KPHP	SK 622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	47.726
114	Papua	UNIT XXXV KPHL	SK 622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	299.129
115	Sumatera Barat	UNIT I	SK 832/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	323.501
116	Sumatera Barat	UNIT III	SK 832/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	62.368
117	Sumatera Utara	UNIT I	SK 831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	69.878
118	Sumatera Utara	UNIT II	SK 831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	80.002
119	Sumatera Utara	UNIT XII	SK 831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	56.223
120	Sumatera Utara	UNIT XV	SK 831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	89.851
121	Kalimantan Selatan	UNIT XIX	SK 833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	32.419
122	Kalimantan Selatan	UNIT XX	SK 833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	27.076
123	Kalimantan Selatan	UNIT XXI	SK 833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	44.592
124	Kalimantan Selatan	UNIT XXII	SK 833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	91.392
125	Kalimantan Selatan	UNIT XXIII	SK 833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	206.254
126	Kalimantan Selatan	UNIT XXIV	SK 833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	407.604

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	2	3	4	5
127	Kalimantan Barat	UNIT I	SK 834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	127.794
128	Kalimantan Barat	UNIT VIII	SK 834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	94.544
129	Kalimantan Barat	UNIT XIII	SK 834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	56.013
130	Kalimantan Barat	UNIT XV	SK 834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	207.079
131	Kalimantan Barat	UNIT XVI	SK 834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	324.662
132	Kalimantan Barat	UNIT XXX	SK 834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	70.458
133	Kalimantan Barat	UNIT XXXI	SK 834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	261.701
134	Kalimantan Barat	UNIT XXXIII	SK 834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	318.804
135	Kalimantan Timur	UNIT XXII	SK 835/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	658.129
136	Kalimantan Selatan	UNIT VIII	SK 836/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	141.349
137	Maluku Utara	UNIT XII	SK 838/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	170.442
138	Sulawesi Utara	UNIT V	SK 837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	13.356
139	Sulawesi Utara	UNIT VIII	SK 837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	27.101
140	Sulawesi Utara	UNIT IX	SK 837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	13.272
141	Sulawesi Barat	UNIT IX	SK 840/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	51.086
142	Sulawesi Selatan	UNIT V	SK 839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	143.751
143	Sulawesi Selatan	UNIT VI	SK 839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	59.954
144	Sulawesi Selatan	UNIT VII	SK 839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	130.508
145	Nusa Tenggara Barat	UNIT VI	SK 841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	32.340
146	Nusa Tenggara Barat	UNIT VII	SK 841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	40.645
147	Nusa Tenggara Barat	UNIT VIII	SK 841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	44.461
148	Nusa Tenggara Barat	UNIT X	SK 841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	55.226
149	Nusa Tenggara Barat	UNIT XI	SK 841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	64.134
150	Nusa Tenggara Barat	UNIT XII	SK 841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	74.733
151	Nusa Tenggara Barat	UNIT XIII	SK 841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	33.610
152	Nusa Tenggara Barat	UNIT XV	SK 841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	42.630
153	Nusa Tenggara Barat	UNIT XIX	SK 841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	44.082
154	Nusa Tenggara Barat	UNIT XXII	SK 841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	43.399
155	Maluku	UNIT V	SK 842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	92.002
156	Maluku	UNIT XII	SK 842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	193.041
157	Maluku	UNIT XV	SK 842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	10.067
158	Papua	UNIT III	SK 843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	194.846
159	Papua	UNIT XXIII	SK 843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	122.820
160	Papua	UNIT XXV	SK 843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	354.901
161	Papua	UNIT XLVII	SK 843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	461.382
162	Papua	UNIT XLVIII	SK 843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	573.543
163	Papua	UNIT XLIX	SK 843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	539.996
164	Papua	UNIT LIII	SK 843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	649.375
165	Papua	UNIT LVI	SK 843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	363.877
166	Kep. Riau	UNIT II	SK 844/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	32.472
167	Kep. Riau	UNIT V	SK 844/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	61.403
168	Jambi	UNIT VIII	SK 845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	110.327
169	Jambi	UNIT XII	SK 845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	79.305
170	Jambi	UNIT XIII	SK 845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	103.528
171	Jambi	UNIT XIV	SK 845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	80.852
172	Jambi	UNIT XV	SK 845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	91.626
173	Jambi	UNIT XVI	SK 845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	122.504
174	Kep. Bangka Belitung	UNIT VI	SK 845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	27.199
175	Nusa Tenggara Timur	UNIT XIV	SK 847/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	116.160
176	Nusa Tenggara Timur	UNIT XVII	SK 847/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	113.398
177	Gorontalo	UNIT II	SK 848/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	90.644
178	Sulawesi Tengah	UNIT III	SK 849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	134.726
179	Sulawesi Tengah	UNIT V	SK 849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	111.273
180	Sulawesi Tengah	UNIT VIII	SK 849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	220.766
181	Papua Barat	UNIT VI	SK 850/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	225.183
182	Papua Barat	UNIT XII	SK 850/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	256.207
183	Riau	UNIT I	SK 851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	110.513
184	Riau	UNIT II	SK 851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	141.080
185	Riau	UNIT III	SK 851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	1.313.825
186	Riau	UNIT IV	SK 851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	80.347
187	Riau	UNIT VI	SK 851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	224.663
188	Riau	UNIT XII	SK 851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	149.905
189	Riau	UNIT XV	SK 851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	87.370
190	Riau	UNIT XIX	SK 851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	35.000
191	Riau	UNIT XXIII	SK 851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	69.397
192	Riau	UNIT XXV	SK 851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	67.827
193	Riau	UNIT XXVII	SK 851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	42.898
194	Riau	UNIT XXVIII	SK 851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	231.490
195	Riau	UNIT XXIX	SK 851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	61.182
196	Riau	UNIT XXXII	SK 851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	96.697

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	2	3	4	5
197	Lampung	UNIT XI	SK.852/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	47.746
198	Lampung	UNIT XIII	SK.852/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	8.025
199	Kalimantan Tengah	UNIT IV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	7.804
200	Kalimantan Tengah	UNIT VII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	158.785
201	Kalimantan Tengah	UNIT X	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	244.231
202	Kalimantan Tengah	UNIT XI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	274.875
203	Kalimantan Tengah	UNIT XVII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	681.864
204	Kalimantan Tengah	UNIT XVIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	140.418
205	Kalimantan Tengah	UNIT XIX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	366.726
206	Kalimantan Tengah	UNIT XXIV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	92.242
207	Kalimantan Tengah	UNIT XXV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	157.199
208	Kalimantan Tengah	UNIT XXVII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	302.601
209	Kalimantan Tengah	UNIT XXVIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	144.535
210	Kalimantan Tengah	UNIT XXX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	217.832
211	Sulawesi Tenggara	UNIT VIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	18.588
212	Sulawesi Tenggara	UNIT XVI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	126.917
213	Sulawesi Tenggara	UNIT XX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	230.547
214	Sulawesi Tenggara	UNIT XXI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16	65.901
215	Gorontalo	UNIT I	SK.472/MENLHK/SETJEN/PLA.O/9/2017	07-Sep-17	52.326
216	Kalimantan Selatan	UNIT II	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	209.297
217	Kalimantan Selatan	UNIT IV	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	141.553
218	Kalimantan Selatan	UNIT X	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	117.914
219	Kalimantan Tengah	UNIT I	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	1.063.147
220	Kalimantan Tengah	UNIT VI	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	180.311
221	Kalimantan Tengah	UNIT VIII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	107.713
222	Kalimantan Tengah	UNIT XII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	184.028
223	Kalimantan Tengah	UNIT XIII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	182.947
224	Kalimantan Tengah	UNIT XV	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	203.828
225	Kalimantan Tengah	UNIT XX	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	189.920
226	Kalimantan Tengah	UNIT XXXII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	185.915
227	Lampung	UNIT I	SK.473/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	39.001
228	Lampung	UNIT XIV	SK.473/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	9.866
229	Maluku Utara	UNIT I	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	150.493
230	Maluku Utara	UNIT II	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	103.970
231	Maluku Utara	UNIT V	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	78.287
232	Maluku Utara	UNIT VI	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	72.706
233	Maluku Utara	UNIT VII	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	93.115
234	Maluku Utara	UNIT VIII	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	37.199
235	Maluku Utara	UNIT III	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	165.028
236	Maluku Utara	UNIT IX	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	8.477
237	Maluku Utara	UNIT XIV	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	190.756
238	Maluku Utara	UNIT XV	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	97.118
239	Nusa Tenggara Barat	UNIT II	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	18.022
240	Nusa Tenggara Barat	UNIT XVII	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	32.245
241	Nusa Tenggara Barat	UNIT XXI	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	20.900
242	Sulawesi Tengah	UNIT X	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	88.200
243	Sulawesi Tengah	UNIT XIII	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	170.930
244	Sulawesi Tengah	UNIT XVI	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	211.056
245	Sulawesi Tengah	UNIT XII	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	92.179
246	Sulawesi Tengah	UNIT XV	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	156.582
247	Sulawesi Tengah	UNIT XVIII	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	179.581
248	Sumatera Utara	UNIT III	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	28.145
249	Sumatera Utara	UNIT IX	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	9.740
250	Sumatera Utara	UNIT XI	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	42.052
251	Sumatera Utara	UNIT XIII	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	54.720
252	Sumatera Utara	UNIT XXX	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	120.968
253	Sumatera Utara	UNIT XXXII	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07-Sep-17	143.895
254	Sumatera Utara	UNIT IV	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	42.717
255	Sumatera Utara	UNIT VII	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	32.287
256	Sumatera Utara	UNIT VIII	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	49.236
257	Sumatera Utara	UNIT X	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	4.884
258	Sumatera Utara	UNIT XIX	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	19.808
259	Sumatera Utara	UNIT V	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	37.771
260	Sumatera Utara	UNIT VI	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	45.638
261	Sumatera Utara	UNIT XXI	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	38.277
262	Sumatera Utara	UNIT XXXIII	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	109.733
263	Sumatera Barat	UNIT VII	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	182.908
264	Sumatera Barat	UNIT X	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	123.467
265	Sumatera Barat	UNIT XI	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	134.750
266	Sumatera Selatan	UNIT IX	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	33.553
267	Sumatera Selatan	UNIT X	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	39.912
268	Sumatera Selatan	UNIT XI	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Dec-17	40.701

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	2	3	4	5
269	Sumatera Selatan	UNIT XVII	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	43.001
270	Sumatera Selatan	UNIT XVIII	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	50.894
271	Sumatera Selatan	UNIT VIII	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	6.504
272	Kalimantan Timur	UNIT XIV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	324.054
273	Kalimantan Timur	UNIT XV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	326.041
274	Kalimantan Timur	UNIT XVI	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	142.933
275	Kalimantan Timur	UNIT XVII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	239.921
276	Kalimantan Timur	UNIT XVIII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	673.912
277	Kalimantan Timur	UNIT XIX	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	928.748
278	Kalimantan Timur	UNIT XXIII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	201.533
279	Kalimantan Timur	UNIT XXIV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	534.036
280	Kalimantan Timur	UNIT XXV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	410.598
281	Kalimantan Timur	UNIT XXVIII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	296
282	Kalimantan Utara	UNIT I	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	47.189
283	Kalimantan Utara	UNIT II	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	357.466
284	Kalimantan Utara	UNIT III	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	178.204
285	Kalimantan Utara	UNIT IV	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	400.454
286	Kalimantan Utara	UNIT V	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	42.817
287	Kalimantan Utara	UNIT VIII	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	197.730
288	Kalimantan Utara	UNIT XI	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	606.599
289	Kalimantan Utara	UNIT XIII	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	211.140
290	Kalimantan Utara	UNIT XX	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	560.400
291	Kalimantan Utara	UNIT XXI	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	448.602
292	Sulawesi Utara	UNIT III	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	26.605
293	Sulawesi Utara	UNIT I	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	143.923
294	Sulawesi Utara	UNIT II	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	138.402
295	Sulawesi Barat	UNIT I	SK.730/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	23.729
296	Sulawesi Barat	UNIT III	SK.730/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	71.611
297	Kepulauan Riau	UNIT VI	SK.731/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	22.832
298	Jambi	UNIT II	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	45.460
299	Jambi	UNIT III	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	69.492
300	Jambi	UNIT IV	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	50.930
301	Jambi	UNIT V	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	53.412
302	Jambi	UNIT XI	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	103.979
303	Kep. Bangka Belitung	UNIT VII	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	45.497
304	Kep. Bangka Belitung	UNIT XII	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	47.750
305	Kep. Bangka Belitung	UNIT IX	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	55.249
306	Kep. Bangka Belitung	UNIT XI	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	30.848
307	Nusa Tenggara Timur	UNIT XV	SK.734/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	9.970
308	Riau	UNIT XVI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	62.723
309	Riau	UNIT VIII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	105.279
310	Riau	UNIT X	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	64.885
311	Riau	UNIT XI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	29.812
312	Riau	UNIT XIII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	72.739
313	Riau	UNIT XVII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	27.330
314	Riau	UNIT XXVI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29-Des-17	117.912

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2018

TABEL V.6 PENGESAHAN RPHJP KPH

No.	Penetapan	Nama KPH	Jenis KPH	Provinsi	SK RPHJP
1	2	3	4	5	6
1	PENETAPAN MODEL	UNIT III ACEH	KPHL	Aceh	SK. 6062/MENLHK-KPHL/PKPHU/DAS.3/10/2016
2	PENETAPAN FASILITASI 2015	LINTAS KABUPATEN UNIT II	KPHL	Aceh	SK. 6943/MENLHK-KPHL/PKPHU/SET.1/12/2017
3	PENETAPAN MODEL	BALI TENGAH	KPHL	Bali	SK. 5046/Menthut-II/Reg.2-1/2014
4	PENETAPAN MODEL	BALI TIMUR	KPHL	Bali	SK. 5273/Menthut-II/Reg.2-1/2014
5	PENETAPAN MODEL	BALI BARAT	KPHL	Bali	SK. 5045/Menthut-II/Reg.2-1/2014
6	PENETAPAN MODEL	MUKO-MUKO	KPHP	Bengkulu	SK. 3038/Menthut-II/REG.I-1/2014
7	PENETAPAN MODEL	BUKIT BALAI REJANG	KPHL	Bengkulu	SK. 6481/MENLHK-KPHL/PKPHU/DAS.3/11/2016
8	PENETAPAN FASILITASI 2015	SELUMA	KPHL	Bengkulu	SK. 6480/MENLHK-KPHL/PKPHU/DAS.3/11/2016
9	PENETAPAN MODEL	POHUWATO	KPHL	Gorontalo	SK. 6523/Menthut-II/Reg.4-1/2014
10	PENETAPAN MODEL	BOALEMO	KPHP	Gorontalo	SK. 108/Menthut-II/Reg.4-2/2014
11	PENETAPAN MODEL	GORONTALO UTARA	KPHP	Gorontalo	SK. 6521/Menthut-II/Reg.4-1/2014
12	PENETAPAN MODEL	GORONTALO	KPHP	Gorontalo	SK. 7315/Menthut-II/Reg.4-1/2014
13	PENETAPAN FASILITASI 2015	BONE BOLANGO	KPHP	Gorontalo	SK. 6102/MenLHK-KPHP/PKPH/HPL.0/11/2016
14	PENETAPAN MODEL	LIMAU	KPHP	Jambi	SK. 198/Menthut-II/REG.I/2014
15	PENETAPAN MODEL	SUNGAI BERAM HITAM	KPHL	Jambi	SK.5429/MENLHK/KPHL-PKPHU/DAS.3/10/2017
16	PENETAPAN MODEL	KERINCI	KPHP	Jambi	SK.1983/MenLHK-KP-HP/PKPH/HPL.0/4/2017
17	PENETAPAN MODEL	KAPUAS HULU	KPHP	Kalimantan Barat	SK. 16/Menthut-II/REG.III/2014
18	PENETAPAN MODEL	KPHP MODEL PULAU LAUT DAN SEBUKU (KPHP UNIT III)	KPHP	Kalimantan Selatan	SK. 22/Menthut-II/Reg.III/2014
19	PENETAPAN MODEL	KPHP MODEL TANAH LAUT (KPHP UNIT VII)	KPHP	Kalimantan Selatan	SK. 21/Menthut-II/REG.III/2014
20	PENETAPAN MODEL	KPHL MODEL HULU SUNGAI SELATAN	KPHL	Kalimantan Selatan	SK.3617/MENLHK-KPHL/PKPHU/DAS.3/6/2017
21	PENETAPAN MODEL	KPHP MODEL BANJAR (KPHP UNIT I)	KPHP	Kalimantan Selatan	SK. 15/Menthut-II/REG.III/2014
22	PENETAPAN MODEL	KPHP MODEL TABALONG (KPHP UNIT V)	KPHP	Kalimantan Selatan	SK. 10/PHPL-KPHP/PKPH/HPL.0/12/2016
23	PENETAPAN FASILITASI 2015	KPHP TANAH BUMBU (KPHP UNIT VI)	KPHP	Kalimantan Selatan	SK. 52/MenLHK-KPHP/PKPH/HPL.0/1/2017
24	PENETAPAN FASILITASI 2017	KPHP CANTUNG (KPHP UNIT II)	KPHP	Kalimantan Selatan	SK.5676/MENLHK-KP-HP/PKPH/HPL.0/10/2017
25	PENETAPAN MODEL	UNIT XXXIII KAL TENG	KPHL	Kalimantan Tengah	SK. 17/Menthut-II/REG.III/2014
26	PENETAPAN MODEL	UNIT XXI KAL TENG	KPHP	Kalimantan Tengah	SK. 6/PHPL-KPHP/PKPH/HPL.0/12/2016
27	PENETAPAN MODEL	UNIT XXIII KAL TENG	KPHP	Kalimantan Tengah	SK. 8/PHPL-KPHP/PKPH/HPL.0/12/2016
28	PENETAPAN MODEL	UNIT XXII KAL TENG	KPHP	Kalimantan Tengah	SK. 5/PHPL-KPHP/PKPH/HPL.0/12/2016
29	PENETAPAN MODEL	UNIT II KAL TENG	KPHP	Kalimantan Tengah	SK. 9/PHPL-KPHP/PKPH/HPL.0/12/2016
30	PENETAPAN MODEL	UNIT XVI KAL TENG	KPHP	Kalimantan Tengah	SK. 7/PHPL-KPHP/PKPH/HPL.0/12/2016
31	PENETAPAN MODEL	BERAU BARAT	KPHP	Kalimantan Timur	SK. 19/Menthut-II/REG.III/2014
32	PENETAPAN MODEL	MERATUS	KPHP	Kalimantan Timur	SK. 20/Menthut-II/REG.III/2014
33	PENETAPAN MODEL	KENDILO	KPHP	Kalimantan Timur	SK.279/MenLHK-KPHP/PKPH/HPL.0/2/2017
34	PENETAPAN FASILITASI 2015	SANTAN	KPHP	Kalimantan Timur	SK. 284/MenLHK-KPHP/PKPH/HPL.0/2/2017
35	PENETAPAN FASILITASI 2015	DELTA MAHAKAM	KPHP	Kalimantan Timur	SK. 281/MenLHK-KPHP/PKPH/HPL.0/2/2017
36	PENETAPAN FASILITASI 2015	SUNGAI WAIN-SUNGAI MANGGAR	KPHL	Kalimantan Timur	SK.6940/MENLHK-KPHL/PKPHU/DAS.3/12/2017
37	PENETAPAN FASILITASI 2015	BONGAN	KPHP	Kalimantan Timur	SK. 283/MenLHK-KPHP/PKPH/HPL.0/2/2017
38	PENETAPAN FASILITASI 2015	TELAKE	KPHP	Kalimantan Timur	SK. 282/MenLHK-KPHP/PKPH/HPL.0/2/2017
39	PENETAPAN MODEL	MALINAU	KPHP	Kalimantan Utara	SK.2374/MENLHK-KP-HP/PKPH/HPL.0/4/2017

No.	Penetapan	Nama KPH	Jenis KPH	Provinsi	SK RPHJP
1	2	3	4	5	6
40	PENETAPAN MODEL	TARAKAN	KPHL	Kalimantan Utara	SK. 18/Menhut-II/REG.III/2014
41	PENETAPAN MODEL	SUNGAI SEMBULAN	KPHP	Kepulauan Bangka Belitung	SK. 194/Menhut-II/REG.II/2014
42	PENETAPAN MODEL	RAMBAT MENDUYUNG	KPHP	Kepulauan Bangka Belitung	SK. 207/Menhk-KPH/PPKPH/HP.L.01/2017
43	PENETAPAN MODEL	GUNUNG DUREN	KPHP	Kepulauan Bangka Belitung	SK.218/MENLHK-KPH/PPKPH/HP.L.01/2018
44	PENETAPAN MODEL	SIGAMBIK KOTAWARINGIN	KPHP	Kepulauan Bangka Belitung	SK.1088/MenLHK-KPH/PPKPH/HP.L.03/2017
45	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XI LAMPUNG	KPHL	Lampung	SK.6944/MENLHK-KPH/PPKPH/SET.1/12/2017
46	PENETAPAN MODEL	MUARA DUA	KPHP	Lampung	SK. 294/Menhut-II/REG.I-1/2014
47	PENETAPAN MODEL	RAJABASA	KPHL	Lampung	SK. 268/Menhut-II/REG.II/2014
48	PENETAPAN MODEL	KOTAAGUNG UTARA	KPHL	Lampung	SK. 343/Menhut-II/REG.I-1/2014
49	PENETAPAN MODEL	GEDONG WANI	KPHP	Lampung	SK. 293/Menhut-II/REG.I-1/2014
50	PENETAPAN MODEL	PESAWARAN	KPHL	Lampung	SK. 7370/Menhut-II/REG.1-1/2014
51	PENETAPAN MODEL	BUKIT PUNGGUR	KPHP	Lampung	SK. 7755/Menhut-II/REG.1-1/2014
52	PENETAPAN MODEL	BATU TEGI	KPHL	Lampung	SK. 342/Menhut-II/REG.I-1/2014
53	PENETAPAN MODEL	REGISTER 47 WAY TERUSAN	KPHP	Lampung	SK. 3039/MENHUT-II/REG.I-1/2014
54	PENETAPAN FASILITASI 2015	LIWA	KPHL	Lampung	SK.6945/MENLHK-KPH/PPKPH/SET.1/12/2017
55	PENETAPAN MODEL	WAE SAPALEWA	KPHP	Maluku	SK.6881/MENLHK-KPH/PPKPH/HP.L.01/2017
56	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XII MALUT	KPHP	Maluku Utara	SK.838/MenLHK/SET.JENI/PLA.01/11/2016
57	PENETAPAN MODEL	GUNUNG SINOPA	KPHP	Maluku Utara	SK. 7578/Menhut-II/Reg.4-1/2014
58	PENETAPAN MODEL	BACAN	KPHP	Maluku Utara	SK. 7580/Menhut-II/Reg.4-1/2014
59	PENETAPAN FASILITASI 2015	Oba	KPHP	Maluku Utara	SK.5485/MENLHK-KPH/PPKPH/HP.L.01/10/2017
60	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT VII NTB	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK. 6479/MENLHK-KPH/PPKPH/DAS.3/11/2016
61	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT VIII NTB	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.6942/MENLHK-KPH/PPKPH/DAS.3/12/2017
62	PENETAPAN MODEL	RINJANI TIMUR	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK. 5299/Menhut-II/Reg.2-1/2014
63	PENETAPAN MODEL	BATULANTEH	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK. 4052/Menhut-II/Reg.2-1/2014
64	PENETAPAN MODEL	AMPANG	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK. 630/Menhut-II/Reg.2-1/2015
65	PENETAPAN MODEL	MARIA	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK. 634/Menhut-II/Reg.2-1/2015
66	PENETAPAN MODEL	RINJANI BARAT	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK. 5044/Menhut-II/Reg.2-1/2014
67	PENETAPAN MODEL	SEJORONG	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK. 6102/Menhut-II/Reg.2-1/2014
68	PENETAPAN MODEL	TAMBORA UTARA	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK.740/Menhut-II/Reg.2-1/2015
69	PENETAPAN MODEL	TASTURA	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.1018/Menhut-II/Reg.1-2/2015
70	PENETAPAN FASILITASI 2015	TOFFO PAJO	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.6677/MENLHK-KPH/PPKPH/DAS.3/12/2016
71	PENETAPAN FASILITASI 2015	MADAPANGGA ROMPU	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK. 276/Menhk-KPH/PPKPH/HP.L.02/2017
72	PENETAPAN MODEL	MUTIS TIMAU	KPHL	Nusa Tenggara Timur	SK. 1931/Menhut-II/Reg.2-1/2015
73	PENETAPAN MODEL	ROTE NDAO	KPHP	Nusa Tenggara Timur	SK. 700/Menhut-II/Reg.2-1/2015
74	PENETAPAN MODEL	ALOR PANTAR	KPHL	Nusa Tenggara Timur	SK. 7734/Menhut-II/Reg.2-1/2014
75	PENETAPAN MODEL	MANGGARAI BARAT	KPHP	Nusa Tenggara Timur	SK. 426/Menhut-II/Reg.2-1/2015
76	PENETAPAN MODEL	BIAK NUMFOR	KPHL	Papua	SK. 6544/Menhut-II/Reg.4-1/2014
77	PENETAPAN MODEL	WAROPEN	KPHP	Papua	SK. 5881/Menhut-II/Reg.4-1/2014
78	PENETAPAN MODEL	YAPEN	KPHP	Papua	SK.4631/MENLHK-KPH/PPKPH/HP.L.09/2017
79	PENETAPAN MODEL	KEEROM	KPHP	Papua	SK. 6520/Menhut-II/Reg.4-1/2014
80	PENETAPAN MODEL	MEMBERAMO	KPHP	Papua	SK. 5880/Menhut-II/Reg.4-1/2014

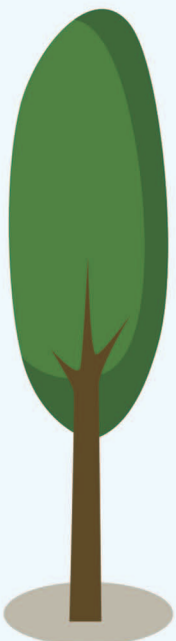
No.	Penetapan	Nama KPH	Jenis KPH	Provinsi	SK RPHJP
1	2	3	4	5	6
81	PENETAPAN MODEL	SORONG	KPHP	Papua Barat	SK. 7582/Menhut-II/Reg.4-1/2014
82	PENETAPAN MODEL	SORONG SELATAN	KPHP	Papua Barat	SK. 7318/Menhut-II/Reg.4-1/2014
83	PENETAPAN MODEL	REMU	KPHP	Papua Barat	SK. 470/Menhut-II/Reg.4-1/2015
84	PENETAPAN MODEL	TEBING TINGGI	KPHP	Riau	SK.277/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017
85	PENETAPAN MODEL	TASIK BESAR SERKAP	KPHP	Riau	SK. 7565/Menhut-II/REG.1-1/2014
86	PENETAPAN MODEL	KAMPAR KIRI	KPHP	Riau	SK. 7204/Menhut-II/REG. 1/1/2014
87	PENETAPAN MODEL	MINAS TAHURA	KPHP	Riau	SK. 280/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017
88	PENETAPAN FASILITASI 2015	KUANTAN SINGINGI	KPHL	Riau	SK. 6403/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016
89	PENETAPAN MODEL	LARIANG	KPHL	Sulawesi Barat	SK. 7317/Menhut-II/Reg.4-1/2014
90	PENETAPAN MODEL	MAMASA TENGAH	KPHL	Sulawesi Barat	SK. 7584/Menhut-II/Reg.4-1/2014
91	PENETAPAN MODEL	MAMASA BARAT	KPHP	Sulawesi Barat	SK. 5581/Menhut-II/Reg.4-1/2014
92	PENETAPAN MODEL	GANDA DEWATA	KPHL	Sulawesi Barat	SK. 7579/Menhut-II/Reg.4-1/2014
93	PENETAPAN MODEL	MAPILI	KPHL	Sulawesi Barat	SK. 6404/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016
94	PENETAPAN MODEL	BUDONG-BUDONG	KPHP	Sulawesi Barat	SK. 817/Menhut-II/Reg.4-1/2015
95	PENETAPAN FASILITASI 2015	KARAMA	KPHP	Sulawesi Barat	SK. 3/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
96	KPH LAMA	JENEBERANG	KPHP	Sulawesi Selatan	SK. 266/Menhut-II/Reg.4-2/2014
97	KPH LAMA	LARONA MALILI	KPHL	Sulawesi Selatan	SK. 7583/Menhut-II/Reg.4-1/2014
98	KPH LAMA	AWOTA	KPHP	Sulawesi Selatan	SK. 806/Menhut-II/Reg.4-1/2015
99	KPH LAMA	KEPUAUAN SELAYAR	KPHP	Sulawesi Selatan	SK. 4/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
100	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT III SUL TENG	KPHL	Sulawesi Tengah	SK.4098/MenLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2017
101	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT V SUL TENG	KPHP	Sulawesi Tengah	SK.740/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017
102	PENETAPAN MODEL	RANO PATANU	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 3934/Menhut-II/Reg.4-1/2014
103	PENETAPAN MODEL	BALANTAK	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 5579/Menhut-II/Reg.4-1/2014
104	PENETAPAN MODEL	DOLAGO TANGGUNUNG	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 3935/Menhut-II/Reg.4-1/2014
105	PENETAPAN MODEL	POGOGUL	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 5580/Menhut-II/Reg.4-1/2014
106	PENETAPAN MODEL	DAMPELAS TINOMBO	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 6942/Menhut-II/Reg.4/2/2013
107	PENETAPAN MODEL	TOILI BATURUBE	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 6522/Menhut-II/Reg.4-1/2014
108	PENETAPAN MODEL	TOJO UNA-UNA	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 7316/Menhut-II/Reg.4-1/2014
109	PENETAPAN FASILITASI 2015	GUNUNG DAKO	KPHP	Sulawesi Tengah	SK.6880/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2017
110	PENETAPAN FASILITASI 2015	BANAWA LALUNDU	KPHP	Sulawesi Tengah	SK.741/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017
111	PENETAPAN MODEL	GULARAYA	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 3694/Menhut-II/Reg.4-1/2014
112	PENETAPAN MODEL	BOMBANA	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 2684/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2016
113	PENETAPAN MODEL	LAKOMPA	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 764/Menhut-II/Reg.4-1/2015
114	PENETAPAN MODEL	PEROPA EA GANTARA	KPHL	Sulawesi Tenggara	SK. 7581/Menhut-II/Reg.4-1/2014
115	PENETAPAN FASILITASI 2015	KPHP MEKONGGA SELATAN	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 435/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017
116	PENETAPAN FASILITASI 2015	LADONGI	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 436/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017
117	PENETAPAN FASILITASI 2015	BINA MAHAWANA SEJUK	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK.2376/MENLHK-KPHP/HPL.0/4/2017
118	PENETAPAN MODEL	POIGAR	KPHP	Sulawesi Utara	SK. 265/Menhut-II/Reg.4-2/2014
119	PENETAPAN FASILITASI 2015	MINAHASA UTARA, BITUNG, DAN MANNADO	KPHL	Sulawesi Utara	SK.6676/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2016
120	PENETAPAN MODEL	SOLOK	KPHL	Sumatera Barat	SK. 197/Menhut-II/REG.I/2014
121	PENETAPAN MODEL	LIMA PULUH KOTA	KPHL	Sumatera Barat	SK. 195/Menhut-II/REG.I/2014

No.	Penetapan	Nama KPH	Jenis KPH	Provinsi	SK RPH/JP
1	2	3	4	5	6
122	PENETAPAN MODEL	SUJUNJUNG	KPHL	Sumatera Barat	SK. 196/Menhut-II/REG./I/2014
123	PENETAPAN MODEL	Pesisir Selatan	KPHP	Sumatera Barat	SK. 278/Menhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017
124	PENETAPAN MODEL	BUKIT BARISAN	KPHL	Sumatera Barat	SK. 7701/Menhut-II/REG.1-1/2014
125	PENETAPAN MODEL	RAWAS	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 940/Menhut-II/Reg.I-1/2015
126	PENETAPAN MODEL	MERANTI	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 7216/Menhut-II/REG.1/1/2014
127	PENETAPAN MODEL	LALAN MANGSANG MENDIS	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 3646/Menhut-II/REG.I-1/2014
128	PENETAPAN MODEL	KPH WILAYAH XIII LAKITAN-BUKIT COGONG	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 255/Menhut-II/REG./I/2014
129	PENETAPAN MODEL	BENAKAT	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 7369/Menhut-II/REG.1-1/2014
130	PENETAPAN MODEL	BANYUJASIN	KPHL	Sumatera Selatan	SK.4411/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2016
131	PENETAPAN FASILITASI 2015	LALAN SEMBLANG	KPHP	Sumatera Selatan	3531/MenLHK-KPHP/HPL.0/6/2017
132	PENETAPAN FASILITASI 2015	DEMPO	KPHL	Sumatera Selatan	SK.6482/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016
133	PENETAPAN FASILITASI 2015	OGAN ULU	KPHL	Sumatera Selatan	SK.4097/menlhk/kphl-pkphl/das.3/7/2017
134	PENETAPAN FASILITASI 2015	SUBAN JERUJI	KPHP	Sumatera Selatan	SK.3614/MenLHK-KPHP/HPL.0/6/2017
135	PENETAPAN FASILITASI 2015	BUKIT NANTI	KPHL	Sumatera Selatan	SK.4096/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2017
136	PENETAPAN FASILITASI 2015	PERADUAN GISTANG	KPHL	Sumatera Selatan	SK.6074/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2017
137	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT I SUMUT	KPHP	Sumatera Utara	SK.6888/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2017
138	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT II SUMUT	KPHL	Sumatera Utara	SK.5432/MENLHK/KPHL-PKPHL/DAS.3/10/2017
139	PENETAPAN FASILITASI 2016	UNIT XII SUMUT	KPHP	Sumatera Utara	SK.6101/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2017
140	PENETAPAN MODEL	MANDALING NATAL	KPHP	Sumatera Utara	SK. 199/Menhut-II/REG./I/2014
141	PENETAPAN MODEL	TOBA SAMOSIR	KPHL	Sumatera Utara	SK.6432/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2017
142	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XXV SUMUT	KPHL	Sumatera Utara	SK. 6941/MENLHK/KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2017
143	PENETAPAN FASILITASI 2015	UNIT XXVI SUMUT	KPHL	Sumatera Utara	SK. 6946/MENLHK/KPHL/PKPHL/SET.1/12/2017
144	PENETAPAN MODEL	YOGYAKARTA	KPHP	Yogyakarta	SK. 4051/Menhut-II/Reg.2-1/2014

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data SD 31 Desember 2018



PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN



*Direktorat Rencana,
Penggunaan dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan*

TABEL VI.1. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (TAMBANG) S/D DESEMBER 2018

NO	PROVINSI	S/D 2013		2014		2015		2016		2017		2018		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	8	59.845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,72	9	59.855,72
2	SUMATERA UTARA	9	55.939,88	1	22.988,27	6	45.599,78	2	26.592,11	-	-	-	-	18	151.120,04
3	SUMATERA BARAT	3	4.720,53	-	-	-	-	-	-	1	679,00	-	-	4	5.399,53
4	RIAU	8	413.967,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	413.967,37
5	JAMBI	39	185.783,05	2	1.553,07	5	15.024,22	2	4.826,26	4	27.431,12	-	-	52	234.617,72
6	SUMATERA SELATAN	33	131.335,23	4	5.666,73	3	9.799,45	2	45.726,56	5	21.583,42	1	3,82	48	214.115,20
7	BENGKULU	2	3.931,00	1	156,04	1	1.265,00	1	164,00	-	-	-	-	5	5.516,04
8	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	1	8.574,19	-	-	1	50,00	2	8.624,19
9	BANGKA BELITUNG	7	20.100,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20.100,72
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	16	10.009,46	1	2,75	-	-	1	16,00	1	4,98	-	-	19	10.033,19
13	JAWA TENGAH	16	13.881,69	-	-	3	6.927,82	1	4.013,60	-	-	2	757,06	22	25.580,17
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	15	59.153,53	2	115,78	2	2.714,24	3	1.474,99	4	3.550,52	2	5.766,81	28	72.765,86
16	BANTEN	2	0,65	-	-	-	-	1	1.790,00	2	8,76	-	-	5	1.799,41
17	BALI	1	25,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,28
18	NUSA TENGGARA BARAT	12	119.315,99	1	4.320,00	3	15.914,00	-	-	-	-	-	-	16	139.549,99
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN BARAT	6	18.856,00	1	9.433,00	-	-	1	11.254,26	1	96,03	-	-	9	39.639,29
21	KALIMANTAN TENGAH	66	415.946,46	13	88.195,10	2	10.166,70	6	501.309,81	1	586.478,06	9	71.835,55	97	1.673.931,68
22	KALIMANTAN SELATAN	15	20.768,66	2	44.790,01	-	-	-	-	2	31.916,98	-	-	19	97.475,65
23	KALIMANTAN TIMUR	91	318.924,50	8	57.742,88	2	2.036,38	1	13,17	4	22.738,46	5	13.645,08	111	415.100,47
24	KALIMANTAN UTARA	20	88.307,43	1	9.767,87	3	18.303,93	-	-	1	18,83	-	-	25	116.398,06
25	SULAWESI UTARA	4	34.695,38	-	-	2	7.922,49	-	-	1	8.908,23	1	3.041,13	8	54.567,23
26	SULAWESI TENGAH	12	76.707,98	1	8.228,00	-	-	1	2.466,07	2	4.035,12	4	14.832,20	20	106.269,37
27	SULAWESI SELATAN	5	25.413,95	-	-	-	-	-	-	2	6.014,34	1	28.389,50	8	59.817,79
28	SULAWESI TENGGARA	18	58.615,93	1	571,85	-	-	-	-	1	19.251,69	2	16.216,58	22	94.656,05
29	GORONTALO	3	20.239,00	2	5.557,00	2	4.561,24	-	-	-	-	-	-	7	30.357,24
30	SULAWESI BARAT	1	33,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33,55
31	MALUKU	11	7.139,88	6	6.285,55	1	10,02	-	-	-	-	-	-	18	13.435,45
32	MALUKU UTARA	49	186.162,66	31	76.398,79	4	47.456,35	-	-	-	-	2	14.032,64	86	324.050,44
33	PAPUA BARAT	20	35.232,50	2	8.843,36	1	39,50	3	48.247,81	2	14.409,31	-	-	28	106.772,48
34	PAPUA	5	68.292,58	1	9.941,00	1	258,36	-	-	-	-	-	-	7	78.491,94
TOTAL		497	2.453.345,82	81	360.557,04	41	187.999,48	26	656.468,83	34	747.124,85	31	168.571,09	710	4.574.067,11

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2018

TABEL VI.2. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (NON TAMBANG) S/D DESEMBER 2018

NO	PROVINSI	SID 2013		2014		2015		2016		2017		2018		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	BANGKA BELITUNG	1	1.081,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.081,00
2	JAWA TIMUR	1	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,24
3	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	1	23.870,28	-	-	-	-	-	-	1	23.870,28
TOTAL		2	1.082,24	-	-	1	23.870,28	-	-	-	-	-	-	3	24.952,52

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data SID 31 Desember 2018

TABEL VI.3. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK OPERASI PRODUKSI (TAMBAH) SID DESEMBER 2018

NO	PROVINSI	SID 2013		2014		2015		2016		2017		2018		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	1	344,00	1	100,42	-	-	-	-	-	-	-	-	2	444,42
2	SUMATERA UTARA	4	66,69	-	-	-	-	1	485,00	1	5,81	2	329,55	6	887,05
3	SUMATERA BARAT	4	607,21	1	153,69	1	102,22	1	127,31	2	631,26	-	-	9	1.621,89
4	RIAU	7	3.244,56	2	1.125,59	1	108,22	5	1.726,06	2	1.651,74	-	-	17	7.856,17
5	JAMBI	33	2.566,74	8	2.124,05	2	597,89	2	603,40	6	44,31	4	138,10	55	6.074,50
6	SUMATERA SELATAN	11	3.866,19	7	1.071,78	2	43,88	9	5.288,53	12	1.735,08	5	1.228,00	46	13.213,46
7	BENGKULU	2	1.141,86	-	-	-	-	2	1.066,00	2	1.828,85	-	-	6	4.036,71
8	LAMPUNG	1	40,05	2	56,00	-	-	2	73,01	2	33,36	-	-	7	202,42
9	BANGKA BELITUNG	11	3.710,14	3	1.086,41	2	429,59	-	-	3	519,70	2	143,99	21	5.889,82
10	KEPULAUAN RIAU	1	1.834,47	-	-	-	-	1	56,66	-	-	-	-	2	1.891,13
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	16	1.718,05	4	412,24	2	10,10	2	33,10	4	47,01	9	79,42	37	2.299,91
13	JAWA TENGAH	5	125,64	-	-	1	38,23	6	212,61	1	1,18	1	54,53	14	432,19
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	8	653,14	5	255,23	1	6,63	4	945,20	2	147,96	1	9,35	21	2.017,51
16	BANTEN	1	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	62,71	2	78,71
17	BALI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.496,76	3	7.496,76
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3	117,42	1	688,19	-	-	-	-	-	-	-	-	4	805,61
20	KALIMANTAN BARAT	7	3.836,99	1	316,20	-	-	1	695,72	2	595,86	2	1.285,16	13	6.729,93
21	KALIMANTAN TENGAH	38	57.269,19	9	7.835,66	6	4.902,53	6	4.017,97	9	8.057,43	31	25.780,76	99	107.863,53
22	KALIMANTAN SELATAN	52	33.999,43	10	5.471,43	5	335,92	7	2.497,92	13	6.936,30	25	12.911,55	112	62.152,55
23	KALIMANTAN TIMUR	68	140.960,35	7	3.432,21	1	519,87	5	3.897,98	11	12.149,15	20	32.445,83	112	193.405,39
24	KALIMANTAN UTARA	3	5.072,39	1	903,23	-	-	2	3.171,17	4	2.107,86	5	2.572,60	15	13.827,25
25	SULAWESI UTARA	2	543,39	-	-	-	-	2	1.160,71	4	774,57	1	50,25	9	2.528,92
26	SULAWESI TENGAH	4	3.167,53	-	-	1	1.206,57	2	1.201,56	1	127,40	8	3.423,86	16	9.126,92
27	SULAWESI SELATAN	7	1.213,31	3	121,39	1	48,35	2	52,92	4	196,89	4	468,87	21	2.101,73
28	SULAWESI TENGGARA	21	17.652,04	5	2.470,84	1	965,31	3	1.981,40	6	1.369,60	11	2.962,45	47	27.401,64
29	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	999,90	1	999,90
30	SULAWESI BARAT	1	603,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	603,50
31	MALUKU	2	697,05	1	4,94	-	-	1	6,42	-	-	-	-	4	708,41
32	MALUKU UTARA	17	8.069,17	5	2.561,49	-	-	3	2.491,58	11	5.273,96	7	2.910,67	43	21.306,87
33	PAPUA BARAT	4	95,49	-	-	-	-	1	116,86	-	-	1	603,23	6	815,58
34	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.810,61	1	3.810,61
TOTAL		333	293.231,96	76	30.191,18	27	9.315,32	70	31.889,09	102	44.235,28	145	99.768,15	753	508.630,98

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data SID 31 Desember 2018

TABEL VI.4. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK NON TAMBANG S/D DESEMBER 2018

NO	PROVINSI	S/D 2013		2014		2015		2016		2017		2018		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	3	18,06	-	-	-	-	4	982,00	1	345,08	1	39,14	9	1.364,28
2	SUMATERA UTARA	40	5.024,55	3	38,07	6	905,66	9	722,02	3	91,74	8	246,64	69	7.028,68
3	SUMATERA BARAT	12	509,25	-	-	1	14,48	7	95,27	-	-	1	16,57	21	635,57
4	RIAU	4	12.366,07	-	-	-	-	1	561,72	-	-	2	203,79	7	13.131,58
5	JAMBI	1	136,18	-	-	1	21,28	1	90,33	1	177,27	-	-	4	425,06
6	SUMATERA SELATAN	7	874,50	4	25,40	1	0,04	2	7,72	6	622,62	2	11,57	22	1.541,84
7	BENGKULU	5	156,26	1	38,83	2	31,65	1	5,07	2	146,03	2	117,77	13	495,61
8	LAMPUNG	-	-	2	97,38	-	-	4	224,80	1	94,86	-	-	7	417,04
9	BANGKA BELITUNG	4	81,91	1	4,47	1	1,49	-	-	-	-	3	34,27	9	122,14
10	KEPULAUAN RIAU	1	27,00	-	-	-	-	5	398,72	2	17,11	4	393,45	12	836,28
11	DKI JAKARTA	-	-	2	1,97	-	-	1	14,25	-	-	-	-	3	16,22
12	JAWA BARAT	11	373,59	3	58,85	1	4,56	5	563,82	4	57,23	10	895,80	34	1.953,85
13	JAWA TENGAH	28	326,90	1	0,52	-	-	2	68,47	4	178,55	6	333,82	41	908,27
14	DI YOGYAKARTA	3	18,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18,64
15	JAWA TIMUR	-	-	3	49,75	-	-	6	876,68	6	853,60	4	182,00	19	1.962,03
16	BANTEN	-	-	-	-	-	-	2	202,20	-	-	1	25,65	3	227,85
17	BALI	17	60,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	60,24
18	NUSA TENGGARA BARAT	8	490,82	2	10,30	1	149,42	3	281,11	-	-	2	266,84	16	1.198,49
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3	4,29	2	71,26	-	-	3	91,35	1	0,58	1	34,87	10	202,35
20	KALIMANTAN BARAT	4	11.884,80	-	-	-	-	-	-	3	140,52	-	-	7	12.025,32
21	KALIMANTAN TENGAH	1	710,60	-	-	-	-	1	1.211,62	1	152,13	4	897,66	7	2.972,01
22	KALIMANTAN SELATAN	2	27,32	-	-	1	228,13	-	-	-	-	2	46,83	5	302,28
23	KALIMANTAN TIMUR	6	818,94	2	61,71	1	77,81	1	146,33	2	68,64	1	30,02	13	1.203,45
24	KALIMANTAN UTARA	2	494,13	-	-	1	225,71	2	2.541,48	1	26,47	1	135,22	7	3.423,01
25	SULAWESI UTARA	2	0,52	-	-	-	-	-	-	1	504,33	2	26,34	5	531,19
26	SULAWESI TENGAH	11	982,27	1	88,41	1	19,86	1	37,62	4	148,10	3	93,57	21	1.369,83
27	SULAWESI SELATAN	3	218,82	4	49,09	-	-	1	28,79	5	935,76	-	-	13	1.232,46
28	SULAWESI TENGGARA	5	138,97	-	-	-	-	1	0,29	2	110,61	-	-	8	249,86
29	GORONTALO	2	150,20	1	124,20	-	-	1	38,13	2	9,84	-	-	6	322,37
30	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU	1	53,97	-	-	-	-	-	-	-	-	1	422,08	2	476,05
32	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11,72	1	11,72
33	PAPUA BARAT	1	5.702,99	-	-	-	-	1	669,64	-	-	-	-	2	6.372,63
34	PAPUA	5	1.509,88	1	716,77	1	348,03	1	3,80	1	4,40	1	78,51	10	2.661,39
TOTAL		192	43.161,65	33	1.436,97	19	2.028,12	66	9.843,22	53	4.685,48	63	4.544,13	426	65.699,56

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2018

TABEL VI.5. PERKEMBANGAN LAHAN KOMPENSASI (s/d Tahap Berita Acara Serah Terima)

PROVINSI	S/D 2013		2014		2015		2016		2017		2018		TOTAL	
	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
BALI	1	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,50
BANTEN	1	12,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12,01
DKI JAKARTA	-	-	2	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,18
JAWA BARAT	56	4.657,57	6	789,12	3	184,91	2	38,43	1	115,50	2	63,50	70	5.849,02
JAWA TENGAH	27	1.161,53	3	281,99	-	-	2	26,50	-	-	-	-	32	1.470,02
JAWA TIMUR	31	1.619,25	3	480,86	2	259,81	3	258,37	-	-	-	-	39	2.618,28
LAMPUNG	7	275,50	1	182,70	-	-	2	80,46	-	-	-	-	10	538,66
SUMATERA UTARA	1	104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104,00
Grand Total	124	7.837,35	15	1.738,84	5	444,71	9	403,76	1	115,50	2	63,50	156	10.603,67

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2018

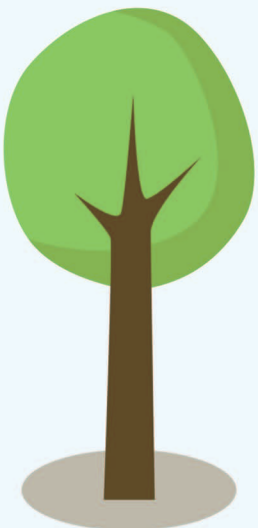
TABEL VI.6. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PKH)

NO	PROVINSI	s/d tahun 2014					Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018					
		TAMBAANG	NON TAMBAANG	Total (Rp.)	TAMBAANG	NON TAMBAANG	7	TAMBAANG	NON TAMBAANG	8	TAMBAANG	NON TAMBAANG	9	TAMBAANG	NON TAMBAANG	10	TAMBAANG	NON TAMBAANG	11	12	13
1	2																				
1	Nangro Aceh D	107.647.318	18.765.768	126.413.086	254.584.811	0	271.317.900	83.837.666	4.889.841.328	0	83.837.666	0	487.088.026	0	161.658.400						
2	Sumatera Utara	387.161.120	2.089.301.910	2.476.463.030	0	1.120.194.829	0	1.773.347.470	0	4.142.725.086	0	4.142.725.086	0	2.487.053.305							
3	Sumatera Barat	3.680.927.920	348.583.764	4.029.511.684	128.000.000	102.384.000	1.175.266.023	104.556.035	1.462.972.800	104.556.035	1.462.972.800	1.325.121.137	403.285.506	202.736.000							
4	Riau	11.657.782.820	1.296.086.000	12.953.878.820	2.091.077.847	150.000.000	5.057.055.602	350.000.000	10.724.150.792	350.000.000	10.724.150.792	18.324.233.835	3.450.954.757	1.997.591.704							
5	Kepulauan Riau	996.714.615	0	996.714.615	1.000.000.000	0	0	0	5.115.823.618	0	5.115.823.618	312.542.480	19.113.400.342	193.605.399							
6	Jambi	9.680.667.944	5.897.413.971	15.558.081.915	8.172.466.000	1.402.237.191	5.616.129.961	1.713.123.999	5.470.331.476	1.713.123.999	5.470.331.476	6.551.400.234	1.905.292.136	2.027.280.160							
7	BENGKULU	3.329.156.959	439.298.985	3.768.455.944	2.860.541.810	196.170.214	1.500.030.000	253.203.492	1.892.241.799	253.203.492	1.892.241.799	10.554.420.717	306.911.423	781.908.232							
8	Bangka Belitung	19.616.128.789	87.559.839	19.703.688.628	5.364.589.921	8.940.000	7.483.643.931	0	8.170.977.921	0	8.170.977.921	20.055.766	20.055.766	40.047.077							
9	Sumatera Selatan	132.446.427.509	8.629.861.601	141.076.289.110	37.671.943.125	2.929.876.708	38.327.265.080	4.135.903.065	43.807.159.505	4.135.903.065	43.807.159.505	46.953.634.881	3.596.742.387	5.089.443.608							
10	Nusa Tenggara Barat	93.260.905.994	90.538.039	93.351.444.033	29.510.104.000	14.641.642	29.841.429.874	7.049.835	29.189.805.000	7.049.835	29.189.805.000	30.993.792.500	232.742.180	125.492.313							
11	Nusa Tenggara Timur	160.064.177	102.755.621	262.819.798	11.154.500	133.970.820	151.780.938	121.743.200	65.812.250	121.743.200	65.812.250	68.497.916	289.008.203	205.555.695							
12	Kalimantan Barat	46.183.622.684	20.192.993	46.203.815.687	12.331.381.616	7.680.000	18.950.902.048	1.920.000	66.430.496.348	1.920.000	66.430.496.348	1.840.504.021	120.058.113	345.952.000							
13	Kalimantan Tengah	223.444.790.590	221.168.000	223.665.958.590	152.098.031.956	120.848.000	144.091.887.796	120.848.000	222.652.140.029	120.848.000	222.652.140.029	206.234.840.101	364.256.000	364.256.000							
14	Kalimantan Selatan	714.884.679.577	93.823.571	714.978.503.148	305.661.591.975	1.532.400	342.570.422.310	1.532.400	320.972.887.012	1.532.400	320.972.887.012	1.532.400	1.532.400	1.563.048							
15	Kalimantan Timur	1.307.791.999.528	375.144.075	1.308.167.143.603	420.228.261.706	316.892.910	467.381.391.362	347.035.027	505.424.817.631	347.035.027	505.424.817.631	3.471.265.435	3.471.265.435	3.419.319.115							
16	Kalimantan Utara	3.168.686.552	0	3.168.686.552	1.650.299.875	0	16.176.129.419	911.868.400	22.737.306.035	911.868.400	22.737.306.035	35.507.407.207	6.611.499.750	3.867.087.000							
17	Sulawesi Utara	3.851.102.199	2.997.303	3.854.099.502	2.665.550.797	50.745	4.940.581.919	101.510	5.197.668.700	101.510	5.197.668.700	5.296.214.000	881.873.532	806.928.000							
18	Gorontalo	0	771.773.357	771.773.357	0	373.264.000	0	373.264.000	0	373.264.000	0	2.145.036.411	495.160.000	510.302.460							
19	Sulawesi Tengah	15.120.191.666	1.328.973.694	16.449.165.360	11.730.494.259	338.299.846	17.706.708.015	403.553.725	21.641.914.289	403.553.725	21.641.914.289	28.383.231.328	883.600.067	1.397.988.337							
20	Sulawesi Barat	716.160.442	0	716.160.442	818.594.276	0	0	0	0	0	0	363.393.360	0	378.074.452							
21	Sulawesi Selatan	1.794.081.614	1.972.590.895	3.766.672.509	196.215.460	503.814.606	2.379.201.584	475.844.382	3.591.765.890	475.844.382	3.591.765.890	4.280.116.744	954.569.018	872.568.874							
22	Sulawesi Tenggara	33.312.989.138	280.659.626	33.593.648.764	13.484.336.996	188.261	19.444.762.309	489.750.913	46.060.961.709	489.750.913	46.060.961.709	64.759.985.155	392.973.688	531.906.484							
23	Maluku	1.045.810.560	8.063.661	1.053.874.221	583.365.858	7.904.000	570.762.500	18.176.000	0	18.176.000	0	8.407.333	994.885.336	18.176.000							
24	Maluku Utara	67.971.171.471	0	67.971.171.471	52.133.890.458	0	44.167.023.051	0	52.166.889.511	0	52.166.889.511	76.690.983.919	0	0							
25	Papua Barat	0	514.100.000	514.100.000	0	152.790.000	1.665.853.139	339.760.000	3.881.918.474	339.760.000	3.881.918.474	2.384.660.000	339.856.000	328.610.480							
26	Papua	0	2.544.744.475	2.544.744.475	0	1.559.022.411	0	1.588.506.000	0	1.588.506.000	0	1.584.709.418	0	1.894.833.336							
	TOTAL	2.694.588.871.196	27.134.407.148	2.721.723.278.344	1.060.646.477.246	9.440.692.583	1.169.469.544.761	13.614.925.119	1.381.547.881.917	13.614.925.119	1.381.547.881.917	1.507.201.402.385	31.620.502.064	28.039.937.479							

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 31 Desember 2018



AMDAL, UKL-UPL



*Direktorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Usaha dan Kegiatan*

TABEL VII.1. DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKOMENDASI DAN IZIN LINGKUNGAN TAHUN 2013-2018

No	JENIS KEGIATAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Survei Seismik	21	-	7	3	5	3
	SKIL	21	-	7	3	6	4
2	Pemboran	20	-	-	8	6	3
	SKIL	20	2	-	8	6	4
3	Ketenagalistrikan	1	-	1	1	1	-
	SKIL	1	-	1	1	1	-
4	Normalisasi Sungai	-	-	-	1	1	-
	SKIL	-	-	-	1	2	-
5	Kabel Laut	3	-	3	4	-	9
	SKIL	3	-	3	4	-	4
6	Pipa Gas	3	-	-	1	-	-
	SKIL	3	-	-	1	-	-
7	Pelabuhan	3	-	-	-	-	-
	SKIL	3	-	-	-	-	-
8	Migas	-	-	-	-	-	1
	SKIL	-	-	-	-	-	1
	Rekomendasi	51	0	11	18	13	16*
	SKIL	51	2	11	18	15	13**

Keterangan:

SKIL : Surat Keputusan Izin Lingkungan

* dan ** terjadi perbedaan, karena sebagian IL diterbitkan oleh OSS

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d 31 Desember 2018

TABEL VII.2. DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN TAHUN 2013-2018

No.	JENIS KEGIATAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Minyak dan Gas (Migas)	20	20	6	8	7	8
		24	26	15	16	15	14
2	Limbah B3	6	6	2	1	5	4
		6	6	3	4	3	6
3	Ketenagalistrikan / Geothermal	2	3	1	2	3	3
		2	4	4	2	3	3
4	Pertambangan	2	5	2	-	1	4
		2	5	4	2	2	12
5	Pelabuhan	2	3	2	4	19	3
		2	3	2	5	20	-
6	Bandara	2	5	-	1	4	1
		2	6	1	1	4	1
7	Kereta Api	1	1	-	2	-	1
		1	1	-	3	-	1
8	Nuklir	-	-	-	1	-	-
		-	-	-	2	-	-
9	Bendungan	1	-	-	1	-	-
		1	-	-	1	-	-
10	Normalisasi Sungai	-	3	-	-	-	-
		-	3	-	-	-	-
11	Jembatan	1	1	-	-	-	-
		1	1	-	-	-	-
	JUMLAH	37	47	13	20	39	24*
		41	55	29	36	47	37**

Keterangan:

SKKL : Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan

SKIL : Surat Keputusan Izin Lingkungan

* dan ** terjadi perbedaan, karena perubahan IL saja tanpa diterbitkan SKKL dan sebagian IL diterbitkan oleh OSS

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data sid 31 Desember 2018

TABEL VII.3. PERKEMBANGAN PENERAPAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah auditee		
		Tahun 2017	Tahun 2018	s/d Tahun 2018
1	2	3	4	5
1.	Audit Lingkungan Hidup Wajib karena Ketidaktaatan			2
2.	Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala	9	7	16

Keterangan: Auditee: Pihak yang diaudit

TABEL VII.4. PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT PERMASALAHAN DOKUMEN LINGKUNGAN

a. Jumlah Kegiatan yang dikenakan sanksi administratif untuk menyusun DELH/DPLH

No.	Jenis Kegiatan	s/d Tahun 2018
1	2	3
1.	Penerapan kebijakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan namun sudah berjalan	5

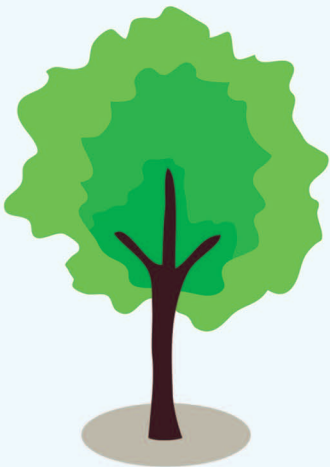
b. Jumlah kasus dan permasalahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan

No.	Jenis Kegiatan	s/d Tahun 2018
1	2	3
1.	Penanganan permasalahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan	17

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d Desember 2018



KLHS DAN EKOREGION



*Direktorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor*

TABEL VIII.1 JUMLAH SATUAN DAN LUAS EKOREGION PULAU

NO	PULAU	NAMA KELAS	KODE	LUAS AREA (Km ²)
1	2	3	4	5
1	Sumatera	Dataran Pantai Timur Sumatera & Dataran Pantai Barat Sumatera	M	7.234,51
		Dataran Gambut Sumatera	O1	74.591,63
		Dataran Fluvial Sumatera	F	82.957,24
		Dataran Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna	D3	17.686,47
		Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan	S32	46.117,95
		Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan	V3	42.224,88
		Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung - Natuna	D2	1.200,96
		Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan, Perbukitan Struktural Kompleks Kepulauan Riau	S23	94.312,69
		Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan		17.828,19
		Pegunungan Jalur Bukit Barisan		78.029,39
		Pegunungan Vulkanik Jalur Bukit Barisan		11.345,90
		TOTAL		473.529,81
2	Jawa	Dataran Pantai Utara Jawa & Dataran Pantai Selatan Jawa	M1 & M2	2.448,11
		Dataran Fluvial Jawa	F	21.519,82
		Dataran Organik/Koral Jawa	O2	156,84
		Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung		20.506,47
		Dataran Struktural Blok Selatan Jawa & Dataran Struktural Jalur Bogor-Kendeng-Rembang	S31 & S32	12.079,49
		Perbukitan Karst Jalur Pangandaran-Karangbolong-Gunung Sewu-Blambangan & Perbukitan Karst Jalur Bogor-Kendeng-Rembang	K1	5.196,36
		Perbukitan Denudasional Jawa	D2	531,69
		Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung	V2	21.650,09
		Perbukitan Struktural Blok Selatan Jawa	S21	30.182,14
		Pegunungan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung	V1	13.458,43
		Pegunungan Struktural Blok Selatan Jawa & Pegunungan Struktural Jalur Bogor-kendeng-Rembang	S11 & S12	4.548,56
		TOTAL		132.278,00
3	Kalimantan	Dataran Pantai Kalimantan	M	12.706,06
		Dataran Fluvial Kalimantan	F	95.688,99
		Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam	O1	44.558,06
		Dataran Struktural Kompleks Meratus	S3	38.685,40
		Perbukitan Karst Kalimantan	K2	9.811,23
		Perbukitan Denudasional Kalimantan	D2	27.617,29
		Perbukitan Struktural Kompleks Meratus	S2	144.914,56
		Pegunungan Denudasional Kalimantan	D1	7.901,34
		Pegunungan Struktural Kompleks Meratus	S1	147.986,23
		Pegunungan Intrusif Batuan Beku Tua Kalimantan	V1	3.790,16
		TOTAL		533.659,32

NO	PULAU		NAMA KELAS		KODE	LUAS AREA (Km ²)
	1	2	3	4		
4	Bali & Nusa Tenggara				M	67,73
			Dataran Pantai Bali Nusa Tenggara		F	3.582,99
			Dataran Organik/Koral Bali Nusa Tenggara		O2	4.111,46
			Dataran Vulkanik Bali Nusa Tenggara		V3	1.045,82
			Perbukitan Karst Bali Nusa Tenggara		K2	3.385,91
			Perbukitan Struktural Bali Nusa Tenggara		S2	3.889,32
			Perbukitan Denudasional Bali Nusa Tenggara		D2	4.603,57
			Perbukitan Vulkanik Bali Nusa Tenggara		V2	4.836,78
			Pegunungan Struktural Bali Nusa Tenggara		S1	18.407,04
			Pegunungan Denudasional Bali Nusa Tenggara		D1	8.279,94
			Pegunungan Vulkanik Bali Nusa Tenggara		V1	19.476,15
			TOTAL			71.686,71
5	Sulawesi				M	2.359,53
			Dataran Pantai Sulawesi		F	21.413,52
			Dataran Organik/Koral Sulawesi		O1	974,29
			Dataran Struktural Sulawesi		S3	100,60
			Dataran Vulkanik Kompleks Manado		V1	337,02
			Perbukitan Denudasional Sulawesi		D2	1.648,04
			Perbukitan Karst Sulawesi		K2	14.165,73
			Perbukitan Struktural Sulawesi		S2	36.479,26
			Perbukitan Vulkanik Kompleks Manado dan Kompleks Makassar		V21 & V22	3.855,74
			Pegunungan Struktural Sulawesi		S1	99.831,95
			Pegunungan Vulkanik Kompleks Manado dan Kompleks Makassar		V11 & V12	3.815,64
			TOTAL			184.981,32
6	Maluku				M	2.284,96
			Dataran Pantai Maluku		F	5.032,38
			Dataran Karst Maluku		K3	1.061,99
			Dataran Struktural Kompleks Kepulauan Sula-Buru-Seram		S32	1.334,64
			Perbukitan Karst Maluku		V31	74,18
			Perbukitan Denudasional Maluku		K2	17.383,02
			Perbukitan Struktural Kompleks Halmahera & Kepulauan Sula-Buru-Seram		D2	2.938,27
			Perbukitan Vulkanik Kompleks Gamalama dan Kompleks Banda		S21 & S22	10.185,82
			Pegunungan Denudasional Maluku		V21 & V22	4.726,49
			Pegunungan Struktural Kompleks Halmahera & Kompleks Kepulauan Sula-Buru-Seram		D1	5.001,07
			Pegunungan Vulkanik Kompleks Gamalama		S11 & S12	26.710,88
			TOTAL			71.792,27

NO	PULAU	NAMA KELAS	KODE	LUAS AREA (Km ²)
	2	3	4	5
1	Papua	1 Dataran Fluvial Utara Papua, Barat Papua & Selatan Papua	M1, M2 & M3	119.990,48
		2 Dataran Fluvial Mamberamo, Kokonao-Digul, Seget-Bintuni dan Nabire-Sarmi	F1, F2, F3 & F4	36.398,10
		3 Dataran Gambut Mamberamo, Kokonao-Digul, Seget-Bintuni & Nabire-Sarmi	G1, G2, G3 & G4	35.394,06
		4 Dataran Organik/Koral Kompleks Sorong	O2	497,18
		5 Dataran Struktural Jalur Jayawijaya & Jalur Utara	S31 & S32	12.664,30
		6 Perbukitan Karst Jalur Jayawijaya dan Jalur Utara	K	31.125,74
		7 Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya dan Jalur Utara	S21 & S22	51.114,53
		8 Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya & Jalur Utara	S11 & S12	121.072,33
		9 Pegunungan Glasial	G	3.306,58
		TOTAL		411.563,30
		TOTAL KESELURUHAN		1.885.490,73

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data S/d 31 Desember 2018

TABEL VIII.2 LUAS WILAYAH EKOREGION LAUT

NO	WILAYAH EKOREGION	LUAS (km ²)
1	2	3
1	Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera	782.861
2	Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa	655.549
3	Selat Malaka	111.343
4	Laut Natuna	360.402
5	Selat Karimata	270.859
6	Laut Jawa	437.978
7	Laut Sulawesi	323.866
8	Selat Makasar	288.005
9	Perairan Bali dan Nusa Tenggara	625.018
10	Teluk Tomini	70.020
11	Laut Halmahera	451.955
12	Laut Banda Sebelah Timur Sulawesi	160.361
13	Laut Banda Sebelah Selatan Sulawesi	169.160
14	Laut Seram dan Teluk Bintuni	140.040
15	Laut Banda	583.096
16	Samudera Pasifik sebelah Utara Papua	459.857
17	Teluk Cendrawasih	93.369
18	Laut Arafura	326.793
JUMLAH		6.310.532

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data SD 31 Desember 2018

TABEL VIII.3. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

No	Jenis Dokumen KLHS	Tahun 2015			Jumlah 2015	Tahun 2016			Jumlah 2016	Tahun 2017			Jumlah 2017	Tahun 2018			Jumlah 2018	Jumlah s.d Des 2018					
		Hirarki				Hirarki				Hirarki				Hirarki									
		Nas	Prov	Kota		Nas	Prov	Kota		Nas	Prov	Kota		Nas	Prov	Kota							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
I	Review KLHS (Telaahan dan Validasi)																						
1	RPJMP	-	-	-	-	-	-	4	2	-	6	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	8	
2	RPJPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
3	RPJMD	-	-	1	1	2	-	4	28	3	35	-	2	-	-	2	-	6	-	-	6	45	
4	KRP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	-	-	3	-	3	-	2	16	2	20	-	2	-	-	2	-	4	-	-	4	29	
6	Rencana Rinci (RDTR)	-	-	3	-	3	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
7	Kawasan Strategis Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kawasan Strategis Provinsi	-	-	1	-	1	-	4	-	-	4	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	12	
9	Kawasan Strategis Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kawasan Strategis Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Kawasan Ekonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Laut Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Zonasi (RZWP3K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	8	-	-	8	16	
14	Reklamasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J U M L A H I		-	1	7	1	9	-	14	46	11	71	-	21	-	-	21	-	19	-	-	19	120	
II	Bintek KLHS																						
1	RPJMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	RPJPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	RPJMD	-	-	1	1	2	-	-	1	1	2	-	2	-	-	2	-	5	-	-	5	11	
4	KRP	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
5	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	4	
6	Rencana Rinci (RDTR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kawasan Strategis Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kawasan Strategis Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
9	Kawasan Strategis Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kawasan Strategis Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Kawasan Ekonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Laut Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Zonasi	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	4	-	-	4	-	5	-	-	5	11	
14	Reklamasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J U M L A H II		-	3	1	1	5	-	3	1	1	5	-	9	-	-	9	-	10	-	-	10	29	

Ket:

- Data s/d Desember 2018

- Kegiatan mulai Agustus 2015

- Tahun 2017 Review hanya Hirarki Nasional dan Provinsi

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s/d Desember 2018

TABEL VIII.4. STATUS KAJIAN INKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) 2018

No	Provinsi	Pembahasan		Validasi	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6
1	DKI Jakarta	BA.28/PDLKWS/PKLSHWS/12/2018	31 Desember 2018		
2	Banten				
	Jawa Barat	BA.06/PDLKWS/PKLSHWS/4/2018	23 April 2018	S.775/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2018	12 Juli 2018
4	Jawa Timur	BA.01/PDLKWS/PKLSHWS/06/2017	31 Mei 2017	S.137/1PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2017	06 Oktober 2017
5	Jawa Tengah	BA.10/PDLKWS/PKLSHWS/07/2017	20 Juli 2017	S.1670/PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2017	21 Desember 2017
6	DI. Yogyakarta	BA.07/PDLKWS/PKLSHWS/07/2018	26 Juli 2018	S.1214/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/10/2018	30 Oktober 2018
7	Nangroe Aceh Darussalam	BA.21/PDLKWS/PKLSHWS/12/2018	11 Desember 2018		
8	Sumatera Utara	BA.12/PDLKWS/PKLSHWS/11/2018	1 November 2018		
9	Sumatera Barat	BA.02/PDLKWS/PKLSHWS/06/2017	7 Juni 2017	S.1669/PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2017	21 Desember 2017
10	Riau				
11	Kepulauan Riau	BA.23/PDLKWS/PKLSHWS/12/2018	11 Desember 2018		
12	Jambi				
13	Sumatera Selatan				
14	Bangka Belitung	BA.05/PDLKWS/PKLSHWS/4/2018	23 April 2018		
15	Bengkulu	BA.12/PDLKWS/PKLSHWS/10/2018	15 Oktober 2018		
16	Lampung	Notulen Pembahasan	29 Desember 2017	S.166/PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2018	12 Februari 2018
17	Bali				
18	Nusa Tenggara Barat	BA.13/PDLKWS/PKLSHWS/PLA.3/08/2017	22 September 2017	S.1537/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	6 Nopember 2017
19	Nusa Tenggara Timur			S.1570/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	6 Nopember 2017
20	Kalimantan Barat	BA.17/PDLKWS/PKLSHWS/12/2018	13 November 2018		
21	Kalimantan Tengah	BA.3/PDLKWS/PKLSHWS/1/2018	30 Januari 2018	S.841/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2018	2 Agustus 2018
22	Kalimantan Selatan	BA.07/PDLKWS/PKLSHWS/07/2017	5 Juli 2017	S.169/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2018	12 Februari 2018
23	Kalimantan Timur				
24	Kalimantan Utara			S.414/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	11 April 2018
25	Sulawesi Utara				
26	Sulawesi Barat	BA.12/PDLKWS/PKLSHWS/08/2017	4 Agustus 2017		
27	Sulawesi Tengah	BA.11/PDLKWS/PKLSHWS/07/2017	21 Juli 2017	S.1534/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	6 Nopember 2017
28	Sulawesi Tenggara	BA.25/PDLKWS/PKLSHWS/12/2018	13 Desember 2018		
29	Sulawesi Selatan	UN.56/PKTL/PDLKWS/PLA.3	9 Maret 2018	S.895/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2018	10 Agustus 2018
30	Gorontalo			S.675/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2018	25 Juni 2018
31	Papua Barat	BA.22/PDLKWS/PKLSHWS/12/2018	11 Desember 2018		
32	Papua				
33	Maluku				
34	Maluku Utara				

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Desember 2018

TABEL VIII.5. STATUS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (RTR KSP) 2018

No	Provinsi	Judul RTR	Pembahasan		Validasi	
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7
1	DKI Jakarta	RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta			S.834/PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2017	29 Mei 2017
2	Banten					
3	Jawa Barat	RTR KSP Pelabuhan Senggang Biru	BA.15/PDLKWS/PKHLHWS/11/2017	27 November 2017		
4	Jawa Timur	RTR KSP Agropolitan Jlen	BA.16/PDLKWS/PKHLHWS/11/2017	27 November 2017		
		RTR KSP Agropolitan Wilis	BA.17/PDLKWS/PKHLHWS/11/2017	27 November 2017		
5	Jawa Tengah					
6	DI. Yogyakarta	KSP Kasultanan dan Kadipaten	BA.18/PDLKWS/PKHLHWS/11/2018	19 November 2018		
7	Nangroe Aceh Darussalam					
8	Sumatera Utara					
9	Sumatera Barat	RTR KSP Danau Maninjau			S.678/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2018	25 Juni 2018
10	Riau					
11	Kepulauan Riau					
12	Jambi	RTR KSP Pantai Timur			S.19/PDLKWS/PKHLHWS/PLA.3/02/2017	Februari 2017
13	Sumatera Selatan					
14	Bangka Belitung	RRTR KSP Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Sadai				
15	Bengkulu					
16	Lampung					
17	Bali					
18	Nusa Tenggara Barat	RTR KSP Agropolitan Alas Utan	BA.05/PDLKWS/PKHLHWS/06/2017			
19	Nusa Tenggara Timur					
20	Kalimantan Barat					
21	Kalimantan Tengah					
22	Kalimantan Selatan	RTR KPS Batang Banyu	BA.11/PDLKWS/PKHLHWS/10/2018	10 Oktober 2018		
23	Kalimantan Timur	RTR KIO Malay	BA.9/PDLKWS/PKHLHWS/8/2018	15 Agustus 2018		
24	Kalimantan Utara					
25	Sulawesi Utara					
26	Sulawesi Barat					
27	Sulawesi Tengah					
28	Sulawesi Tenggara					
29	Sulawesi Selatan	RTR Pusat Bisnis Terpadu				
		RTR KSP Kota Gorontalo	BA.03/PDLKWS/PKHLHWS/06/2017	13 Juni 2017		
30	Gorontalo	RTR KSP Danau Limboto	BA.04/PDLKWS/PKHLHWS/06/2017	13 Juni 2017	S.1026/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/9/2018	14 September 2018
31	Maluku					
32	Maluku Utara					
33	Papua Barat				S.1089/PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2017	28 Juli 2017
34	Papua					

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s/d Desember 2018

TABEL VIII.6. STATUS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) 2017-2018

No	Provinsi	Pembahasan		Validasi	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6
1	DKI Jakarta	BA.27/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	20 Desember 2018		
2	Banten			S.197/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016 (evaluasi kelayakan SE MenLHK No.04/2015)	5 Oktober 2016
3	Jawa Barat	Notulensi	19 Agustus 2017		
4	Jawa Timur				
5	Jawa Tengah			S.1263/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2017	6 Oktober 2017
6	DI. Yogyakarta			S.1535/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	6 November 2017
7	Nangroe Aceh Darussalam				
8	Sumatera Utara				
9	Sumatera Barat				
10	Riau			S.418/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	11 April 2018
11	Kepulauan Riau				
12	Jambi				
13	Sumatera Selatan				
14	Bangka Belitung				
15	Bengkulu	BA.15/PDLKWS/PKLHWS/11/2018	12 November 2018		
16	Lampung	Notulensi: BA.2/PDLKWS/PKLHWS/1/2018	22 Desember 2017 26 Januari 2018	S. 370/PKTL/PDLKWS/PLA.3/04/2018	02 April 2018
17	Bali	BA.8/PDLKWS/PKLHWS/7/2018	31 Juli 2018		
18	Nusa Tenggara Barat				
19	Nusa Tenggara Timur			S.584/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2018	24 Mei 2018
20	Kalimantan Barat				
21	Kalimantan Tengah				
22	Kalimantan Selatan				
23	Kalimantan Timur				
24	Kalimantan Utara				
25	Sulawesi Utara				
26	Sulawesi Barat				
27	Sulawesi Tengah				
28	Sulawesi Tenggara				
29	Sulawesi Selatan				
30	Gorontalo			VALIDASI PERTAMA: S.195/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/12/2017 VALIDASI PERBAIKAN: S.676/MENLHK PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2018	21 Desember 2017 25 Juni 2018
31	Maluku				
32	Maluku Utara				
33	Papua Barat				
34	Papua				

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s/d Desember 2018

TABEL VIII.7. STATUS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) 2018

No	Provinsi	Pembahasan		Validasi	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6
1	DKI Jakarta	Notulensi Pembahasan	26 Februari 2018	S.344/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2018	27 Maret 2018
2	Banten				
3	Jawa Barat	BA.19/PDLKWS/PKLHWS/11/2018	26 November 2018	S.1472/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2018	27 Desember 2018
4	Jawa Timur				
5	Jawa Tengah			S.1363/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2018	03 Desember 2018
6	DI. Yogyakarta			S.896/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2018	10 Agustus 2018
7	Nangroe Aceh Darussalam				
8	Sumatera Utara				
9	Sumatera Barat			S.171/PDLKWS/PLA.3/9/2016 (evaluasi kelayakan SE MenLHK No.04/2015)	14 September 2016
10	Riau			S.223/PDLKWS/PLA.3/10/2016 (evaluasi kelayakan SE MenLHK No.04/2015)	12 Oktober 2016
11	Kepulauan Riau				
12	Jambi				
13	Sumatera Selatan				
14	Bangka Belitung				
15	Bengkulu			S.1636/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06 November 2017
16	Lampung				
17	Bali				
18	Nusa Tenggara Barat				
19	Nusa Tenggara Timur				
20	Kalimantan Barat				
21	Kalimantan Tengah				
22	Kalimantan Selatan				
23	Kalimantan Timur				
24	Kalimantan Utara			S.222/PDLKWS/PLA.3/10/2016 (evaluasi kelayakan SE MenLHK No.04/2015)	11 Oktober 2016
25	Sulawesi Utara			VALIDASI S.38/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2018	17 Januari 2018
26	Sulawesi Barat	BA.4/PDLKWS/PLHWS/1/2018	30 Januari 2018	S.61/PDLKWS/PLA.3/3/2018 VALIDASI S.415/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	20 Maret 2018 4 November 2018
27	Sulawesi Tengah				
28	Sulawesi Tenggara				
29	Sulawesi Selatan				
30	Gorontalo	BA.14/PDLKWS/PLHWS/09/2017	28 September 2017	BELUM VALIDASI S.145/PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2017 SUDAH VALIDASI S.1533/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	2 Oktober 2017 6 November 2017
31	Maluku				
32	Maluku Utara				
33	Papua Barat				
34	Papua	BA.26/PDLKWS/PLHWS/12/2018	30 Januari 2018		

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s/d Desember 2018

TABEL VIII.8. DATA DAN INFORMASI PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL DAN PROVINSI

NO	EKOREGION / PROVINSI	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PP/PERDA RPPLH	PP/PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
I. Nasional					
A.	RPPLH Nasional	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
II. Provinsi					
A. Ekoregion Jawa					
1.	DKI Jakarta	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
2.	Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
3.	Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
4.	Banten	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
5.	Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
6.	D.I. Yogyakarta	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
B. Ekoregion Sumatera					
1.	Sumatera Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
2.	Bengkulu	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun (Proses Verifikasi)	Belum disusun	-
3.	Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Sumatera Barat	Sudah dilaksanakan	sudah disusun	Belum disusun	-
6.	Sumatera Utara	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
7.	Aceh	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun (Proses Verifikasi)	Belum disusun	-
8.	Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun (Sudah Verifikasi)	Belum disusun	-
9.	Kepulauan Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
10.	Kepulauan Bangka Belitung	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
C. Ekoregion Kalimantan					
1.	Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
2.	Kalimantan Utara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Kalimantan Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
4.	Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses penyusunan	-
5.	Kalimantan Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / PROVINSI	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PP/PERDA RPPLH	PP/PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
D. Ekoregion Sulawesi					
1. Sulawesi Utara		Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
2. Gorontalo		Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
3. Sulawesi Tengah		Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4. Sulawesi Tenggara		Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
5. Sulawesi Barat		Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
6. Sulawesi Selatan		Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
E. Ekoregion Bali Nusatenggara					
1. Bali		Proses penyusunan	Belum disusun	Belum disusun	-
2. Nusa Tenggara Barat		Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3. Nusa Tenggara Timur		Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
F. Ekoregion Maluku					
1. Maluku Utara		Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2. Maluku		Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
G. Ekoregion Papua					
1. Papua Barat		Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2. Papua		Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

Catatan :

RPPLH Nasional disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hasil akhir berupa PP RPPLH

RPPLH Provinsi disusun oleh Pemerintah Provinsi, KLHK melakukan asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi, hasil akhir berupa PERDA RPPLH

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s/d 31 Desember 2018

TABEL VIII.9. DATA DAN INFORMASI PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
A.	Ekoregion Jawa				
1.	Kab. Bandung - Jawa Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Sukabumi - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
3.	Kota Cimahi - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
4.	Kota Depok - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
5.	Kota Bekasi-Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sedang disusun	-
6.	Kab. Kebumen - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
7.	Kota Semarang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
8.	Kab. Pematang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
9.	Kab. Wonogiri - Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
10.	Kab. Klaten - Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
11.	Kota Yogyakarta - DIY	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
12.	Kota Surabaya - Jawa Timur	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
13.	Kota Blitar - Jawa Timur	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
14.	Kab. Malang - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
15.	Kab. Bojonegoro - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
16.	Kab. Tuban - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
B.	Ekoregion Sumatera				
1.	Kab. Aceh Utara-Aceh	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Langkat-Sumut	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Kota Medan-Sumut	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
4.	Kota Batam-Kep. Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Kab. Bintan-Kep. Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
6.	Kota Pelalawan-Riau	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
7.	Kota Pekanbaru-Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
8.	Kab. Kuantan Singingi-Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
9.	Kab. Kampar-Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
10.	Kab. Pasaman-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
11.	Kab. Padang panjang-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
12.	Kab. Lima Puluh Kota-Sumbar	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
13.	Kota Solok-Sumbar	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
14.	Kab. Solok-Sumbar	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
15.	Kab. Merangin-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
16.	Kota Jambi-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
17.	Kab. Muaro Jambi-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
18.	Kab. Batanghari-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
19.	Kab. Ogan Komering Ulu-Sumsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
20.	Kota Palembang-Sumsel	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
21.	Kab. Muara Enim-Sumsel	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
22.	Kab. Musi Banyuasin-Sumsel	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
23.	Kab. Belitung-Kep. Babel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
24.	Kab. Belitung Timur-Kep. Babel	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
25.	Kota Bandar Lampung-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
26.	Kab. Lampung Tengah-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
27.	Kab. Bengkulu Tengah-Bengkulu	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
C. Ekoregion Kalimantan					
1.	Kab. Nunukan-Kalimantan Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Tanah Laut-Kalimantan Selatan	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Kota Pontianak-Kalimantan Barat	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
4.	Kab. Kubu Raya-Kalimantan Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
5.	Kota Tarakan -Kalimantan Utara	Belum disusun	Belum disusun	Belum disusun	-
6.	Kota Samarinda-Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
7.	Kota Balikpapan-Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
8.	Kab. Banjar-Kalimantan Selatan	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
9.	Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan	Belum disusun	Belum disusun	Belum disusun	-
10.	Kota Palangkaraya-Kalimantan Tengah	Belum disusun	Belum disusun	Belum disusun	-
11.	Kab. Kapuas -Kalimantan Tengah	Belum disusun	Belum disusun	Belum disusun	-
D. Ekoregion Sulawesi					
1.	Kab. Banggai Kepulauan-Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Tojo Una-Una-Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
3.	Kab. Gorontalo	Proses penyusunan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
4.	Kab. Gorontalo Utara	Proses penyusunan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Kab. Pohuwato - Gorontalo	Proses penyusunan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
E. Ekoregion Bali Nusatenggara					
1.	Kab. Sabu Raijua-NTT	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Alor-NTT	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Kab. Belu-NTT	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
F. Ekoregion Maluku					
1.	Kab. Morotai-Malut	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
G. Ekoregion Papua					
1.	Kab. Sorong Selatan- Papua Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Manokwari Selatan-Papua Barat	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-

Catatan : RPPLH Kab/Kota disusun oleh Pemerintah Kab/Kota, KLHK melakukan asistensi teknis penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s/d 31 Desember 2018

TABEL VIII.10. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG AIR NASIONAL

No	Daya Dukung dan Daya Tampung Air	Provinsi	Ketersediaan (M3/Tahun)	Kebutuhan Air Total (M3/Tahun)	Indikasi Status	Belum Terlampaui (Ha)	Belum Terlampaui i (%Ha)	Terlampaui (Ha)	Terlampaui (%Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.A.	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Pulau Jawa	Banten	10.293.518.517,95	8.137.737.921,74	Belum Terlampaui	645.814,46	68,19%	301.306,92	31,81%
		Daerah Istimewa Yogyakarta	2.740.270.489,61	2.138.634.582,81	Belum Terlampaui	247.556,91	76,68%	75.291,24	23,32%
		Dki Jakarta	393.454.165,38	958.939.316,61	Terlampaui	2.253,32	3,41%	63.753,61	96,59%
		Jawa Barat	41.974.448.607,82	33.109.376.209,24	Belum Terlampaui	2.564.412,74	68,19%	1.196.435,33	31,81%
		Jawa Tengah	30.913.591.105,42	31.765.737.731,56	Terlampaui	1.895.225,76	54,16%	1.603.974,92	45,84%
		Jawa Timur	32.585.999.251,28	41.502.865.888,48	Terlampaui	2.260.101,82	46,22%	2.629.808,61	53,78%
I.B.	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Pulau Sumatera	Aceh	76.608.994.285,48	19.671.655.544,65	Belum Terlampaui	6.242.957,60	87,68%	876.965,57	12,32%
		Bengkulu	96.731.969.330,49	24.639.503.564,40	Belum Terlampaui	6.780.413,42	96,42%	251.840,48	3,58%
		Jambi	101.262.816.039,23	40.339.422.826,13	Belum Terlampaui	7.880.188,34	79,22%	2.066.412,08	20,78%
		Kepulauan Bangka Belitung	17.546.708.577,77	4.793.128.695,03	Belum Terlampaui	1.545.707,08	92,35%	127.986,20	7,65%
		Kepulauan Riau	4.893.824.629,30	1.279.585.794,87	Belum Terlampaui	562.272,11	92,24%	47.309,60	7,76%
		Lampung	46.867.033.303,15	24.401.586.542,63	Belum Terlampaui	4.405.488,32	83,58%	865.210,22	16,42%
		Riau	86.813.471.063,16	32.982.688.602,16	Belum Terlampaui	7.087.819,27	81,60%	1.598.067,46	18,40%
		Sumatera Barat	37.881.737.916,38	8.596.615.883,43	Belum Terlampaui	2.429.102,45	94,48%	141.911,84	5,52%
		Sumatera Selatan	10.289.920.951,08	4.125.142.345,96	Belum Terlampaui	848.417,25	93,96%	55.507,87	6,14%
		Sumatera Utara	41.606.470.693,46	17.874.637.754,87	Belum Terlampaui	3.143.276,26	82,44%	669.591,96	17,56%
I.C.	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kalimantan	Kalimantan Barat	227.114.076.949,37	44.532.854.486,94	Belum Terlampaui	14.584.088,14	99,32%	99.158,66	0,68%
		Kalimantan Selatan	37.735.568.073,77	18.866.933.166,04	Belum Terlampaui	3.483.680,19	93,20%	254.021,48	6,80%
		Kalimantan Tengah	198.376.083.522,09	27.473.786.694,64	Belum Terlampaui	15.296.026,89	99,71%	43.755,98	0,29%
		Kalimantan Timur	77.088.049.610,05	12.877.753.720,15	Belum Terlampaui	12.449.970,73	98,91%	136.654,03	1,09%
		Kalimantan Utara	93.429.002.693,71	4.303.040.050,28	Belum Terlampaui	7.051.402,45	99,71%	20.416,95	0,29%
I.D.	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Pulau Sulawesi	Gorontalo	4.742.219.094,21	2.780.845.424,52	Belum Terlampaui	832.684,35	69,15%	371.471,28	30,85%
		Sulawesi Barat	14.190.269.827,17	4.733.451.097,21	Belum Terlampaui	1.428.238,41	86,10%	230.492,60	13,90%
		Sulawesi Selatan	43.706.142.790,80	22.709.002.991,18	Belum Terlampaui	3.509.341,76	76,67%	1.067.995,28	23,33%
		Sulawesi Tengah	45.194.092.380,33	9.822.111.454,81	Belum Terlampaui	5.265.645,07	86,06%	852.798,11	13,94%
		Sulawesi Tenggara	20.730.139.859,23	8.890.115.170,28	Belum Terlampaui	2.962.047,16	80,88%	700.319,35	19,12%
		Sulawesi Utara	9.509.009.311,94	5.070.104.727,75	Belum Terlampaui	1.189.379,08	81,92%	262.556,25	18,08%
I.E.	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kepulauan Maluku	Maluku	31.823.342.731,83	4.037.647.163,30	Belum Terlampaui	4.421.410,80	95,63%	202.018,22	4,37%
		Maluku Utara	18.182.140.615,77	4.386.575.975,01	Belum Terlampaui	2.943.540,38	93,60%	201.383,51	6,40%
I.F.	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Pulau Papua	Papua	474.757.539.756,58	6.330.542.272,33	Belum Terlampaui	31.445.362,49	99,79%	65.621,53	0,21%
		Papua Barat	123.051.219.482,68	984.425.396,74	Belum Terlampaui	9.436.174,62	99,74%	24.732,67	0,26%
I.G.	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Pulau Bali dan Nusa Tenggara	Bali	2.078.807.392,80	3.961.045.614,42	Terlampaui	151.841	26,59%	419.180	73,41%

No	Daya Dukung dan Daya Tampung Air	Provinsi	Ketersediaan (M3/Tahun)	Kebutuhan Air Total (M3/Tahun)	Indikasi Status	Belum Terlampaui (Ha)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (Ha)	Terlampaui (%/Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pulau Flores, Lembata dan Pulau Alor	Nusa Tenggara Timur	6.296.713.586,21	4.027.084.018,03	Belum Terlampaui	1.480.522	73,44%	535.427	26,56%
	Pulau Lombok	Nusa Tenggara Barat	1.294.388.781,26	3.969.507.590,86	Terlampaui	143.696	30,77%	323.302	69,23%
	Pulau Rote	Nusa Tenggara Timur	121.917.955,25	674.865.341,75	Terlampaui	59.576	44,73%	73.608	55,27%
	Pulau Sumba	Nusa Tenggara Timur	3.169.361.882,02	1.645.708.730,15	Belum Terlampaui	811.428	72,21%	312.291	27,79%
	Pulau Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	3.502.014.710,69	4.441.405.871,99	Terlampaui	947.182	61,32%	597.370	38,68%
	Pulau Timor	Nusa Tenggara Timur	4.228.467.599,81	4.322.429.849,49	Terlampaui	916.996	61,30%	578.954	38,70%

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s/d Desember 2018

TABEL VIII.11. KECENDERUNGAN PERUBAHAN KINERJA JASA LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PENGATUR AIR PERIODE 1996 SAMPAI DENGAN 2016

No	Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup 2	Indeks Kecenderungan Jasa Lingkungan Hidup 3	Luas (Ha) 4	Luas (%Ha) 5
II A.	Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pulau Jawa	Meningkat	594.785,44	4,41%
		Menurun	1.330.522,88	9,86%
		Tetap	11.532.545,36	85,49%
		Tidak Ada Data	32.226,00	0,24%
		Total	13.490.079,68	100,00%
II B.	Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pulau Sumatera	Meningkat	3.280.524,09	6,88%
		Menurun	13.456.391,89	28,23%
		Tetap	30.660.029,89	64,32%
		Tidak Ada Data	270.671,59	0,57%
		Total	47.667.617,46	100,00%
II C.	Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pulau Kalimantan	Meningkat	2.372.692,63	4,40%
		Menurun	13.623.624,99	25,30%
		Tetap	37.296.436,57	69,40%
		Tidak Ada Data	453.624,51	0,80%
		Total	53.746.378,70	100,00%
II D.	Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pulau Sulawesi	Meningkat	2.067.236,48	10,80%
		Menurun	5.651.651,49	29,52%
		Tetap	11.259.546,39	58,82%
		Tidak Ada Data	164.331,61	0,86%
		Total	19.142.765,96	100,00%
II E.	Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Kepulauan Maluku	Meningkat	405.351,47	5,09%
		Menurun	1.200.286,46	15,06%
		Tetap	6.098.112,83	76,52%
		Tidak Ada Data	265.632,89	3,33%
		Total	7.969.383,64	100,00%
II F.	Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pulau Papua	Meningkat	609.467,65	1,46%
		Menurun	6.613.403,16	15,84%
		Tetap	34.180.290,78	81,88%
		Tidak Ada Data	340.300,55	0,82%
		Total	41.743.462,14	100,00%
II G.	Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pulau Bali dan Nusa Tenggara	Meningkat	1.796.943,27	24,37%
		Menurun	1.253.897,52	17,00%
		Tetap	4.282.971,94	58,08%
		Tidak Ada Data	40.345,07	0,55%
		Total	7.374.157,80	100,00%

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s/d Desember 2018



DUKUNGAN MANAJEMEN



*Sekretariat Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan*

TABEL IX.1 REKAPITULASI SEBARAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN																								KET
		IV				III				II				I				JUMLAH								
		L	P	JML	JML	L	P	JML	JML	L	P	JML	JML	L	P	JML	JML	L	P	JML	JML	L	P	TOTAL		
1	2	3	4	5	8	6	7	8	11	9	10	10	14	12	13	14	15	15	16	16	17	17	18	18		
I	Sekretariat Dijen. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	9	4	13	62	33	29	62	6	4	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	8	4	12	80	45	35	80	5	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	6	5	11	44	29	15	44	8	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV	Direktorat Pengukuhkan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	8	4	12	72	42	30	72	9	6	3	9	2	0	0	2	58	37	37	37	95	37	37	95		
V	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5	8	13	20	15	5	20	4	3	1	4	0	0	0	0	23	14	14	14	37	14	14	37		
VI	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4	3	7	27	17	10	27	4	2	2	4	0	0	0	0	23	15	15	15	38	15	15	38		
	JUMLAH	40	28	68	305	181	124	305	36	22	14	36	3	0	0	3	246	166	166	166	412	166	166	412		
1.	BPKH Wil. I Medan	1	0	1	37	37	12	49	20	14	6	20	0	0	0	0	52	18	18	18	70	18	18	70		
2.	BPKH Wil. II Palembang	2	0	2	33	33	13	46	15	10	5	15	0	0	0	0	45	18	18	18	63	18	18	63		
3.	BPKH Wil. III Pontianak	1	0	1	35	35	14	49	4	2	2	4	1	0	0	1	39	16	16	16	55	16	16	55		
4.	BPKH Wil. IV Samarinda	1	1	2	38	38	14	52	13	10	3	13	1	0	0	1	50	18	18	18	68	18	18	68		
5.	BPKH Wil. V Banjarbaru	1	1	2	37	37	16	53	13	8	5	13	1	0	0	1	47	22	22	22	69	22	22	69		
6.	BPKH Wil. VI Manado	2	0	2	28	28	11	39	10	9	1	10	0	0	0	0	39	12	12	12	51	12	12	51		
7.	BPKH Wil. VII Makassar	2	1	3	32	32	20	52	12	6	6	12	0	0	0	0	40	27	27	27	67	27	27	67		
8.	BPKH Wil. VIII Denpasar	2	0	2	29	29	12	41	17	5	5	10	0	0	0	0	43	17	17	17	60	17	17	60		
9.	BPKH Wil. IX Ambon	2	0	2	26	26	6	32	15	2	2	4	0	0	0	0	43	8	8	8	51	8	8	51		
10.	BPKH Wil. X Irian Jaya	1	0	1	28	28	10	38	13	12	1	13	0	0	0	0	41	11	11	11	52	11	11	52		
11.	BPKH Wil. XI Yogyakarta	4	6	10	54	26	28	54	12	8	4	12	1	0	0	1	39	38	38	38	77	38	38	77		
12.	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	1	0	1	11	11	7	18	12	8	4	12	0	0	0	0	20	11	11	11	31	11	11	31		
13.	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	1	0	1	12	12	3	15	14	6	8	14	0	0	0	0	19	11	11	11	30	11	11	30		
14.	BPKH Wil. XIV Kupang	1	0	1	18	18	8	26	8	5	3	8	0	0	0	0	24	11	11	11	35	11	11	35		
15.	BPKH Wil. XV Gorontalo	4	1	5	10	10	3	13	7	0	0	0	0	0	0	0	21	4	4	4	25	4	4	25		
16.	BPKH Wil. XVI Palu	1	1	2	16	16	7	23	10	8	2	10	0	0	0	0	25	10	10	10	35	10	10	35		
17.	BPKH Wil. XVII Manokwari	2	0	2	20	20	1	21	12	11	1	12	0	0	0	0	33	2	2	2	35	2	2	35		
18.	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	1	0	1	10	10	5	15	3	1	2	3	0	0	0	0	12	7	7	7	19	7	7	19		

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN																KET			
		IV				III				II				I					JUMLAH		
		L	P	JML	JML	L	P	JML	JML	L	P	JML	JML	L	P	JML	L		P	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	1	0	1	20	2	22	4	2	6	0	0	0	25	4	29					
20	BPKH Wil. XX Bandar Lampung	2	0	2	26	10	36	3	1	4	1	0	1	32	11	43					
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	2	0	2	21	3	24	2	1	3	0	0	0	25	4	29					
22	BPKH Wil. XXII Kendari	2	0	2	13	5	18	2	1	3	0	0	0	17	6	23					
	Jumlah	37	11	48	526	210	736	163	65	228	5	0	5	731	286	1017					

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s/d 31 Desember 2018

Keterangan:

- IV L = Gol. IV Laki-laki
- IV P = Gol. IV Perempuan
- III L = Gol. III Laki-laki
- III P = Gol. III Perempuan
- II L = Gol. II Laki-laki
- II P = Gol. II Perempuan
- I L = Gol. I Laki-laki
- I P = Gol. I Perempuan

TABEL IX.2 SEBARAN PECAH BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			SLTA			SLTP			SD			TOTAL	JENIS KELAMIN		KET.	
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML		L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	19	22	23	20	21	22	23	24	
A. PUSAT																												
I	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	PNS	2	0	2	11	7	18	17	21	38	3	4	7	13	2	15	1	0	1	0	1	1	1	82	47	35	
		Upah	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	1	0	1	8	0	8	0	0	0	0	1	1	15	14	1	
II	Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	PNS	0	0	0	16	7	23	23	21	44	5	6	11	11	8	19	0	0	0	0	0	0	0	97	55	42	
		Upah	0	0	0	0	1	1	5	2	7	0	1	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	13	8	5	
III	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	PNS	3	0	3	8	9	17	15	7	22	1	2	3	12	5	17	0	0	0	1	0	1	0	63	40	23	
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4	
IV	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PNS	0	0	0	8	6	14	20	11	31	4	6	10	23	14	37	0	1	1	2	0	2	0	95	57	38	
		Upah	0	0	0	0	0	0	6	3	9	4	0	4	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	25	22	3	
V	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	PNS	0	2	2	6	6	12	6	5	11	2	1	3	8	0	8	0	1	0	0	0	0	0	37	22	15	
		Upah	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	
VI	Direktorat Pecegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	PNS	0	0	0	6	3	9	8	10	18	1	1	2	7	1	8	0	1	0	0	0	0	0	38	22	16	
		Upah	0	0	0	1	0	1	1	2	3	3	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7	4	3	
JUMLAH		PNS	5	2	7	55	38	93	89	75	164	16	20	36	74	30	104	1	3	4	3	1	4	412	243	169		
		Upah	0	0	0	1	2	3	19	12	31	6	2	8	28	1	29	0	0	0	0	1	1	70	54	18		
TOTAL PNS+UPAH			5	2	7	56	40	96	108	87	195	22	22	44	102	31	133	1	3	4	3	2	5	438	297	187		
B. DAERAH																												
I	BPKH Wli. I Medan	PNS	0	0	0	5	1	6	13	0	13	4	5	9	28	12	40	0	2	0	0	0	0	0	70	50	20	
		Upah	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	6	0	6	0	0	0	3	1	4	11	9	2		
II	BPKH Wli. II Palembang	PNS	2	0	2	1	0	1	8	4	12	6	5	11	27	9	36	0	1	1	0	0	0	63	44	19		
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	6	1	7	0	0	0	1	0	1	10	9	1		

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			SLTA			SLTP			SD			TOTAL	JENIS KELAMIN		KET.
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML		L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	19	20	19	20	21	22	23	24
III	BPKH Wil. III Pontianak	PNS	0	0	0	6	3	9	8	5	13	2	2	4	21	6	27	0	1	1	0	1	1	55	37	18	
IV	BPKH Wil. IV Samarinda	Upah	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	1	11	2	13	1	0	1	0	0	18	14	4		
V	BPKH Wil. V Banjarbaru	PNS	0	0	0	5	1	6	16	10	26	4	2	6	24	5	29	0	0	0	0	1	68	49	19		
		Upah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	13	3	16	0	0	0	0	0	18	15	3		
		PNS	0	0	0	5	2	7	10	4	14	1	2	3	30	14	44	0	0	0	0	1	69	46	23		
VI	BPKH Wil. VI Manado	Upah	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	1	3	9	1	10	1	0	1	2	0	20	17	3		
		PNS	0	0	0	6	0	6	10	7	17	0	0	0	23	5	28	0	0	0	0	0	51	39	12		
		Upah	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	0	0	6	3	9	0	0	0	0	0	16	10	6		
VII	BPKH Wil. VII Makassar	PNS	0	0	0	3	3	6	18	9	27	3	2	5	15	13	28	0	0	0	0	1	67	39	28		
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	0	0	8	2	10	0	0	0	0	0	15	10	5		
VIII	BPKH Wil. VIII Denpasar	PNS	0	0	0	4	2	6	10	4	14	4	3	7	25	8	33	0	0	0	0	0	60	43	17		
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	6	1	7	1	0	1	0	0	11	10	1		
IX	BPKH Wil. IX Ambon	PNS	0	0	0	2	0	2	12	4	16	3	1	4	26	3	29	0	0	0	0	0	51	43	8		
		Upah	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	11	3	14	0	0	0	0	0	17	14	3		
X	BPKH Wil. X Irian Jaya	PNS	0	0	0	1	2	3	16	5	21	6	1	7	18	3	21	0	0	0	0	0	52	41	11		
		Upah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	15	0	0	0	0	0	15	10	5		
XI	BPKH Wil. XI Yogyakarta	PNS	0	0	0	6	8	14	13	18	31	5	6	11	14	6	20	0	1	1	0	0	77	38	39		
		Upah	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	10	1	11	1	0	1	0	0	13	12	1		
XII	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	PNS	0	0	0	3	0	3	5	3	8	3	8	11	9	0	9	0	0	0	0	0	31	20	11		
		Upah	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	10	1	11	0	0	0	0	0	14	12	2		
XIII	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	PNS	0	0	0	3	1	4	8	1	9	5	7	12	3	2	5	0	0	0	0	0	30	19	11		
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	4	6	3	1	4	10	2	12	0	0	0	0	0	22	15	7		
XIV	BPKH Wil. XIV Kupang	PNS	0	0	0	4	0	4	10	4	14	3	4	7	7	3	10	0	0	0	0	0	35	24	11		
		Upah	0	0	0	0	0	0	4	2	6	2	0	2	10	0	10	0	0	0	0	0	18	16	2		
XV	BPKH Wil. XV Gorontalo	PNS	0	0	0	4	1	5	6	2	8	5	1	6	6	0	6	0	0	0	0	0	25	21	4		
		Upah	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	0	0	14	4	18	0	0	0	0	0	25	18	7		
XVI	BPKH Wil. XVI Palu	PNS	0	0	0	5	2	7	11	3	14	3	5	8	6	0	6	0	0	0	0	0	35	25	10		
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	0	1	14	2	16	0	0	0	0	0	21	17	4		

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			SLTA			SLTP			SD			TOTAL	JENIS KELAMIN		KET.
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML		L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	19	20	21	22	23	24		
XVII	BPKH Wil. XVII Manokwari	PNS	0	0	0	5	0	5	11	1	12	3	1	4	13	0	13	0	0	0	0	1	35	32	3		
XVIII	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	Upah	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1	1	9	2	11	2	0	2	1	22	12	10			
XIX	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	PNS	0	0	0	4	0	4	14	2	16	2	1	3	5	1	6	0	0	0	0	29	25	4			
XX	BPKH Wil. XX Bandar Lampung	Upah	0	0	0	0	0	0	3	3	6	2	0	2	9	3	12	0	0	0	0	20	14	6			
XXI	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	PNS	0	0	0	3	3	6	15	4	19	0	0	0	14	4	18	0	0	0	0	43	32	11			
XXII	BPKH Wil. XXII Kendari	Upah	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	1	3	6	1	7	0	0	0	0	15	9	6			
		PNS	0	0	0	5	1	6	15	1	16	0	0	0	5	2	7	0	0	0	0	29	25	4			
		Upah	0	0	0	0	0	0	5	2	7	1	0	1	10	5	15	2	0	2	0	25	18	7			
		PNS	0	0	0	2	0	2	14	5	19	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	23	17	6			
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	6	8	1	1	2	10	0	10	0	0	0	0	20	13	7			
	JUMLAH	PNS	2	0	2	86	31	117	249	100	349	62	57	119	322	98	420	0	5	5	0	1017	721	296			
	TOTAL PNS + UPAH	Upah	0	0	0	0	0	0	47	44	91	19	6	25	207	44	251	8	0	8	7	383	288	95			
			2	0	2	86	31	117	296	144	440	81	63	144	529	142	671	8	5	13	7	1400	1009	391			

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s/d 31 Desember 2018

TABEL IX.3. PERKEMBANGAN JUMLAH PNS BERDASARKAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN PUSAT DAN DAERAH

No	Unit Kerja	PERENCANA		JLH. PERENCANA	SURTA				JLH. SURTA	Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)				JLH. PEH	PRANATA KOMPUTER				JLH. PRANATA KOMPUTER
		Ahli	Calon Ahli		Terampil	Calon Terampil	Ahli	Calon Ahli		Terampil	Calon Terampil	Terampil	Calon Terampil		Ahli	Calon Ahli	Terampil	Calon Terampil	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	PUSAT																		
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	5
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	4	1	5	0	0	1	0	1	5	0	8	0	13	0	3	0	0	3
3	Direktorat Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	0	0	0	1	0	2	0	3	7	0	6	1	14	0	0	0	0	0
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	0	0	0	1	0	1	0	2	5	0	8	0	13	0	0	0	0	0
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3	1	4	0	0	1	0	1	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	JUMLAH PUSAT	7	2	9	2	0	5	0	7	22	0	22	1	45	1	0	7	0	8
II	BPKH																		
1	BPKH Wil. I Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	2	9	1	0	0	0	1
2	BPKH Wil. II Palembang	0	0	0	4	0	0	0	4	6	1	2	0	9	1	0	0	0	1
3	BPKH Wil. III Pontianak	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	1	10	0	0	0	0	0
4	BPKH Wil. IV Samarinda	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	13	2	21	0	0	0	0	0
5	BPKH Wil. V Banjarbaru	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	8	3	18	0	0	0	0	0
6	BPKH Wil. VI Manado	0	0	0	0	0	2	0	2	4	1	4	0	9	0	1	0	1	1
7	BPKH Wil. VII Makassar	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	7	0	10	0	0	0	0	0
8	BPKH Wil. VIII Denpasar	0	0	0	4	0	3	0	7	8	2	3	2	15	0	0	0	0	0
9	BPKH Wil. IX Ambon	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2	0	10	1	0	0	0	1
10	BPKH Wil. X Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	2	2	16	0	0	0	0	0
11	BPKH Wil. XI Yogyakarta	0	0	0	4	0	0	0	4	5	0	10	1	16	0	0	0	0	0
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	3	1	15	0	0	0	0	0
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	0	0	0	1	0	0	0	1	9	0	4	1	14	0	0	0	0	0
14	BPKH Wil. XIV Kupang	0	0	0	0	0	4	0	4	9	0	3	0	12	0	0	1	1	1
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	1	9	0	0	0	0	0
16	BPKH Wil. XVI Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	4	1	15	0	0	0	0	0
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	8	0	0	0	0	0
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	4	15	0	0	0	0	0
20	BPKH Wil. XX Lampung	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	6	2	11	0	0	0	0	0
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	7	12	0	0	0	0	0
22	BPKH Wil. XXII Kendari	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	8	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	14	0	10	0	24	123	11	96	35	265	3	0	1	1	5
	JUMLAH PUSAT + BPKH	7	2	9	16	0	15	0	31	145	11	118	36	310	4	0	8	1	13

No	Unit Kerja	ANALIS KEPEG		JLH. ANALIS KEPEG.	ARSIPARIS			JLH. ARSIPARIS	PRANATA HUMAS CALON AHLI	JUMLAH PRANATA HUMAS	Perancang Peraturan Perundang-undangan		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		JUMLAH PENGELOLA PENGADAAN BRG/JASA	TOTAL
		Ahli	Calon Ahli		Terampil	Ahli	Calon Terampil				CALON AHLI	AHLI	CALON AHLI			
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	PUSAT															
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1	0	1	3	0	0	3	1	1	1	0	0	0	11	
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	25	
3	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	17	
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
	JUMLAH PUSAT	1	0	1	4	1	0	5	1	1	1	1	0	1	75	
	BPKH															
1	BPKH Wli. I Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	BPKH Wli. II Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
3	BPKH Wli. III Pontianak	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	14	
4	BPKH Wli. IV Samarinda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
5	BPKH Wli. V Banjarbaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
6	BPKH Wli. VI Manado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
7	BPKH Wli. VII Makassar	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	14	
8	BPKH Wli. VIII Denpasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
9	BPKH Wli. IX Ambon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
10	BPKH Wli. X Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	13	
11	BPKH Wli. XI Yogyakarta	1	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17	
12	BPKH Wli. XII Tanjungpinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	
13	BPKH Wli. XIII Pangkalpinang	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	
14	BPKH Wli. XIV Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
15	BPKH Wli. XV Gorontalo	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	18	
16	BPKH Wli. XVI Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	16	
17	BPKH Wli. XVII Manokwari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
18	BPKH Wli. XVIII Banda Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
19	BPKH Wli. XIX Pekanbaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	BPKH Wli. XX Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	15	
21	BPKH Wli. XXI Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	13	
22	BPKH Wli. XXII Kendari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
	JUMLAH	1	0	1	6	0	0	6	0	0	0	10	0	10	316	
	JUMLAH PUSAT + BPKH	2	0	2	10	1	0	11	1	1	1	11	0	11	391	

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data SD 31 Desember 2018

TABEL IX.4. PERKEMBANGAN DIKLAT PENJENJANGAN PNS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

NO	UNIT KERJA	DIKLAT PENJENJANGAN (orang)														
		TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		LEMHANA S	SPATI	JML	LEMHANA S	SPATI	JML	LEMHANA S	SPATI	JML	LEMHANA S	SPATI	JML	LEMHANA S	SPATI	JML
A. PUSAT																
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	0	0	0	1	1										
2	Direktorat Perencanaan Kawasan Kehutanan	0	0	0	0	0										
3	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	0	0	0	0	0										
4	Direktorat Pengukutan, Penatausahaan, Tenurial Kawasan Hutan	0	0	0	0	0										
5	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	0	0	0	1	0	1									
6	Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan	0	0	0	0	0	0									
Terdapat perubahan Struktur Organisasi pada lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pusat pada tahun 2015																
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Direktorat Pengukutan dan Penatausahaan Kawasan Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JUMLAH A		0	0	0	1	1	2	3	0	0	0	1	1	0	0	1
B. DAERAH																
1	BPKH WILAYAH I MEDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BPKH WILAYAH III PONTIANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BPKH WILAYAH V BANJARBARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BPKH WILAYAH VI MANADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BPKH WILAYAH IX AMBON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10	BPKH WILAYAH X PAPUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	BPKH WILAYAH XI YOGYAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	UNIT KERJA	DIKLAT PENJENJANGAN (orang)																																			
		TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018																			
		LEMHANA S	SPATI	SPAMEN	SPAMA	PIM TK.II	PIM TK.III	PIM TK.IV	JML	LEMHANA S	SPATI	SPAMEN	SPAMA	PIM TK.II	PIM TK.III	PIM TK.IV	JML	LEMHANA S	SPATI	SPAMEN	SPAMA	PIM TK.II	PIM TK.III	PIM TK.IV	JML	LEMHANA S	SPATI	SPAMEN	SPAMA	PIM TK.II	PIM TK.III	PIM TK.IV	JML				
12	BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	BPKH WILAYAH XIV KUPANG	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	BPKH WILAYAH XV GORONTALO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	BPKH WILAYAH XVI PALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	BPKH WILAYAH XX LAMPUNG	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	BPKH WILAYAH XXII KENDARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH B		0	0	0	2	3	5	7	0	0	0	2	5	7	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH A+B		0	0	0	3	4	7	10	0	0	0	1	2	7	0	0	1	3	0	0	0	1	4	5	0	0	0	0	1	2	8	11	8	11	11	11	

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data SID 31 Desember 2018

**TABEL IX.5. PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

I. UNDANG-UNDANG

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	UU Nomor 41	1999	Kehutanan	Masih berlaku dan ada perubahan
2	UU Nomor 19	2004	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang	Masih berlaku

II. PERATURAN PEMERINTAH

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PP. Nomor 44	2004	Perencanaan Kehutanan	Masih berlaku
2	PP. Nomor 2	2008	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Dephut	Sudah tidak berlaku
3	PP. Nomor 10	2010	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
4	PP. Nomor 24	2010	Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku dan ada perubahan
5	PP. Nomor 60	2012	Perubahan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
6	PP. Nomor 61	2012	Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
7	PP. Nomor 33	2014	Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan	Masih berlaku
8	PP. Nomor 104	2015	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku
9	PP. Nomor 105	2015	Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
10	PP. Nomor 46	2016	Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Masih berlaku
11	PP. Nomor 46	2017	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Masih Berlaku

III. PERATURAN PRESIDEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Perpres Nomor 28	2011	Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah	Masih berlaku
2	Perpres Nomor 88	2017	Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Masih berlaku

IV. INSTRUKSI PRESIDEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Instruksi Presiden Nomor 10	2011	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
2	Instruksi Presiden Nomor 6	2013	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
3	Instruksi Presiden Nomor 8	2015	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Masih berlaku
4	Instruksi Presiden Nomor 6	2017	Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Izin Baru Hutan Alam primer dan Lahan Gambut	Masih berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
5	Instruksi Presiden Nomor 8	2018	Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	Masih Berlaku

V. PERATURAN MENTERI/ KEPUTUSAN MENTERI

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	683/Kpts-II/1981	1981	Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi	Masih berlaku
2	364/Kpts-II/1990; 519/Kpts/HK.050/7/1990; 23-VII-1990	1990	Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Masih berlaku
3	418/Kpts-II/1993	1993	Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
4	292/Kpts-II/1995	1995	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	250/Kpts-II/1996	1996	Perubahan Kepmenhut No.418/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
6	613/Kpts-II/1997	1997	Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan	Sudah tidak berlaku
7	333/Kpts-II/1999	1999	Pedoman Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Hutan	Sudah tidak berlaku
8	32/Kpts-II/2001	2001	Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
9	70/Kpts-II/2001	2001	Penetapan Kawasan Lindung Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
10	146/Kpts-II/2003	2003	Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
11	230/Kpts-II/2003	2003	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Sudah tidak berlaku
12	P.31/Menhut-II/2005	2005	Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan	Sudah tidak berlaku
13	P.28/Menhut-II/2006	2006	Sistem Perencanaan Kehutanan	Sudah tidak berlaku
14	P.66/Menhut-II/2006	2006	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
15	P.67/Menhut-II/2006	2006	Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan	Masih berlaku
16	P.26/Menhut-II/2007	2007	Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kehutanan No.292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
17	P.62/Kpts-II/2007	2007	Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/2007 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
18	23/MEN/XI/2007; P.52/Menhut-II/2008	2008	Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penyelenggaraan Transmigrasi	Sudah tidak berlaku
19	P.43/Menhut-II/2008	2008	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
20	P.56/Menhut-II/2008	2008	Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
21	P.38/Menhut-II/2008	2008	Perubahan Keempat Atas Kepmenhut No.292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
22	P.53/Menhut-II/2008	2008	Optimalisasi Peruntukan Areal hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Masih berlaku
23	P.48/Menhut-II/2009	2009	Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000	Sudah tidak berlaku
24	P.50/Menhut-II/2009	2009	Penegasan Status dan Fungsi Kawasan hutan	Sudah tidak berlaku
25	P.16/Menhut-II/2009	2009	Perubahan Kelima Atas Kepmenhut No. 292/Kpts-II/1995 tentang tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
26	P.6/Menhut-II/2009	2009	Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Masih berlaku
27	P.28/Menhut-II/2009	2009	Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
			Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah	
28	P.02/Menhut-II/2010	2010	Informasi Kehutanan	Masih berlaku
29	P.06/Menhut-II/2010	2010	Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP	Masih berlaku
30	P.32/Menhut-II/2010	2010	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
31	P.33/Menhut-II/2010	2010	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
32	P.34/Menhut-II/2010	2010	Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku dan ada perubahan
33	P.36/Menhut-II/2010	2010	Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku dan ada perubahan
34	P.42/Menhut-II/2010	2010	Sistem Perencanaan Kehutanan	Masih berlaku
35	P.47/Menhut-II/2010	2010	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
36	P.17/Menhut-II/2011	2011	Perubahan Atas P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
37	P.18/Menhut-II/2011	2011	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
38	P.19/Menhut-II/2011	2011	Penataan Batas Areal Kerja izin Pemanfaatan Hutan	Sudah tidak berlaku
39	P.20/Menhut-II/2011	2011	Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
40	P.41/Menhut-II/2011	2011	Standar Fasilitas Saran dan Prasarana KPH Lindung Model dan KPH Produksi Model	Masih berlaku
41	P.44/Menhut-II/2011	2011	Perubahan Kedua Atas P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
42	P.49/Menhut-II/2011	2011	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030	Masih berlaku
43	P.50/Menhut-II/2011	2011	Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
44	P.54/Menhut-II/2011	2011	Perubahan Atas P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana KPH Lindung Model dan KPH Produksi Model	Masih berlaku
45	P.38/Menhut-II/2012	2012	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2012 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan	Sudah tidak berlaku
46	P.44/Menhut-II/2012	2012	Pengukuhan Kawasan Hutan	Masih berlaku
47	P.41/Menhut-II/2012	2012	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
48	P.14/Menhut-II/2013	2013	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan	Sudah tidak berlaku
49	P.43/Menhut-II/2013	2013	Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan Tujuan Khusus	Masih berlaku
50	P.46/Menhut-II/2013	2013	Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Masih berlaku
51	P.47/Menhut-II/2013	2013	Pedoman Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Masih berlaku
52	P.62/Menhut-II/2013	2013	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan	Masih berlaku
53	P.16/Menhut-II/2014	2014	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
54	P.25/Menhut-II/2014	2014	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
55	P.27/Menhut-II/2014	2014	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
			Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	
56	P.28/Menhut-II/2014	2014	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
57	P.29/Menhut-II/2014	2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku
58	Peraturan Bersama Tiga Menteri dan Kepala BPN No. 79/2014, No. PB.3/menhut-II/2014, No. 17/PRT/M/2014, No. 8/SKB/X/2014	2014	Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam KH	Masih berlaku
59	P.16/MenLHK-II/2015	2015	Perubahan kedua atas Permenhut No.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku
60	P.50/Menlhk/Setjen/2016	2016	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
61	P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2016	2016	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat di Konversi	Sudah tidak berlaku
62	P.81/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2016	2016	Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Masih berlaku
63	P.93/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2016	2016	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Masih berlaku
64	P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018	2018	Tata cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Masih berlaku
65	P.97/MENLHK/Setjen/Kum.1/11/2018	2018	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Masih berlaku
66	P.22/MENLHK/Setjen/Kum.1/7/2018	2018	Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Masih berlaku
67	P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018	2018	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Masih berlaku
68	P.17/Menlhk/SETJEN/Kum.1/5/2018	2018	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria	Masih berlaku

VI. SK. MENTERI (PIPIB)

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SK. 7416/Menhut-VII/IPSDH/2011	2006	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi I)	Sudah tidak berlaku
2	SK. 2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	2012	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi II)	Sudah tidak berlaku
3	SK. 6315/Menhut-VII/IPSDH/2012	2012	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi III)	Sudah tidak berlaku
4	SK. 2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	2013	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IV)	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
5	SK. 2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	2013	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi V)	Sudah tidak berlaku
6	SK. 3706/Menhut-VII/IPSDH/2014	2014	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VI)	Sudah tidak berlaku
7	SK. 6982/Menhut-VII/IPSDH/2014	2014	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VII)	Sudah tidak berlaku
8	SK. 2312/Menhut-VII/IPSDH/2015	2015	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VIII)	Sudah tidak berlaku
9	SK. 5385/Men-LHK-PKTL/IPSDH/2015	2015	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IX)	Sudah tidak berlaku
10	SK. 2300/Men-LHK/PKTL/IPSDH/Pla.1/5/2016	2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi X)	Sudah tidak berlaku
11	SK. 6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016	2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI)	Sudah tidak berlaku
12	SK.351/MenLHK/SETJEN/PLA.1/7/2017	2017	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XII)	Sudah tidak berlaku
13	SK.6559/MenLHK/IPSDH/PLA.1/12/2017	2017	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIII)	Sudah tidak berlaku
14	SK.3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018	2018	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIV)	Sudah tidak berlaku
15	SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018	2018	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV)	Masih berlaku

VII. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SK.91/VII-PW/2006	2006	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
2	P.01/VII-SET/2009	2009	Nama-nama Jabatan dan uraian Jabatan Non Struktural Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
3	P.02/VII-SET/2009	2009	Prosedur Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
4	P.03/VII-SET/2009	2009	Klasifikasi Arsip/Dokumen Pengukuhan dan Perubahan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	P.01/VII-SET/2010	2010	Peraturan Nama-nama Jabatan dan Uraian Jabatan Non Struktural Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
6	P.02/VII-SET/2010	2010	Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
7	P.03/VII-SET/2010	2010	Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2010-2014	Sudah tidak berlaku
8	P.04/VII-SET/2010	2010	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2011	Sudah tidak berlaku
9	P.05/VII-SET/2010	2010	Petunjuk Teknis Pemetaan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat, Penetapan Areal Kerja, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa	Sudah tidak berlaku
10	P.06/VII-SET/2010	2010	Mekanisme dan Tata Cara Penelaahan Peta Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
11	P.07/VII-SET/2010	2010	Standar Nomenklatur Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
12	P.08/VII-SET/2010	2010	Standar Biaya dan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
13	P.1/VII-SET/2011	2011	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Masih berlaku
14	P.2/VII-SET/2011	2011	Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
15	P.3/VII-SET/2011	2011	Perubahan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
16	P.4/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
17	P.5/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan	Masih berlaku
18	P.6/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
19	P.7/VII-SET/2011	2011	Renstra Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
20	P.8/VII-SET/2011	2011	Standar Kegiatan dan Biaya Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2010	Sudah tidak berlaku
21	P.9/VII-SET/2011	2011	Rencana Kerja Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
22	P.1/VII-SET/2012	2012	Penetapan Kinerja Ditjen Planhut Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
23	P.4/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemasangan Tanda Batas dan Pengukuran Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
24	P.5/VII-WP3H/2012	2012	Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP	Sudah tidak berlaku
25	P.6/VII-SET/2012	2012	Rencana Kerja Ditjen Planhut Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
26	P.9/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dengan Menggunakan GPS	Masih Berlaku
27	P.10/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
28	P.11/VII-SET/2012	2012	Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
29	P.13/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kehutanan melalui Mekanisme Kerjasama dengan pengelola hutan	Sudah tidak berlaku
30	P.14/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan dari Menhut kepada Gubernur	Sudah tidak berlaku
31	P.15/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
32	P.16/VII-SET/2012	2012	Mekanisme dan Tata Cara Penelaahan Peta Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Perubahan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
33	P.17/VII-SET/2012	2012	Pedoman Penyusunan Laporan Bidang Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
34	P.1/VII-SET/2013	2013	Penetapan Kinerja Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
35	P.2/VII-SET/2013	2013	Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Tata Batas/Penetapan Kawasan Hutan	Masih berlaku
36	P.3/VII-SET/2013	2013	Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	Masih berlaku
37	P.4/VII-SET/2013	2013	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
38	P.5/VII-SET/2013	2013	Standar, Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
39	P.6/VII-SET/2013	2013	Perubahan P.5/VII-SET/2013 tentang Standar, Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
40	P.7/VII-SET/2013	2013	Mekanisme Pengelolaan Data Spasial Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Masih berlaku
41	P.1/VII-Set/2014	2014	Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
42	P.2/VII-Set/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai kawasan Hutan Dengan Menggunakan GNSS (Global Navigation Satellite System).	Masih berlaku
43	P.3/VII-IPSDH/2014	2014	Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan	Masih berlaku
44	P.4 /VII/PKH/2014	2014	petunjuk teknik pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan.	Sudah tidak berlaku
45	P.5/VII-PKH/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan Kepada Gubernur	Sudah tidak berlaku
46	P.6/VII-PKH/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kehutanan Melalui Mekanisme Kerjasama	Sudah tidak berlaku
47	P.7 /VII-Set/2014	2014	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2015	Sudah tidak berlaku
48	P.8/VII-Set/2014	2014	Standar Kegiatan Dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2015	Sudah tidak berlaku
49	P.4/PKTL-SET/2015	2015	Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	Masih berlaku
50	P.5/PKTL-SET/2015	2015	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Pemegang Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan Guna Membangun Kebun Bagi Masyarakat di Sekitar Lokasi Perkebunan	Masih berlaku
51	P.10/PKTL-SET/2015	2015	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	Sudah tidak berlaku
52	P. 1/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/2016	2016	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Sudah tidak berlaku
53	P. 2/ PKTL/SETDIT/OTL.1/3/2016	2016	Nama nama Jabatan dan Uraian Jabatan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Masih berlaku
54	P. 3/SETDIT /PLA.2/9/2016	2016	Petunjuk teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.	Masih berlaku
55	P.6/PKTL/SETDIT/OTL.1/12/2016	2016	Tentang Nama Jabatan Dan Uraian Jabatan Non Struktural Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan.	Masih berlaku
56	P. 7/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2016	2016	Tentang Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan.	Masih berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
57	P.8/PKTL/SETDIT/PROEV/ Set.1/ 12/2016	2016	Penetapan Indikator Kinerja Utama	Masih berlaku
58	P.2/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/ 2017	2017	Perjanjian Kinerja	Sudah tidak berlaku
59	P.3/PKTL/IPSDH/PLA.1/ 2017	2017	Petunjuk Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam Rangka Verifikasi PIPPIB	Masih berlaku
60	P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/ 2017	2017	Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan	Masih berlaku
61	P.5/PKTL/SETDIT/KUM.1/4/ 2017	2017	Petunjuk Pelaksanaan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Berbasis Geospasial	Masih berlaku
62	P.9/PKTL/KUH/PLA.2/11/ 2018	2018	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Batas Pencadangan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif dalam Rangka Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Tidak produktif untuk Sumber Tanah Onjek Reforma Agraria	Masih berlaku
63	P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/8/ 2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No. P.9/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2017 tentang Standar Kegiatan dan Biaya (SKB)	Masih berlaku
64	P.14/PKTL/SETDIT/KEU.1/1 2/ 2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No. P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018 tentang Perjanjian Kinerja Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018	Masih berlaku
65	P.10/PKTL/SETDIT/OTL.2/1 2/ 2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. P.8/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2017 tentang Prosedur Kerja Lingkup Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017	Masih berlaku
66	P.12/PKTL/SETDIT/KEU.0/1 2/ 2018	2018	Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019	Masih berlaku
67	P.4/PKTL/SETDIT/KEU.0/3/ 2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NO. P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018 tentang Perjanjian Kinerja Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018	Masih berlaku
68	P.2/PKTL/SETDIT/OTL.2/3/ 2018	2018	Prosedur Kerja Lingkup Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Masih berlaku
69	P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/ 2018	2018	Perjanjian Kinerja Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018	Masih berlaku
70	P.5/PKTL/SETDIT/Kum.1/8/ 2018	2018	Petunjuk Teknis Penelitian Tim Terpadu dalam Rangka Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) tidak Produktif untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria	Masih berlaku
71	P.3/PKTL/SETDIT/OTL.2/3/ 2018	2018	Proses Bisnis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Masih berlaku
72	P.11/PKTL/PDLKWS/OTL.0/ 12/ 2018	2018	Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Wilayah Ekorergion	Masih berlaku
73	P.8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11 /2018	2018	Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019	Masih berlaku
74	P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/1 2/ 2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No.P.9/PKTL-STE/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019	Masih berlaku

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s/d 31 Desember 2018

TABEL IX.6. REKAPITULASI PERKEMBANGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	SATKER/LOKASI	TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		DIPA 29		DIPA 29		DIPA 29		DIPA 29		DIPA 29	
I	JUMLAH PUSAT DAN UPT (Hil)	489.964.876	475.525.297	323.973.949	309.643.417	1.100.434.984.000					
	PUSAT	87.536.170	149.006.457	85.261.301	97.567.002	197.038.900.000					
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	46.638.662	147.790.383								
2	Dit. Perencanaan Kawasan Hutan	9.184.086	161.367								
3	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	6.744.454	146.080								
4	Dit. Pengukuhan, Penatalaksanaan, dan Tenurial Kawasan Hutan	11.843.031	588.538								
5	Dit. Wilayah Pengelolaan dan Penyajian Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan	7.894.256	164.348								
6	Dit. Penggunaan Kawasan Hutan	5.231.681	155.741								
<p>Terdapat perubahan struktur organisasi di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2015. Berdasarkan Surat Kepala Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN-RB Nomor: B/809/D.II.PAN-RB/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang dijadikan acuan untuk menjadikan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka percepatan proses penyusunan dokumen anggaran DIPA APBN-P Tahun 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sehubungan dengan Surat Direktur Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Nomor: S-791/AG/2015 tanggal 9 April 2015 perihal, Ditjen Perbendaharaan dimohon untuk dapat menonaktifkan DIPA awal (DIPA APBN TA 2015) Satker eks Ditjen Planologi Kehutanan di Lingkup Kementerian Kehutanan. Sehingga terhitung bulan April 2015, Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Pengelola Anggaran Linokuh, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.</p>											
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		-	61.170.688	62.165.336	68.605.187.000					
2	Dit. Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		-	6.128.014	15.388.583	46.935.172.000					
3	Dit. Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan		-	4.904.985	7.492.242	62.582.007.000					
4	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDH		-	5.664.127	4.789.033	9.691.605.000					
5	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		-	3.552.840	3.881.732	5.416.763.000					
6	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		-	3.840.647	3.850.076	3.808.166.000					
II	UPT (BPKH)	402.426.706	326.518.840	238.712.648	212.076.415	903.396.084.000					
1	BPKH Wilayah I Medan	25.407.071	19.889.747	14.264.847	13.025.078	72.255.265.000					
2	BPKH Wilayah II Palembang	22.937.892	15.629.007	12.853.256	10.187.869	55.371.428.000					
3	BPKH Wilayah III Pontianak	22.444.477	16.526.302	15.981.129	11.390.243	55.093.789.000					
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	35.719.338	17.745.963	14.478.620	12.955.264	49.276.973.000					
5	BPKH Wilayah V Banjarbaru	17.324.397	14.371.948	13.944.484	11.156.446	42.055.606.000					
6	BPKH Wilayah VI Manado	20.181.438	17.803.477	13.127.446	11.571.496	35.943.022.000					
7	BPKH Wilayah VII Makassar	22.294.271	15.018.531	12.947.387	12.912.028	64.993.982.000					
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	16.192.913	13.776.895	10.545.634	10.866.787	17.726.083.000					
9	BPKH Wilayah IX Ambon	14.137.294	15.687.781	10.793.966	9.919.392	43.364.257.000					
10	BPKH Wilayah X Jayapura	22.919.090	15.837.773	11.356.082	10.605.713	53.388.295.000					
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	12.175.435	13.136.486	12.968.888	10.835.954	15.531.506.000					
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	13.270.584	12.453.852	10.645.880	7.437.881	23.193.711.000					
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	13.745.916	10.919.962	7.214.389	6.680.340	23.474.701.000					
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	13.519.517	13.865.339	8.721.135	7.293.861	20.827.642.000					

NO	SATKER/LOKASI	TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		DIPA 29		DIPA 29		DIPA 29		DIPA 29		DIPA 29	
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	8.330.826		10.297.687		7.833.624		6.854.885		15.204.544.000	
16	BPKH Wilayah XVI Palu	25.420.975		13.464.641		9.843.447		9.360.092		39.816.845.000	
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	20.910.863		15.215.686		10.838.703		10.687.948		53.011.482.000	
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	11.967.560		13.773.130		7.343.970		5.704.193		20.579.074.000	
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	18.903.803		16.981.723		7.634.787		7.759.089		47.663.351.000	
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	15.289.466		16.141.430		7.455.978		8.952.147		17.331.328.000	
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	18.046.998		12.637.354		10.738.039		7.800.506		91.529.244.000	
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	11.288.582		15.344.126		7.480.957		8.119.203		45.763.956.000	
III	DINAS KEHUTANAN	37.032.975		0		0		0		0	
1	Dinas Kehutanan Prov Banten	637.946		-		-		-		-	
2	Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	240.400		-		-		-		-	
3	Dinas Kehutanan Prov Jawa Barat	729.638		-		-		-		-	
4	Dinas Kehutanan Prov Jawa Tengah	945.362		-		-		-		-	
5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY	775.524		-		-		-		-	
6	Dinas Kehutanan Prov Jawa Timur	610.800		-		-		-		-	
7	Dinas Kehutanan Prov NAD	1.000.448		-		-		-		-	
8	UPTD BPPK I Sumut	1.452.358		-		-		-		-	
9	UPTD BPPK II Sumut	649.200		-		-		-		-	
10	Dinas Kehutanan Prov Riau	1.097.822		-		-		-		-	
11	Dinas Kehutanan Prov Kep.Riau	774.880		-		-		-		-	
12	Dinas Kehutanan Prov Sumatera Barat	889.613		-		-		-		-	
13	UPTD BIPHUT Jambi	937.816		-		-		-		-	
14	Dinas Kehutanan Prov Bengkulu	1.260.648		-		-		-		-	
15	Dinas Kehutanan Prov Sumatera Selatan	881.165		-		-		-		-	
16	Dinas Kehutanan Prov Bangka Belitung	739.051		-		-		-		-	
17	UPTD IPH Lampung	941.353		-		-		-		-	
18	UPTD IPH Kalbar	1.205.640		-		-		-		-	
19	Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Tengah	1.427.857		-		-		-		-	
20	UPTD Planologi Balikpapan	636.957		-		-		-		-	
21	UPTD Planologi Samarinda	1.703.644		-		-		-		-	
22	UPTD Planologi Tarakan	671.950		-		-		-		-	
23	Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Selatan	965.655		-		-		-		-	
24	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Utara	1.687.487		-		-		-		-	
25	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Tengah	1.438.548		-		-		-		-	
26	Dinas Kehutanan Perkebunan Gorontalo	877.605		-		-		-		-	
27	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Selatan	1.659.326		-		-		-		-	

NO	SATKER/LOKASI	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
		DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29
28	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Tenggara		-	-	-	-
29	UPTD Balai IPH Kendari	1.547.621	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Barat	872.250	-	-	-	-
31	Dinas Kehutanan Prov Bali	864.922	-	-	-	-
32	Dinas Kehutanan Prov NTB	998.540	-	-	-	-
33	Dinas Kehutanan Prov NTT	847.400	-	-	-	-
34	Dinas Kehutanan Prov Maluku	1.260.776	-	-	-	-
35	Dinas Kehutanan Prov Maluku Utara	1.124.100	-	-	-	-
36	Dinas Kehutanan Prov Papua Barat	1.203.673	-	-	-	-
37	Dinas Kehutanan Prov Papua	1.475.000	-	-	-	-

Keterangan:

Pada TA 2010 terdapat penerimaan Hibah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Planologi sebesar Rp 17.980.900.000,-, namun sampai dengan Tahun Anggaran tidak diterima lapornya karena bukan kewajiban pihak negara donor (on budget treasury)

Sumber : Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data SID 31 Desember 2018

TABEL IX.7. PERKEMBANGAN REALISASI KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

NO	SATKER	TAHUN 2014						TAHUN 2015						TAHUN 2016						TAHUN 2017						TAHUN 2018								
		BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029					
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SSA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SSA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SSA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SSA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SSA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SSA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SSA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SSA	
	TOTAL	526.397.851.000	474.666.878.756	90,07	52.310.972.244	474.309.223.000	395.570.950.429	83,43	43.686.807.716	323.973.949.000	296.802.622.318	91,61	27.171.326.682	309.543.417.000	292.159.092.692	94,35	17.484.324.308	1.100.434.984.000	584.151.090.483	53,08	516.283.893.517	197.038.900.000	149.164.871.299	75,70	47.874.028.701									
	PUSAT	87.336.170.000	80.949.002.671	92,02	6.987.167.329	147.790.383.000	112.544.487.806	76,15	334.230.339	85.261.301.000	80.232.176.922	94,10	5.029.122.678	97.367.002.000	87.127.706.124	89,30	10.439.295.676																	
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	46.638.662.000	41.945.845.642	89,94	4.899.816.156	14.301.240.000	14.004.019.299	97,92	297.220.701																									
2	Dit. Perencanaan Kawasan Hutan	9.184.086.000	9.128.639.808	99,40	55.446.192	161.367.000	161.355.001	99,99	11.999																									
3	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	6.744.454.000	6.115.994.498	90,68	628.469.502	146.080.000	145.972.602	99,93	107.198																									
4	Dit. Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan	11.843.031.000	10.759.859.957	90,85	1.083.174.043	586.538.000	551.746.536	93,75	36.786.464																									
5	Dit. Wilayah Pengabdian dan Penyelidikan Areal Pemantauan Kawasan Hutan	7.894.256.000	7.415.433.971	93,93	478.822.029	164.348.000	164.345.755	100,00	2.245																									
6	Dit. Penggunaan Kawasan Hutan	5.231.681.000	5.180.241.595	99,02	51.439.405	155.741.000	155.642.268	99,94	89.732																									
Terdapat perubahan struktur organisasi di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2015																																		
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					147.790.383.000	112.544.487.806	76,15	35.248.895.194	61.170.688.000	58.615.823.953	95,82	2.554.864.047	62.165.336.000	55.498.652.588	89,28	6.686.483.412																	
2	Dit. Perencanaan, Pengamanan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan									6.128.014.000	5.396.688.372	88,07	731.315.628	15.398.588.000	12.450.752.995	80,91	2.937.630.005																	
3	Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan									4.904.985.000	4.688.018.538	95,58	216.966.462	7.492.242.000	7.148.013.084	95,41	344.228.916																	
4	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDH									5.694.127.000	5.005.454.613	88,37	688.672.387	4.798.033.000	4.553.888.915	95,09	235.144.085																	
5	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan									3.552.840.000	3.147.896.013	88,60	404.943.987	3.650.076.000	3.633.030.849	94,36	217.045.151																	
6	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor									3.840.647.000	3.378.286.833	87,96	462.360.167	3.881.732.000	3.843.167.693	99,01	38.564.307																	
	BPKH	402.428.706.000	381.005.681.057	89,73	41.323.024.943	326.518.840.000	283.166.462.623	86,72	43.332.377.377	238.772.648.000	216.570.443.966	90,72	22.142.204.004	212.076.415.000	205.031.386.568	96,68	7.045.028.432																	
1	BPKH Wilayah I Medan	25.407.071.000	21.587.586.810	84,97	3.819.485.190	19.886.747.000	17.845.184.695	90,22	1.944.582.315	14.284.847.000	13.488.124.508	94,63	766.722.492	13.025.078.000	12.308.189.821	94,50	716.878.179																	
2	BPKH Wilayah II Palembang	22.837.892.000	20.216.915.777	88,14	2.720.976.223	15.629.007.000	14.041.409.486	89,84	1.597.597.514	12.853.256.000	11.349.641.036	88,30	1.503.614.954	10.187.868.000	10.116.354.142	99,29	72.514.659																	
3	BPKH Wilayah III Pontianak	22.444.477.000	21.024.540.376	93,67	1.419.936.624	16.526.302.000	15.078.522.452	91,24	1.447.779.548	15.991.129.000	14.317.586.010	89,59	1.663.542.990	11.399.243.000	11.118.440.531	97,60	273.802.469																	
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	35.719.338.000	30.835.887.365	86,33	4.883.450.635	17.745.963.000	16.430.679.994	92,59	1.315.283.036	14.478.820.000	12.794.465.927	88,37	1.684.154.373	12.955.264.000	12.770.539.388	98,57	184.734.612																	
5	BPKH Wilayah V Banjarmasin	17.324.397.000	16.770.131.497	96,80	554.265.503	14.371.948.000	14.164.113.750	98,69	187.834.250	13.944.484.000	13.008.597.919	93,90	893.860.081	11.156.446.000	11.053.834.766	99,08	102.511.234																	
6	BPKH Wilayah VI Manado	20.181.438.000	19.081.555.533	94,55	1.099.882.467	17.803.477.000	16.761.038.375	94,14	1.042.438.625	13.127.446.000	12.506.086.410	95,27	621.359.590	11.571.498.000	11.418.636.885	98,66	154.859.315																	
7	BPKH Wilayah VII Makassar	22.294.271.000	20.889.999.157	93,70	1.404.271.843	15.018.631.000	13.935.478.284	92,79	1.083.052.716	12.947.387.000	12.047.382.059	93,05	900.004.941	12.912.028.000	12.519.061.988	96,96	392.866.102																	
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	16.192.913.000	14.644.129.140	90,44	1.548.783.860	13.776.866.000	12.822.483.900	93,07	954.411.100	10.545.634.000	9.805.572.784	92,98	740.061.216	10.868.787.000	10.600.990.245	97,55	285.796.755																	

NO	SATEKER	TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018			
		BAGIAN ANGGARAN 029		BAGIAN ANGGARAN 029		BAGIAN ANGGARAN 029		BAGIAN ANGGARAN 029		BAGIAN ANGGARAN 029		BAGIAN ANGGARAN 029		BAGIAN ANGGARAN 029		BAGIAN ANGGARAN 029		BAGIAN ANGGARAN 029			
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA
9	BPKH Wilayah IX Ambon	14.137.294.000	11.603.322.839	82,08	2.533.971.161	15.687.781.000	12.277.346.566	78,26	3.410.434.414	10.793.966.000	9.114.060.960	84,44	1.679.905.040	9.919.392.000	8.943.166.604	90,16	976.535.496	43.394.257.000	18.146.974.959	41,85	25.217.282.041
10	BPKH Wilayah X Jayapura	22.919.090.000	19.193.742.595	83,77	3.719.347.405	15.837.773.000	14.142.616.893	89,30	1.695.564.107	11.356.092.000	10.217.663.947	89,98	1.138.418.053	10.695.713.000	10.243.548.632	95,99	362.164.068	53.348.295.000	20.043.218.220	37,54	33.345.076.770
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	12.175.435.000	11.895.447.622	97,70	279.987.378	13.138.486.000	12.451.364.738	94,78	685.121.262	12.968.888.000	11.194.899.387	86,32	1.773.988.613	10.835.954.000	10.487.620.258	96,79	348.333.742	15.531.596.000	14.378.601.656	92,58	1.152.904.344
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	13.270.584.000	10.844.656.495	81,72	2.425.927.505	12.453.682.000	10.855.400.275	87,17	1.598.461.725	10.646.880.000	9.910.450.668	93,09	735.429.332	7.437.681.000	7.262.228.064	97,64	175.652.936	23.193.711.000	10.852.431.104	58,72	9.341.279.896
13	BPKH Wilayah XIII Panakkajene	13.745.916.000	12.859.462.389	93,56	1.146.453.611	10.919.982.000	9.756.501.446	89,35	1.163.660.554	7.214.388.000	6.623.277.795	91,61	591.111.205	6.860.940.000	6.628.391.662	96,49	53.948.118	25.474.701.000	15.284.405.600	60,15	8.160.395.970
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	13.919.517.000	12.707.406.624	91,99	812.110.376	13.895.339.000	12.630.166.590	91,09	1.235.170.410	8.721.135.000	7.746.123.891	88,82	975.011.019	7.293.861.000	6.990.304.638	95,84	303.556.162	20.827.642.000	13.746.789.286	66,00	7.080.872.764
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	8.330.826.000	7.828.596.820	93,97	502.229.180	10.297.687.000	9.833.612.534	95,49	464.074.466	7.833.624.000	7.700.673.106	98,30	132.950.894	6.854.846.000	6.589.778.663	96,14	295.063.337	15.294.544.000	11.268.465.653	74,10	3.938.078.047
16	BPKH Wilayah XVI Palu	25.420.975.000	24.295.122.394	95,57	1.125.852.606	13.464.641.000	13.216.362.948	98,16	248.278.052	9.643.447.000	9.538.883.016	97,92	204.563.984	9.360.092.000	9.315.791.674	99,53	44.300.126	38.616.645.000	26.951.573.699	67,64	12.885.271.491
17	BPKH Wilayah XVII Manado	20.910.863.000	17.245.366.600	82,47	3.665.497.400	15.215.686.000	13.034.133.640	85,66	2.181.552.360	10.838.703.000	9.532.751.275	87,95	1.305.951.725	10.887.848.000	10.227.814.616	93,98	430.033.084	53.011.492.000	24.199.358.649	45,57	28.852.123.351
18	BPKH Wilayah XVIII Aceh	11.897.580.000	10.744.673.703	89,78	1.222.886.297	13.773.130.000	12.016.704.348	87,25	1.756.425.652	7.343.970.000	6.132.982.417	83,51	1.210.987.583	5.794.199.000	5.612.404.661	96,99	91.788.439	20.578.074.000	7.412.487.797	36,02	13.166.886.203
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	18.903.803.000	16.832.362.699	89,04	2.071.440.301	16.891.723.000	11.103.269.876	65,38	5.678.453.124	7.634.787.000	6.814.426.317	89,25	820.360.683	7.759.088.000	6.999.981.790	90,09	789.127.210	47.663.351.000	10.002.337.316	20,99	37.661.013.684
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	15.298.466.000	12.994.915.661	84,99	2.294.550.339	16.141.430.000	9.539.185.995	59,10	6.602.244.005	7.455.978.000	6.801.607.668	91,22	654.370.432	8.952.147.000	8.468.189.859	94,46	495.957.141	17.331.328.000	11.268.775.695	65,19	6.032.652.365
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	18.046.998.000	16.687.909.138	92,47	1.359.088.862	12.637.354.000	12.448.043.274	98,50	189.310.726	10.738.039.000	8.890.540.710	82,70	1.847.498.290	7.809.596.000	7.498.443.631	96,10	304.062.469	91.529.244.000	32.888.273.889	35,93	58.640.970.631
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	11.288.682.000	10.675.965.963	93,69	712.626.037	15.344.126.000	8.662.835.594	56,46	6.681.290.416	7.180.957.000	6.862.846.466	95,57	318.310.504	8.118.203.000	7.688.703.420	97,16	230.689.660	45.763.866.000	19.363.927.864	42,29	26.408.628.416
DINAS KEHUTANAN		37.032.975.000	33.032.195.026	89,20	4.000.779.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Dinas Kehutanan Prov Banten	637.946.000	609.054.200	95,47	28.891.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kehutanan Berainan DKI Prov Jawa Barat	240.400.000	185.907.700	77,33	54.492.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Kehutanan Prov Jawa Tengah	729.638.000	673.487.750	92,30	56.150.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Kehutanan Prov Jawa Timur	845.362.000	904.950.000	106,45	40.412.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Tengah	775.524.000	697.107.800	89,89	78.416.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Selatan	610.800.000	509.957.125	83,49	100.842.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kehutanan Prov NAD	1.000.446.000	967.758.624	96,73	32.687.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	UPTD BPRK I Sumut	1.452.358.000	1.135.905.600	78,21	316.452.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	UPTD BPRK II Sumut	649.200.000	592.432.660	91,27	66.767.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kehutanan Prov Riau	1.097.822.000	566.039.500	51,62	501.789.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Kehutanan dan Peternakan Prov Kepulauan Riau	774.880.000	701.239.000	90,50	73.641.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Kehutanan Prov Sumatera Barat	869.613.000	646.508.075	74,33	243.104.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	UPTD BPRUT Jambi	937.816.000	695.446.700	74,16	242.369.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kehutanan Prov Bengkulu	1.260.646.000	1.162.115.901	92,18	98.530.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	SATEK	TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018			
		BAGIAN ANGGARAN 029		SISA	% REALISASI	BAGIAN ANGGARAN 029		SISA	% REALISASI	BAGIAN ANGGARAN 029		SISA	% REALISASI	BAGIAN ANGGARAN 029		SISA	% REALISASI	BAGIAN ANGGARAN 029		SISA	% REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI		
14	Dinas Kehutanan Prov Sumatera Selatan	881.165.000	772.181.100	87,63	108.983.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Dinas Pertanian dan Kehutanan Prov Bantoka Belitung	738.051.000	737.855.080	99,84	1.195.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	UPTD PH Lampung	841.353.000	881.719.900	94,73	49.633.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	UPTD IPH Kalbar	1.205.640.000	1.135.886.200	94,21	69.753.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Dinas Kehutanan Prov Kalimantan	1.427.857.000	1.423.135.500	99,67	4.721.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	UPTD Planologi Balikpapan	638.957.000	499.513.115	78,42	137.443.885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	UPTD Planologi Samarinda	1.703.644.000	1.269.487.000	74,52	434.157.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	UPTD Planologi Tarakan	671.950.000	347.058.800	51,65	324.891.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Selatan	965.655.000	922.000.700	95,48	43.654.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Utara	1.687.487.000	1.570.873.728	93,09	116.613.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Tengah	1.438.546.000	1.428.688.500	99,32	9.857.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Dinas Kehutanan dan Pertambangan Prov. Gorontalo	877.605.000	877.447.300	99,88	157.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Selatan	1.659.326.000	1.659.319.600	100,00	6.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	UPTD Balai IPH Kendari	1.547.621.000	1.533.886.500	99,11	13.734.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Barat	872.250.000	737.868.100	84,59	134.381.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Dinas Kehutanan Prov Bali	864.922.000	644.606.650	74,53	220.315.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Dinas Kehutanan Prov NTB	998.540.000	988.013.800	98,95	10.526.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Dinas Kehutanan Prov NTT	647.400.000	759.395.000	98,61	88.005.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Dinas Kehutanan Prov Maluku	1.260.776.000	1.138.168.000	90,28	122.608.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Dinas Kehutanan Prov Maluku Utara	1.124.100.000	1.041.382.000	92,64	82.718.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Dinas Kehutanan Prov Papua Barat	1.203.673.000	1.188.735.000	98,59	4.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Dinas Kehutanan Prov Papua	1.475.000.000	1.387.048.800	94,04	87.951.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Keterangan:
Pada TA 2018 terdapat penyesuaian biaya Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Planologi sebesar Rp 17.980.900.000,- namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran tidak diterima laporan keuangannya karena bukan kewenangan pihak negara donor (on budget treasury)

Terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2015. Berdasarkan Surat Kepala Departemen Biologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Tata Lingkungan Kementerian D.M.M. 000

Sumber : Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data SDG Desember 2018

STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2018



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto
PO. Box 6506, Jakarta 10270, Telp. (021) 5730289, Fax. (021) 5734632